

PEREMPUAN YANG

santri, penyelenggara pemilu, sopir ojek online,
difabel, waranggana, kuli panggul, nelayan, buruh pabrik,
penjual jamu keliling, satpam, dan pekerja seks.

Penulis : Srikandi Bawaslu di Jawa Timur

PEREMPUAN YANG

Marpuah
Devi Aulia Rohim
Royin Fauziana
Afidatusolikha
Lilik Mustafidah
Indrias Kristiningrum
Dian Pratmawati
Insiyatun
Fina Lutfiana Rahmawati
Nur Elya Anggraini

PEREMPUAN YANG

Pengarah :

Moh. Amin, Aang Kunaifi, Totok Hariyono, Nur Elya Anggraini, Purnomo Satrio Pringgodigdo, Muh. Ikhwannudin Alfianto, Eka Rahmawati

Penanggungjawab:

Sapni Syahril

Penulis :

Marpuah, Devi Aulia Rohim, Royin Fauziana, Afidatusolikha, Lilik Mustafidah, Indrias Kristiningrum, Dian Pratmawati, Insiyatun, Fina Lutfiana Rahmawati, Nur Elya Anggraini

Editor :

Nur Elya Anggraini

Tim Dokumentasi

Amryzal Perdana, Krisna Andika Tama, Royin Fauziana, Tangguh Gradhianta

Design Cover dan Tata Letak :

Ilham Bagus Priminanda

copyright © 2020

Penerbit



Scopindo Media Pustaka

Jl. Kebonsari Tengah No. 03, Surabaya

Telp. (031) 82519566

scopindomedia@gmail.com

Anggota IKAPI No. 241/JTI/2019

ISBN : 978-623-7729-32-7

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit



KETIKA PEREMPUAN PINGGIRAN BICARA PEMILU

Perempuan bisa mewujudkan sebagai entrepreneur, anggota legislatif, menteri, dokter, perawat, penyiar radio, pengawas pemilu dan ibu rumah tangga sekaligus. Semakin lama peran perempuan kian berwarna dan berdiaspora ke berbagai sektor.

Banyak perempuan yang telah berhasil menembus batas-batas yang diciptakan oleh struktur dan kultur. Tak ada yang tidak mungkin bila bara api semangat dan kerja keras dari perempuan terus berkobar untuk merebut setiap perubahan.

Demokrasi membuka selebar-lebarnya kesempatan untuk perempuan agar bisa mengambil peran. Demokrasi akan kehilangan keindahannya tanpa perempuan. Dunia pemilu dan kontestasi politik yang keras akan mengkristal dan berpotensi menjadi konflik berkepanjangan jika tidak ada perempuan yang memperindahinya.

Soekarno menyebut perempuan sebagai bunga-bunga revolusi. Jalaluddin Rumi dalam *Matsnawi* menulis bait puisi indah bahwa perempuan adalah cahaya Tuhan. Ibnu ‘Arabi dalam *Futubat Makiyyat* menggambarkan perempuan sebagai pencitraan Tuhan di muka bumi. Konon katanya, Tuhan paling lama menciptakan perempuan, karena Tuhan sedang menciptakan makhluk yang menyerupai-Nya.

Di balik kiprah banyak tokoh perempuan di ruang publik, jalan panjang perjuangan perempuan tak pernah berakhir. Problem kultur dan struktur sosial adalah palang pintu yang membuat sebagian perempuan termarginalisasi secara ekonomi dan terancam tidak mendapatkan hak-haknya secara politik.



Adalah seorang Mansour Fakih, seorang pemikir kelahiran Bojonegoro Jawa Timur, yang secara serius melakukan kajian tentang ketidakadilan terhadap perempuan. Kita akan selalu bertemu dengan fakta perihal ketidakadilan gender di setiap pojok kota, pelosok desa dan para perempuan di garis pinggir pantai.

Maka lihatlah dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, banyak perempuan yang harus rela menjadi buruh pabrik, ojek online, buruh laundry. Kita memang tidak sedang meremehkan pekerjaan mereka, namun dengan menggunakan perspektif strukturasi dari Anthony Giddens, analisa keterpinggiran perempuan merupakan bagian dari juga masalah struktur yang pada sisi lain juga berelasi dengan faktor agensi. Di titik inilah membutuhkan peran pemangku kebijakan publik untuk peduli, perhatian dan jelas keberbihaannya kepada kelompok perempuan pinggiran.

Karena bagaimanapun, ketika perempuan tidak berdaya secara ekonomi, maka juga terancam akan kehilangan hak-hak lainnya dalam ruang demokrasi. Walaupun misalnya dalam UUD 1945 dijamin hak untuk mengemukakan pendapat, hak berkumpul dan hak berserikat. Hak dasar yang dijamin oleh negara ini juga ditambahkan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa warga negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan landasan ini, perempuan harus hadir dan keterlibatannya menjadi penting sekali untuk masa depan Indonesia. Apalagi jumlah pemilih perempuan lebih banyak daripada pemilih laki laki.

Secara teoritik, pemilu adalah pesta demokrasi untuk semua rakyat. *One Man One Vote One Value*. Satu orang satu suara satu nilai. Pemilu tidak membedakan kelas sosial, kasta, kekayaan, keilmuan, dan lain lainnya. Siapapun orangnya dan apapun pangkatnya setiap orang berhak satu suara. Setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih.



Namun demikian sepanjang pemilu, para perempuan pinggiran selalu diletakkan sebagai objek. Jarang atau bahkan sulit ditemukan orang-orang pinggiran diletakkan sebagai subjek untuk berbicara dan memandang pemilu. Narasi yang muncul dan menguat setiap pemilu adalah narasi politik oleh politisi sebagai caleg atau partai politik yang berdekatan dengan rakyat, membela rakyat walau pada ujungnya juga makan uang rakyat.

Perempuan pinggiran adalah bagian sah yang mempunyai hak sama dan dijamin oleh undang-undang. Mereka yang menjadi penjual es, tukang becak, tukang tambal ban adalah orang-orang pinggiran pemilik hak suara dalam pemilu yang baru digelar. Suara mereka adalah suara penentu untuk keterpilihan calon anggota legislatif maupun calon presiden.

Sebagai warga negara, orang-orang pinggiran memiliki jumlah suara yang sama dengan para intelektual, akademisi, bahkan politisi sekalipun karena setiap orang berlaku satu suara. Secara derajat dalam suara, orang-orang pinggiran sama dengan lainnya.

Para perempuan pinggiran yang tiap hari berhadapan dengan beratnya memenuhi kebutuhan ekonomi tentu saja layak menjadi subjek yang dibahas dan diulas. Setidaknya akan ada dua pertimbangan bagi orang pinggiran dalam menghadapi pemilu. *Pertama*, momentum pemilu akan dijadikan sebagai kesempatan untuk menempatkan wakilnya dalam pemilu guna memberikan perubahan derajat hidup dirinya. *Kedua*, pemilu sebagai kesempatan untuk menerima politik uang dari calon yang membutuhkan suara dalam pemilu.

Dua jawaban ini melewati berbagai kajian dari para ahli. Burhanuddin Muhtadi dalam Buku yang diterbitkan oleh Bawaslu RI, berjudul *Pembiayaan Pemilu* menjelaskan bahwa politik uang akan menyasar terhadap kelompok rentan dan juga pemilih yang belum menentukan pilihan (swing voter). Pada titik keseimbangan dan

kebingungan pemilih untuk menentukan pilihan dan belum menemukan presfensi pilihan, maka politik uang akan bekerja untuk mempengaruhi pemilih. Walau tentu saja efek elektabilitas karena politik uang tidak besar, namun pertarungan di internal partai yang sangat ketat dan penentu kemenangan tidak lebih dari 2 persen, menyebabkan politik uang tetap dilakukan.

Persepsi yang kedua dapat juga dijadikan sebagai salah satu alasan bahwa ada beberapa keterwakilan dari orang-orang pinggiran sebagai wakil rakyat. Seperti Kisah Antonius Yogo P, mantan satpam yang terpilih di Surakarta, Jawa Tengah. Kisah Kusnadi, seorang satpam yang terpilih di DPRD Sintang, Kalbar. Di tambah juga dengan kisah Agung Darma, tukang galon yang terpilih sebagai anggota legislatif Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Kisah sukses orang pinggiran adalah satu dua cerita di antara masih banyak perempuan pinggiran belum sepenuhnya mengerti dan memahami tentang pemilu dan demokrasi. Mereka jauh dari hingar bingar pemilu dan pesta demokrasi. Alih alih berpartisipasi untuk mengawasi, tidak golput saja sudah capaian yang besar.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para perempuan penyelenggara pemilu yang telah melakukan wawancara, datang menemani dan mendengarkan segala cerita perempuan pinggiran dalam menghadapi pemilu. Mereka bercerita tentang pengalamannya mengikuti pemilu, pengetahuan-pengetahuan yang terbatas, sikap dan pandangan politik, dan juga mimpi-mimpinya tentang demokrasi dan masa depan Indonesia.

Membaca kumpulan tulisan ini kita akan menyadari bahwa tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan pemangku kebijakan cukup besar dan perlu terus ditingkatkan. Barangkali di antara kita banyak yang suka bicara di ruang seminar, depan televisi dan berdebat sengit untuk urusan tertentu. Namun barangkali kita

perlu sejenak diam dan lebih banyak memfungsikan telinga untuk memperjuangkan mereka dalam kebijakan yang nyata.

Kami dari Bawaslu RI mengapresiasi kumpulan tulisan ini. Buku yang cukup renyah dibaca dengan gaya essay dan jurnalistik akan memperkaya referensi tentang pemilu. Setidaknya buku ini telah mengajak untuk meletakkan perempuan pinggiran sebagai kata kerja yang bersuara dan bicara. Selamat untuk Bawaslu Jatim. Semoga bermanfaat untuk demokrasi dan Indonesia. Bersama Rakyat Awasi Pemilu dan Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.

Ratna Dewi Pettalolo
Anggota Bawaslu RI





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	ix
 Mak Surati, Tim Sukses Setengah Hati.....	1
<i>Marpuah</i>	
Yan di Inggat Tapi Dilupakan Perempuan Pesisir	9
<i>Devi Aulia Robim</i>	
Pemilu Kita Belum Banyak Bicara Tentang Perempuan	
Disabilitas.....	21
<i>Royin Fauziana</i>	
Politik dan Kesejahteraan : Angan Sederhana Perempuan	
Penjaga Keamanan	35
<i>Afidatusolikha</i>	
Pemilu Dalam Bingkai Pandang Santriwati.....	49
<i>Lilik Mustafidah</i>	
Elegi Buruh Pabrik.....	77
<i>Indrias Kristiningrum</i>	
Politik Dalam Benak Dua Perempuan Pengemudi Ojek	
<i>Online</i>	89
<i>Dian Pratmawati</i>	



Melawan Tradisi Patriarkhi : Perempuan Sampang Jadi Penyelenggara Pemilu.....	103
<i>Insiyatun</i>	
Pemilu dan Nyanyian Sunyi Waranggana.....	121
<i>Fina Lutfiana Rahmawati</i>	
Jerat Pemilu Atas Pekerja Seks	133
<i>Nur Elya Anggraini</i>	
TENTANG PENULIS.....	149



MAK SURATI, TIM SUKSES SETENGAH HATI

Marpuah

Adzan ashar baru saja berkumandang. Kami melangkah kecil menyusuri gang diantara padatnya rumah penduduk. Disamping kanan kiri jalan setapak yang kami lalui, tumbuh subur pohon Okra yang tengah berbuah. Saya sedang berada di sebuah desa pinggiran, dusun Krajan desa Sukerejo namanya. Salah satu desa di Kecamatan Parengan, Tuban yang berbatasan langsung dengan Bojonegoro.

Tidak terlalu sulit untuk bisa sampai disini. Setelah lima menit berjalan, sampailah kami pada seseorang yang saya cari, Surati namanya. Perempuan berusia 56 tahun yang berprofesi sebagai seorang penjual jamu keliling. Saat saya tiba dirumahnya, dia baru saja selesai mencuci bahan-bahan racikan jamu. Tampak kunyit, jahe, kunci, kencur, daun sirih bercampur dalam sebuah baskom kecil. Aroma semerbak harumnya rempah-rempah menyergap hidung. Kami disambut dengan hangat. Senyumnya mengembang saat saya memperkenalkan diri. Sekilas saya menilai, dia adalah perempuan yang ramah.

Tak butuh waktu lama, kami pun mulai bercakap ringan. Dengan pelan, saya menjelaskan maksud kedatangan. Obrolan obrolan kecil mulai mengalir. Tanpa saya minta, dia menceritakan bahan-bahan pembuatan jamu. Mungkin, perempuan yang lebih akrab disapa dengan panggilan mak Surati ini belum sepenuhnya memahami maksud kedatangan saya.

Disela-sela percakapan kami, dia mengajari saya resep pembuatan jamu. Bagaimana cara meramu kunyit asem, bagaimana



mengolah jahe merah tanpa meninggalkan sarinya dan bagaimana menjaga kulit bahan baku untuk menghasilkan cita rasa jamu yang berkhasiat untuk kesehatan pelanggannya. Tidak terlalu sulit menggali informasi dari perempuan kelahiran Sukoharjo, Solo ini, meski tutur katanya kalem dan bersahaja namun dia sebenarnya cukup komunikatif.

Sehari-hari Mak Surati menjajakan dagangannya di Desa Kepoh, Sendangrejo dan Mojomalang. Hampir warga di tiga Desa tersebut sudah sangat familiar dengannya. Dia menjual kunyit asam, beras kencur, kunci suruh, sinom, paitan, gepyok dll. Semua jamu di raciknya sendiri. Jahe dan kunyit dia tanam di kebun belakang rumah. Bahan lainya dia beli di Pasar. Tidak hanya menjual jamu racikan, dia juga menyediakan jamu *sachet* buatan pabrik seperti galian singset, sehat pria, dll.

Profesi itu dilakoninya selama puluhan tahun. Setiap hari dia berkeliling menggunakan sepeda onthel menjual jamunya. Perjuangan Mak Surati membantu suaminya dilakukan tanpa mengeluh. Dua tahun terakhir ini pekerjaannya lebih ringan, sebab dia tak perlu susah payah menggendong dagangannya berjalan kaki menyusuri jalan poros desa. Dia membeberkan, sebelum berjualan sambil mengayuh sepeda onthel, puluhan tahun dia berjualan jamu gendong. Kini dengan sepeda onthelnya, dia bisa membantu meringankan kebutuhan ekonomi keluarganya. Maklum suaminya hanya seorang buruh bangunan.

Nenek enam cucu itu masih beruntung. Kebutuhan biaya sekolah, jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya ditanggung oleh Pemerintah. Kebetulan, dia adalah salah satu penerima manfaat program Jaminan Sosial. Nenek yang telah dikarunia empat anak ini mengaku setiap harinya mendapatkan keuntungan sebesar 60.000.



Pekerjaan ini dilakoni tidak sekedar tuntutan ekonomi keluarga, tetapi meracik dan menjual jamu adalah bagian dari tradisi keluarga yang sudah dilakukan secara turun temurun.

“Jual jamu ini sudah dilakukan turun temurun, Mbak, karena kakak dan ibu saya juga penjual jamu gendong keliling” ceritanya.

Saat saya memulai diskusi tentang pemilu, dia cukup antusias. ketika saya singgung terkait penyelenggara pemilu, dari mulutnya mengalir cerita. Selama hidupnya, dia tidak pernah menjadi penyelenggara pemilu, bahkan istilah penyelenggara ditingkat paling bawah seperti KPPS saja dia tidak tahu. Yang dia pahami hanya petugas TPS. Mak Surati hanya menggelengkan kepala saat saya tanya tentang Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), apalagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mendengarnya saja baru pertama kali dari mulut saya.

Maklum, dia hanya tamatan SD. Meski bisa membaca dan menulis tapi oleh lingkungannya dia tidak pernah dilibatkan atau ditunjuk menjadi bagian dari penyelenggara teknis ditingkat TPS.

“Lha saya ini siapa Mbak, cuma bakul jamu! Masak bakul jamu kok jadi petugas TPS”. Jawab Mak Surati dengan sedikit tertawa.

Keterbatasan akses informasi dan sosialisasi tentang eksistensi lembaga penyelenggara pemilu tampaknya belum benar-benar sampai dan diketahui oleh masyarakat. Kiprah penyelenggara masih sepi dari telinga lapisan masyarakat. Gaungnya pun belum terdengar oleh rakyat kecil. Apa sepertinya pemilu ini hanya menjadi kepentingan elit, kelompok masyarakat menengah keatas. Atau memang masyarakat tidak mau tahu dan tidak peduli dengan hiruk pikuk panggung politik.

Saya yakin masih banyak Surati-Surati lain di kolong negeri ini yang tidak mengetahui keberadaan lembaga penyelenggara pemilu. Lantas apa yang dilakukan ketika haknya sebagai warga negara Indonesia tidak terpenuhi? Contoh kata hak untuk berpolitik, hak memilih sesuai hati nurani dan hak untuk berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi. Atau ketika ada bentuk pelanggaran sekecil apapun yang terjadi dibawah. Apakah cukup hanya didiamkan karna faktor ketidaktahuan.

Meski dia tidak pernah terlibat sebagai penyelenggara pemilu, Mak Surati cukup rinci menjelaskan tentang proses dan tata cara saat memberikan suara pada pelaksanaan pemilihan legislatif tahun 2019 kemarin.

“Niku bu’e.....dugi TPS, kulo nyerahke kartu panggilan, bakdo niku tanda tangan. Lajeng ngantri, ngentosi dipanggil. Mangke nek sampun angsal kartu suara mlebet bilik . Nha nek sampun nyoblos, kertune dilebetke kotak, sakderenge medal TPS niku kulo nyelup ten tinta”. (itu bu.... ketika sampai di TPS, saya menyerahkan surat undangan (C6) setelah itu saya disuruh tanda tangan, kemudian menunggu antri dipanggil. Kalau sudah diberi surat suara kemudian masuk ke bilik. Nah... kalau sudah mencoblos kartu saya masukan di kotak suara. Sebelum keluar dari TPS saya terlebih dahulu mencelupkan jari ke tinta”). Terangnya dalam bahasa Jawa yang luwes.

Mak Surati berpendapat proses pemberian hak suara pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 kemarin sangat ribet. Ia menyatakan kebingungan ketika memasukkan surat suara ke dalam kotak, dengan jumlah lima surat suara yang harus dicoblos.

“Kulo bingung bu... lha sakmonten katahe” (saya bingung bu, segitu banyaknya”), tandas ibu empat anak ini sambil tertawa renyah.



Beruntung KPPS membantu mengarahkan untuk memasukan kartu suara sesuai dengan tingkatan.

Bahkan, Mak Surati mengaku asal-asalan dalam memberikan hak suaranya. Ia merasa tidak mengenal figur calon anggota legislative. Kedua, ia merasa kurang bisa konsentrasi karna jumlah lima surat suara yang harus dicoblos. Sikap asal dalam memberikan hak suaranya ini dianggap Surati bukan persoalan serius. Baginya, *“siapa saja yang jadi, ya sama saja”*.

Istri dari Mbarno ini menuturkan, semenjak ia mempunyai hak suara, ia tidak pernah golput. Pantang baginya tidak datang ke TPS.

“Saya sreg atau tidak dengan calonnya, saya selalu datang ke TPS”. Ungkapnya sambil tertawa kecil. *“poko ke neke disuruh nyoblos ya saya pasti nyoblos”*, tambahnya.

Mak Surati enggan menyebutkan partai politik pilihannya atau siapa Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih di pemilu 2019 kemarin. Baginya itu rahasia, ia benar benar menerapkan asas pemilu.

Meski tidak pernah mempunyai pengalaman apapun sebagai penyelenggara, menjadi saksi partai politik atau masuk dalam kepengurusan parpol. Tidak menutup kesempatan Mak Surati tidak terlibat pada posisi lain dalam suksesi pemilu. Ia menuturkan, pernah menjadi tim sukses pemenangan salah satu calon Anggota Legislatif pada pemilu tahun 2014.

Mak Surati bersedia menjadi tim sukses karena tahu latar belakang sang calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain tinggal dalam satu kecamatan yang sama, Surati juga mengenal baik keluarganya. Apalagi caleg yang ia dukung adalah representasi perempuan. Saya tergelitik untuk mendengar lebih jauh cerita Mak Surati. Saya penasaran, metode kampanye apa yang ia gunakan untuk

mengafirmasi calon pendukungnya. Tentu dengan latar belakangnya sebagai perempuan penjual jamu keliling.

Dengan wajah tenang dan bahasa yang santun, Surati mulai bercerita. Pertama yang ia lakukan adalah melakukan pendataan dengan meminta foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada calon pendukungnya. Aktivitas itu dilakukan pada saat dia berjualan. Surati membahasakan sambil menyelam minum air, berjualan nyambi sebagai tim sukses. Sekali mengayuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Peribahasa itu yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang tengah dilakoni oleh Mak Surati waktu itu.

Dia mengungkapkan, metode ini dirasa sangat efektif. Dia Tidak perlu berkoar-koar, apalagi berdiri dipanggung dan berkampanye di depan banyak massa. Tidak pula repot-repot menyampaikan visi misi serta janji-janji muluk pada khalayak ramai. Dia menyadari, itu semua jelas diluar kapasitasnya.

Namun, bertatap muka langsung dengan pelanggannya dan memperkenalkan figur caleg yang didukungnya, Surati merasa bukanlah sebuah pekerjaan yang susah, potensi itu dimiliki Surati. Dia cukup mengenal dan sangat memahami karakter masing-masing pelanggannya. Apalagi Mak Surati menjanjikan akan memberikan uang jelang hari pencoblosan.

Selain meminta foto kopi KTP, Surati juga memberikan kartu nama kepada pelanggannya. Semakin tidak sabar saya mengorek lebih lanjut keterangan yang dibeberkan Surati. Tak segan-segan, dia mencontohkan cara mengkampanyekan calegnya.

"buk.... nyuwun tulung nggih.... mangke caleg niki dipilih, dicoblos...."
(buk... minta tolong ya... nanti caleg ini dipilih, dicoblos), tuturnya mengingat-mengingat pengalaman.



Sesekali dia tertawa terkekeh diantara ceritanya. Dari aksinya melakukan pendataan, ia mendapatkan foto kopi KTP cukup banyak.

Pengakuan Surati menguak sisi lain. Menurutnya, menjadi tim sukses tidak membuatnya berbangga diri. Dibalik aksinya, dia mengaku merasa ketakutan. Ada kegelisahan dan beban yang dirasakan. Bukan takut karena aksinya tersebut mencoreng kualitas demokrasi, mencederai proses pemilu atau karena aksinya akan berdampak pada tindak pidana. Surati tidak pernah berfikir itu. Terlintas pun tidak!

Alasannya sangat sederhana, dia hanya takut caleg yang didukungnya tidak lolos dalam kontestasi. Dia merasa kasihan uang yang sudah dikeluarkan oleh caleg habis sia-sia. Bukan tanpa alasan Surati merasakan situasi hati yang demikian. Dia mendapati, satu orang calon pemilih menerima uang dari beberapa caleg. Termasuk pelanggan jamu yang sudah pernah didata olehnya. Kondisi yang seperti ini mengurungkan semangat Mak Surati mengkampanyekan calegnya.

"Iha ternyata kathah tiang sing kulo data niku nggih didata kaleh caleg lintune" (ternyata banyak yang saya data, juga didata oleh caleg lain) ungkap Mak Surati sendu, sembari mengingat pengalamannya.

Mak Surati galau, tidak percaya diri menjadi tim sukses. Dia tidak yakin orang-orang yang didatanya akan memilih dan mencoblos caleg yang didukungnya, rasa kasihan membelenggu nalurinya. Menjadi tim sukses tidak hanya dijadikan sebagai penggugur tugas, ada sisi kemanusiaan yang ia tonjolkan. Meski demikian, menjelang hari pencoblosan, dia tetap membagikan uang kepada orang-orang yang pernah didatanya.

Ironisnya, sang caleg yang didukungnya memberikan uang tambahan untuk disebarikan kepada calon pemilih. Surati masih ingat

betul, uang tambahan yang dia terima sebesar Rp. 3.000.000. Alih-alih senang atau menerima dengan suka cita, Mak Surati justru mengembalikan uang tersebut. Dia sudah menyerah, bukan dia tidak mampu membagikan. Dia rela dicap sebagai tim sukses yang gagal, rasa welas asih mengalahkan sifat manusiawinya.

Sayapun lantas menggodanya, kenapa uang 3 juta itu tidak diambil untuk kepentingan pribadinya saja? dengan cepat dia menjawab tidak.

“Mboten buk....kulo saestu mesakeke” (tidak buk... saya sungguh merasa kasihan) jawab Mak Surati.

Saat saya bertanya tentang pandangannya tentang praktik politik uang dalam pemilu, dia beranggapan bahwa praktik tersebut dia anggap lumrah karna memang antusiasme masyarakat datang ke TPS salah satu semangatnya karna ada amunisi (uang).

Sekelumit cerita dari kisah Mak Surati, penjual jamu keliling rentan dimanfaatkan untuk kepentingan persebaran politik uang oleh oknum peserta pemilu. Mereka membaca potensi besar, bahwa politik uang mampu dimainkan oleh penjual jamu keliling dengan cara yang cantik dan tidak terendus oleh penyelenggara pemilu.

YANG DIINGAT TAPI DILUPAKAN PEREMPUAN PESISIR

Devi Aulia Rohim

Indonesia kaya akan potensi kelautan dan perikanan. Indonesia telah ditetapkan sebagai negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*). Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau, bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan, hal ini dikonfirmasi dari data KKP, luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km² sedangkan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km².¹

Kabupaten Jember juga kaya akan potensi kelautan dan perikanan. Disisi selatan dari Kabupaten Jember dikelilingi oleh laut. Kabupaten Jember memiliki 82 pulau, dan pulau yang paling besar adalah Pulau Nusa Barong. Salah satu pulau yang menjadi tujuan untuk mencari nafkah nelayan.

Pantai yang banyak terdapat kampung nelayan berada di pantai Puger dan Payangan. Pantai Puger terdapat tempat pelelangan ikan (TPI) yang sering dikunjungi orang, bahkan banyak pembeli dari luar kota. Dan pantai payangan menghasilkan banyak ikan juga, tetapi tidak terdapat Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sehingga hasil laut dari nelayan banyak yang diolah terlebih dahulu (*baca:pindang*) terus dikirim

¹ <http://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi-kelautan-dan-perikanan>

atau dijual ke luar daerah atau langsung dibeli oleh konsumen. Berbeda dengan pantai Puger, akan banyak pedagang besar yang datang untuk membeli ikan ditengkulak ikan.

Tengkulak ikan didaerah puger lebih familiar disebut dengan pengambek. Pengambek ini yang membantu nelayan untuk modal sehari-hari nelayan. Sepulang nelayan dari laut maka ikan akan diantar ke pengambek, lalu pengambek akan menjual ikan yang didapat dari para nelayan ke pedagang besar yang langsung datang ke Puger. Pengambek akan membeli ikan dengan harga yang ditentukan sendiri oleh pengambek dan praktek tersebut sudah berlangsung lama (bertahun–tahun).

Ada hubungan simbiosis mutualisme antara nelayan dan pengambek, jadi tidak ada perjanjian tertulis bahwa nelayan ini sudah dipinjami modal oleh pengambek dan nantinya ikan akan dijual ke pengambek ini. Bahkan nelayan mempercayakan penuh ke pengambek untuk timbangan hasil tangkapan ikannya. Setelah nelayan mendapatkan ikan langsung dibawa ke pengambek dan langsung pulang, selanjutnya orang suruhan pengambek akan ke rumah nelayan mengantar catatan ikannya dapat berapa dan harga berapa beserta uangnya. Ini membuktikan bahwasannya ada ikatan yang saling menguntungkan.

Gender dan Perempuan Pesisir

Ketika berbicara tentang nelayan, sebenarnya tidaklah mudah mendefinisikan nelayan dengan berbagai keterbatasannya. Yaitu apakah berdasarkan pekerjaan, tempat tinggal, maupun status pekerjaan. Nelayan dapat didefinisikan sebagai orang atau komunitas orang yang



secara keseluruhan atau sebahagian dari hidupnya tergantung dari kegiatan menangkap ikan.²

Berdasarkan teori diatas, yang dikatakan nelayan tidak hanya untuk orang yang secara aktif menangkap ikan, melainkan orang yang hidup dari kegiatan mendapat ikan termasuk nelayan. Jadi tidak hanya orang laki-laki yang terjun ke laut yang dinamakan nelayan, tetapi perempuan dikeluarganya juga termasuk nelayan.

Perempuan pesisir yang kebanyakan sebagai istri dan anak nelayan mempunyai peran ganda secara aktif dalam kehidupan rumah tangganya, sangat memberikan sumbangsih melalui kerja-kerja produktif untuk menopang perekonomian keluarga, ranah domestik bahkan pada keorganisasian masyarakat semacam pengajian, arisan-arisan, sholawatan, PKK, POSYANDU banyak didominasi oleh perempuan.

Namun dalam hal pengambilan keputusan oleh kaum perempuan masih belum bisa di perhitungkan sejajar jika dibandingkan dengan kaum laki-laki, kaum laki-laki masih mendominasi dalam keputusan keluarga, dalam hal pembangunan, politik dan kebijakan.

Peran perempuan yang notabennya sebagai istri nelayan Kecamatan Puger dan Ambulu sangat membantu perekonomian keluarga. Sebagian besar perempuan yang ada dipesisir pantai Payangan Ambulu, mereka bekerja pada proses pemindangan ikan. Selain itu kebanyakan dipesisir pantai Puger meraka banyak yang membuka toko, menjual es, jualan dipasar bahkan sebagai buruh, disamping itu di sela-sela waktunya mereka harus mengurus anak, mencuci, menyiapkan bekal suami jika berangkat melaut.

² Suadi.J Widodo . *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta,. Gadjah Mada University Press, 2006, Hlm.29

Peran ganda itu dilakukan secara turun temurun oleh perempuan, apakah itu memang faktor budaya atau memang kebijakan politik yang tidak pro terhadap peran perempuan yang seharusnya peran itu sejajar dalam kehidupan sehari-hari atau ruang perempuan dalam pengambilan keputusan.

Melihat perempuan pesisir yang mempunyai peran ganda, seharusnya mereka bisa menggunakan suara hak pilihnya untuk menentukan pilihan pemimpin yang bisa memperjuangkan kepentingan perempuan sehingga bisa menekan ketimpangan gender.

Keterkaitan peran perempuan dalam partisipasi politik memang sebagai penentu terjadinya perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil pada ruang dan lembaga publik. Sehingga keputusan itu membuahkan hasil pada titik keseimbangannya.

Pentingnya perempuan berpartisipasi aktif dalam politik entah sebagai pelaku, penyelenggara ataupun sebagai masyarakat aktif dalam penentuan pilihan politik itu sangat memberikan sumbangsih besar jika memang ruang perempuan itu tersedia lebih lebar. Ruang itu memang seperti ditutup oleh stigma-stigma bahwa peran perempuan itu hanyalah sebagai pilihan alternatif bukan sebagai hak yang harus dibagi sebanding, maka keputusan itu tidak akan pernah terwujud dengan semua aspek kebutuhan yang bisa mengakomodir hak perempuan.

Keputusan perempuan secara informal memang banyak memberikan sumbangsih terhadap bertahannya ekonomi keluarga, dalam kehidupan seputar rumah tangganya, bermasyarakat, itu semua atas refleksi dari keputusan perempuan yang sekaligus menyadarkan status ibu rumah tangga, pedagang, bahkan sebagai buruh.



Pengambilan keputusan diruang publik atau formal, sering kurang diperhatikan oleh berbagai pihak di level organisasi, keluarga, bahkan struktural pemerintahan, sehingga banyak pengambil keputusan yang terbukti berkualitas yang lahir dari seorang perempuan itu tidak terakomodir dengan baik.

Nelayan Perempuan & Pemilu

Pemilu dengan keramaian di dunia maya dan nyata sangat familiar bagi sebagian masyarakat, anak-anak dibawah umur yang belum masuk kategori pemilih pun ada yang ikut meramaikan pemilu di dunia maya mereka. Bahkan ada yang tidak sadar bahwa mereka sudah terjebak diberita *hoax* yang menyesatkan.

Lain halnya dengan masyarakat pinggiran yang jauh dari hiruk pikuk dunia politik, mereka yang berada diluar arus demokrasi electoral sangat jauh dari jangkauan pengetahuan tentang pemilu. Yang mereka tahu apa yang harus segera mereka kerjakan untuk mengais rejeki, sesuatu yang mereka cari untuk keberlanjutan hidup mereka, sesuatu yang ada didepan mata, dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka dengan sebaik-baiknya, tanpa mengetahui proses tahapan Pemilu yang panjang apalagi mengetahui sub-tahapan-tahapan pemilu. Bagi mereka pemilu itu cukup satu hari ketika harus menyuarakan suara mereka lewat selembar kertas suara, ketika harus berbondong-bondong datang ke TPS dan memilih orang yang mereka kenal, jika ada yang tidak mereka kenal maka mereka akan memilih siapapun sesuai mata memandang urutan nama di kertas suara didalam TPS, jika mereka bekerja maka mereka akan meliburkan pekerjaan mereka.

Sama dengan pengakuan seorang nelayan perempuan di kawasan pemukiman nelayan, yang biasa dipanggil dengan Ibu Nur

Hayati, pengakuan yang sangat mengagetkan. Beliau menyampaikan *"Nek pas pemilu yo berjalan koyok biasane mbak, tetep golek awak engko nek teko njojob. Malah kadang yo prei gak budal golek awak nek pas jobjohan. Gak ngreken mbak proses sak durung durunge pokoke njojob. Lha wong aku mangan yo gak dikei wong-wong iku, kebanyakan neng kene ngono mbak"*, artinya kalau waktunya pemilu, semua berjalan seperti biasanya mbak, tetap melaut menangkap ikan, nanti pulangnye baru nyoblos ke TPS. Terkadang libur gak berangkat cari ikan kalau pas waktunya coblosan (hari pemungutan suara). Tidak mau tahu proses sebelumnya yang penting pada waktunya ikut memilih dengan menyoblos. Saya makanpun juga tidak dikasih mereka, kebanyakan orang sini gitu mbak.

Pengakuan ibu Nur Hayati diatas menggambarkan sebagian besar nelayan di pesisir, ini jauh dengan mereka yang berada pada arus electoral, ini yang membedakan mereka. Pembahasan, obrolan dan pengamatan tentang pemilu itu sangat minim sekali dilakukan dikalangan perempuan-perempuan nelayan diwilayah pesisir, walaupun peran ganda juga melekat pada nelayan perempuan diwilayah pesisir.

Pemilu bagaikan sesuatu yang dilupakan oleh perempuan pesisir yang selalu sibuk dengan aktifitasnya sebagai pemegang peran ganda, yang berperan terdepan urusan domestik dan selanjutnya berperan urusan melaut yang ada didarat. Mereka melupakan apa saja yang harusnya mereka ketahui sebelum menyalurkan suaranya di TPS, mereka melupakan apa saja tahapan-tahapan menuju pemilihan suara. Tetapi pemilu ini selalu diingat kapan hari pemungutan suara tiba, hari yang selalu ditunggu untuk meliburkan diri dari aktifitas untuk datang di TPS, hari yang akan menentukan siapa yang akan memimpinya.



Pemimpin yang diharapkan perempuan nelayan adalah pemimpin yang amanah, pemimpin yang visioner, pemimpin yang tidak hanya memberi janji-janji. Akan tetapi ketika menuju harapan tersebut perempuan nelayan tidak melakukan sesuatu hal yang bisa mewujudkannya, mereka masih memilih atau menyalurkan suara-nya dengan asal-asal tanpa ada usaha mencari informasi calon-calon yang ada, mencari tahu profil calonnya sehingga tahu persis siapa yang akan dipilih.

Ketika ada calon yang kenal dan baik, maka calon tersebut akan dipilih, tetapi jika tidak ada yang dikenal, perempuan nelayan tersebut akan memilih siapa saja. Dan ada sesuatu yang berbeda yang mereka pilih, jika tidak ada yang dikenal, mereka akan memilih siapa saja hanya sebatas membaca nama disurat suara walaupun sebenarnya orang yang dipilih adalah orang yang tidak layak sekalipun.

Nelayan perempuan masih apatis terhadap proses pemilu yang berjalan, jika mereka mau peduli dan antusias mereka bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan. Mereka belum menyadari bahwa suara mereka bisa menentukan pemimpin yang lebih baik. Suara mereka bisa mengantarkan kepada kebijakan yang bisa memperhatikan dan memperjuangkan nelayan dan khususnya perempuan.

Harapan Kesejahteraan keluarga itu tidak semata-mata dari jerih payah para nelayan, pulang dari melaut dapat hasil melimpah atau tidak, kesejahteraan nelayan itu juga di tentukan oleh politik yang akan melahirkan kebijakan yang bisa mengakomodir terhadap ketimpangan sosial di masyarakat nelayan

Sebenarnya ibu Nur Hayati nelayan perempuan ini pernah ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dengan menjadi



bagian dari tim kemenangan salah satu calon anggota legislatif, mencoba meyakinkan perempuan-perempuan pesisir untuk memilih ke calon yang dibawahnya, akan tetapi setelah mendapat-kan dukungan suara malah tidak pernah ingat akan janji-janji yang pernah disampaikan. Kekecewaan ini akhirnya membuat jarak semakin jauh antara ibu Nur Hayati dengan derasny arus politik. Perempuan masih mengedepankan hati dan perasaan ketika mencoba masuk diputaran arus, sehingga sebelum sampai masuk ke putaran arus sudah akan terlempar duluan. Sampai pada titik tertentu, kekecewaan ini sangat berefek dipemilihan-pemilihan berikutnya, bahkan mereka berfikir *“kok aku kate ribet ngurusi kon, kon ndak kenal aku, aku kok kon ngurusi kon. Kon durung tentu kenal neng aku”* (kok aku suruh ribet ngurusi kamu mau milih yang mana, kamu saja tidak kenal aku, aku kok kamu suruh ngurusi kamu. Kamu juga belum tentu kenal aku) akhirnya jika tidak ada yang kenal, siapa-siapa saja akan dipilih.

Jika tidak ada yang kenal, maka siapa saja akan dipilih, dan tanpa ada paksaan apalagi imbalan lembaran rupiah. Dan kebetulan pengakuan bu Nur Hayati selama ini tidak pernah mendapatkan lembaran rupiah atau amplop untuk menggantikan suara yang diberikan. Padahal tetangganya ada yang mendapatkan lima puluh ribu, ataupun seratus ribu, tetapi keluarga bu Nur Hayati tidak pernah menerima. Ibu Nur Hayati ini pernah menyampaikan ke tetangga-tetangganya yang sudah menerima politik uang ini, “kok mau menerima uang, ini demi pemimpin yang akan dipilih, kalau sudah terima uang maka harus memilih, sudah bilang iya yo harus iya”. Tetapi ibu Nur Hayati berpendapat kalau budaya ngasih uang ini diteruskan nanti jelek hasilnya, ujung-ujungnya yang jadi akan menggunakan ke-

dudukannya untuk korupsi sebagai balas dendam mengembalikan modal uang yang diberikan ke pemilihnya.

Beda halnya dengan perempuan pesisir disekitar pantai Payangan, mereka menyampaikan bahwasannya mereka tidak pernah mendapatkan uang untuk dipengaruhi memilih seseorang selama ada pemilihan atau pemilu .

“Mungkin sudah dikasih sama calonnya mbak, tapi tidak pernah nyampek ke kami. Tidak tahu diberikan ke siapa gak nyampai ke kami”. Jelasnya .

Tetapi ketika ditanya bagaimana kalau ada yang ngasih uang untuk memilih seorang calon, tidak dijawab iya atau tidak tetapi malu-malu. Seperti halnya gadis yang akan ditanya menikah, mereka malu-malu. Artinya ini masih berpotensi adanya *money politik*.

Menolak politik uang perlu disuarakan, karena ini sudah mengakar, memberantasnyapun perlu saling menguatkan, pendidikan politik dari hilir sangat perlu dilakukan, dan perlu semua pihak bergandeng tangan. Membutuhkan kerja keras untuk menolaknya, membutuhkan banyak elemen bersama-sama menyuarakan politik uang ini dan mewujudkan pemilu atau pemilihan yang berintegritas, berkualitas adalah tanggung jawab bersama. Pemilih mempunyai andil yang besar juga untuk menolak politik uang serta perempuan harus berani menolak politik uang. Maka sasaran yang sangat penting disentuh terlebih dahulu untuk pendidikan politik adalah perempuan. Pendekatan kepada perempuan disemua lapisan akan lebih mudah dan mengena. Karena perempuan mempunyai semua simpul disemua lapisan.

Pekerjaan melaut merupakan pekerjaan warisan dari nenek moyang yang turun menurun, mereka melakukan pekerjaan ini



dengan sepenuh hati tanpa meninggalkan suka cita pesta demokrasi. Mereka mengetahui pesta demokrasi yang berjalan, walau bagi mereka pesta demokrasi ini hanya satu hari. Tetapi mereka tidak pernah mengetahui siapa penyelenggara pemilu ini, mereka tidak tahu siapa KPU, siapa Bawaslu apalagi PPK dan Panwaslu. KKPS yang ada di TPSpun mereka tidak tahu, yang mereka tahu adalah ada petugas dari desa untuk penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Mereka pernah mendengar KPU dan Bawaslu sebatas mendengar berita ditelevisi.

Anak dari ibu Nur Hayati ini pernah menjadi KPPS yang bertugas di TPS, tetapi perempuan ini juga tidak faham dan tahu akan penyelenggara pemilu . Perempuan ini hanya tahu anaknya menjadi petugas khusus dari desa untuk acara pemilihan satu hari.

Hal diatas yang disampaikan oleh ibu Nur Hayati senada dengan yang disampaikan oleh ibu Ida nelayan perempuan yang dari pantai Puger juga, perempuan ini tidak pernah tahu proses tahapan pemilu , yang tahu adalah hari pemungutan suara itu saja. Tidak pernah tahu adanya kampanye, yang tahu dia akan memilih orang yang dia kenal. Jika tidak ada yang dikenal maka dia akan memilih asal saja. Dan tidak sepakat dengan adanya politik uang, tapi kalau diberi sesuatu yang bukan uang maka dia akan menerima. Sebatas menerima karena pemberian saja. Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa nelayan perempuan masih jauh dari arus politik. Mereka tidak pernah tahu juga apa itu pemilu , siapa penyelenggara Pemilu apapun itu tentang pemilu. Mereka belum memahami bahwa ada keterikatan antara suara yang diberikan pada waktu pemilu dengan kebijakan. Kesejahteraan nelayan itu juga ditentukan oleh politik yang akan melahirkan kebijakan yang bisa

mengakomodir terhadap ketimpangan sosial dimasyarakat nelayan dan perempuan.

Perempuan dewasa ini sudah mengalami berbagai macam perkembangan seiring berkembangnya teknologi yang serba digital sehingga banyak kaum perempuan bisa mudah mengakses pengetahuan melalui Hp (*Handphone*) yang mereka miliki dengan mudah dan murah bisa diakses kapan saja mereka mau. Termasuk dalam mengakses berbagai macam informasi mulai dari pekerjaan, hiburan, bisnis politik dan budaya. Kaum perempuan dari lintas usia sudah banyak update informasi yang kian cepat berkembang melalui HP (*Handphone*) genggamnya. Perkembangan ini harusnya diiringi dengan mengikuti perkembangan untuk mengetahui informasi politik sedalam-dalamnya baik tentang pemilu atau pemilihan sehingga tidak gampang terserang informasi *hoax* dan juga politisasi sara.

Walaupun nelayan perempuan ini jauh dari pembahasan politik, tetapi perempuan tidak suka jika permasalahan pemilihan disangkut pautkan dengan suku, agama, dan ras. Seperti halnya yang disampaikan bu Nur Hayati dari Puger, bahwasannya kalau orangnya baik, dan bagus tidak usah menunjuk itu agamanya apa yang penting orangnya mampu. Tetapi kenyataannya dimasyarakat masih banyak yang terpengaruh oleh isu politisasi sara, hanya sebagian masyarakat saja bisa menyaring informasi.

Gaya perempuan sekarang entah perempuan pinggiran apalagi perempuan kota lebih akrab dengan yang namanya *android* yang sudah menjadi pelengkap kehidupan sehari-harinya sebagai alat komunikasi secara tidak langsung, sehingga informasi dimanapun berada bisa cepat diketahui. Termasuk perkembangan politik ditanah air kerap mewarnai semua beranda media sosial yang kita miliki,



sehingga dengan informasi itu masyarakat bisa menilai dengan apa yang sudah disajikan oleh media massa disetiap harinya.

Dari perkembangan teknologi sebagai pemersingkat waktu banyak peluang perempuan mendapatkan pengalaman baru dan ilmu baru mulai berjualan online sampai dengan informasi lowongan pekerjaan dan perkembangan politik dinegeri ini, dari pengetahuan informasi itu maka tidak sedikit kaum perempuan sigap dengan peluang itu dan lebih dekat dengan informasi. Baik yang dipinggiran maupun ditengah arus akan lebih mudah mendapatkan informasi.

Pentingnya perempuan berpartisipasi aktif dalam politik entah sebagai pelaku, penyelenggara ataupun sebagai masyarat aktif dalam penentuan pilihan politik itu sangat memberikan sumbangsih besar jika memang ruang perempuan itu tersedia lebih lebar. Harapan besar lahir dari buku yang ditulis ini, berharap semua perempuan disemua lapisan dan khususnya yang ada dalam sepenggal cerita dalam penulisan “Perempuan Yang” bisa memberikan perubahan disekitar lingkungannya untuk memberikan ruang perempuan bisa memberikan sumbangsih besar pada kebijakan kebijakan publik.

PEMILU KITA BELUM BICARA BANYAK TENTANG PEREMPUAN DISABILITAS

Royin Fauziana

Tahun 2019 adalah tahun yang penuh dengan hiruk pikuk agenda politik. Pada tahun ini untuk pertama kalinya diselenggarakan pemilihan umum serentak se-Indonesia. Namun pengertian serentak disini bukan hanya persoalan waktu pelaksanaan, melainkan juga jenis pemilihan yang dilaksanakan juga lebih banyak. Jika pada tahun 2014 pemilihan umum dibagi menjadi dua tahap, yaitu: pemilihan legislatif di tahap pertama dan pilihan eksekutif di tahap kedua, maka di tahun 2019 kedua tahap tersebut dijadikan dalam satu pelaksanaan.

Pelaksanaan pemilihan umum di tahun 2019 yang dilakukan secara serentak, membuat suhu perpolitikan memanaskan sejak setahun sebelumnya. Berbagai macam isu sensitif terus muncul di permukaan. Bahkan perkataan yang wajar pun juga digunakan sebagai isu yang sangat sensitif. salah satu perkataan yang digunakan sebagai isu dalam masa kampanye adalah ucapan Kyai Ma'ruf Amin yang sempat menyebut kata budeg dan buta dalam sebuah acara di Jakarta. Dia bahkan harus mengklarifikasi pernyataan tersebut ke hadapan publik melalui berbagai pemberitaan nasional. Isu rasial, agama, konspirasi kebohongan bahkan isu terkait disabilitas menjadi komoditas kampanye. Tidak hanya itu saja, sekumpulan wanita yang

menyatakan dirinya sebagai perkumpulan *emak-emak* juga menjadi mesin kampanye salah satu calon presiden. Namun, sangat jarang kita jumpai keterlibatan perempuan disabilitas dalam hiruk-pikuk politik tersebut.

Meskipun hiruk pikuk pemilihan umum 2019 seringkali melibatkan perempuan, namun kehadiran mereka seakan hanya pelengkap saja. Lebih jauh tentang perempuan disabilitas, sangat sulit dijumpai keterlibatannya sepanjang berlangsungnya pemilihan umum tahun 2019. Padahal perempuan dengan disabilitas bukan-lah entitas yang abstrak, melainkan nyata dan benar adanya.

Perempuan dengan disabilitas sangat sulit ditemui keterlibatannya dalam agenda-agenda politik, meskipun secara umum perempuan telah memiliki berbagai kemudahan dan aksesibilitas terhadap proses proses politik, namun secara spesifik perempuan penyandang disabilitas tidak memiliki akses penuh tersebut. Sangat jarang pula ditemui tulisan ataupun berita mengenai pendapat perempuan dengan disabilitas terhadap pemilihan umum. Oleh sebab itu, tulisan ini akan berangkat dari pertanyaan besar, "bagaimanakah perempuan disabilitas memandang penyelenggaraan pemilihan umum?". Tulisan ini akan berupaya menggali lebih jauh tentang pemikiran perempuan disabilitas terhadap berlangsungnya proses demokrasi di Indonesia dengan fokus di Kabupaten Jember.

Gender dan Disabilitas

Siapakah perempuan itu?. Perempuan secara jenis kelamin diartikan sebagai orang yang memiliki alat-alat reproduksi seperti: rahim, sel telur, vagina, saluran kelahiran dan alat untuk menyusui. Itulah arti perempuan yang sebenarnya. perbedaan laki-laki dan



perempuan hanyalah pada alat-alat biologis yang tidak dapat dipertukarkan. Sedangkan sifat yang melekat pada keduanya yang dikonstruksi baik secara sosial maupun kultural disebut sebagai gender.³

Sejak zaman dahulu perempuan selalu diposisikan sebagai makhluk yang lemah. Konstruksi gender terhadap perempuan ini terjadi secara terus menerus dan melalui proses yang panjang.⁴ Bahkan dalam kisah-kisah kerajaan perempuan-perempuan desa dijadikan sebagai gundik raja. Selain itu, budaya Jawa juga melanggengkan pembatasan terhadap perempuan sebagaimana tergambar dalam idiom: *macak, masak dan manak*. Wanita dikonstruksikan sebagai orang yang suka bersolek, pandai mengolah masakan dan hanya berperan dalam proses reproduksi.

Dalam sejarah perkembangan bangsa kita, sangat jarang dijumpai tokoh tokoh wanita yang menempati posisi strategis. Kalaupun ada tokoh wanita di tempat-tempat strategis, itupun jumlahnya sangat sedikit. Beberapa wanita yang menempati posisi strategis diantaranya: Ratu Sima, Tribuana Tungga Dewi, Ratu Kalinyamat, RA Kartini dan Cut Nyak Dien. Lebih dari itu, wanita Indonesia di masa penjajahan menempati posisi penindasan yang rumit.

Sebagai perempuan yang hidup di negara dunia ketiga, perempuan Indonesia memiliki kesadaran yang minim. Mereka hanya berupaya untuk bekerja dengan hasil yang kurang maksimal. Mereka juga tidak memiliki kepedulian bahwa mereka hidup di

³ Mansour Fakih. 2008, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet Ke-13, Yogyakarta: InsistPress, hal 8.

⁴ Ibid, hal 7.

bawah garis kemiskinan dan dengan pilihan hidup yang sedikit. Mereka tidak memiliki pilihan yang bebas dalam berbagai hal. Mereka taat dan patuh begitu saja kepada ayah mereka serta kepada suaminya.⁵

Modernisasi yang telah terjadi di berbagai sisi kehidupan tidak dapat membuat posisi perempuan membaik secara seutuhnya. Perempuan baik secara umum maupun pada perempuan disabilitas masih mengalami subordinasi.⁶ Subordinasi ini juga meliputi pilihan politik serta keterlibatan perempuan dalam proses pemilihan umum. Perempuan dengan disabilitas memiliki ruang gerak yang lebih sempit dari pada perempuan pada umumnya. Oleh sebab itu, keterlibatannya dalam berbagai aktivitas publik dan politik menjadi semakin sulit. Meskipun demikian, perlu diakui bahwa tulisan maupun riset tentang perempuan dengan disabilitas juga adalah hal yang sulit ditemui.

Kata disabilitas akhir-akhir ini semakin sering muncul dalam perbincangan. kata ini semakin populer terutama setelah disahkannya undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dalam undang-undang tentang penyandang disabilitas pada pasal 1, kata disabilitas diartikan sebagai berikut:

"Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

⁵ Julia Cleves Mosse. 2007, *Gender & Pembangunan*. Cet Ke-v, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hal 220.

⁶ Op.Cit, hal 154.



kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."⁷

Definisi terhadap kata disabilitas sendiri condong pada menilai bahwa disabilitas adalah hambatan yang nyata bagi warga negara. Orang dengan disabilitas secara yuridis diposisikan sebagai orang-orang lemah dengan berbagai keterbatasan. Dalam definisi tersebut, sama sekali tidak ditunjukkan sisi positif dari penyandang disabilitas. Padahal sebenarnya masih ada istilah lain untuk menyebut penyandang disabilitas yaitu dengan sebutan difabel.

Kata difabel sering diartikan berasal dari kata *different ability*. Padahal menurut Maftuhin, kata difabel berasal dari bahasa Inggris yaitu "*differently abbled*" yang artinya orang yang memiliki kemampuan berbeda. Kata ini dianggap lebih mampu untuk merepresentasikan beragam jenis disabilitas.⁸ Selain itu, menurut Maftuhin, difabel muncul karena ketidakmampuan berbagai pihak untuk mendefinisikan keragaman disabilitas.⁹

Selain kata disabilitas dan difabel, masyarakat Indonesia pernah memiliki sebutan lain bagi penyandang disabilitas. Diantara istilah-istilah tersebut adalah: penyandang cacat, anak dengan kebutuhan khusus, penderita cacat, tuna, bercacat dan penderita kelainan.¹⁰ Masing-masing dari rentetan istilah tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas selama ini dianggap sebagai orang-orang

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hal 2.

⁸ Arif Maftuhin. 2019, *Masjid Ramah Difabel: Dari Fikih ke Praktik Aksesibilitas*. Yogyakarta: LKIS, hal 8.

⁹ Ibid, hal 9.

¹⁰ Ibid, hal 2-3.

dengan ketidakmampuan, berkelainan serta memiliki kebutuhan khusus yang sulit untuk dipenuhi.

Kelompok masyarakat disabilitas adalah kelompok rentan di setiap lapisan sosial. Baik laki-laki maupun perempuan disabilitas adalah orang-orang dengan keterbatasan terhadap berbagai akses publik. Keterbatasan tersebut tidak hanya ada akses transportasi yang tidak ramah disabilitas, melainkan fasilitas umum, alat telekomunikasi, sosialisasi masyarakat yang belum ramah serta berbagai aktivitas perpolitikan yang jauh dari kata ramah disabilitas.

Jaminan Konstitusi Terhadap Perempuan Disabilitas

Keterwakilan perempuan dalam agenda politik sebenarnya telah dijamin secara konstitusional. Bahkan setiap partai politik diwajibkan memenuhi kriteria keterwakilan perempuan sebesar 30% di tingkat pusat. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 173 ayat (2) huruf e.¹¹ Meskipun angka 30% masih dapat diperdebatkan, namun setidaknya dalam hal ini perempuan secara umum telah diupayakan terlibat dalam agenda politik secara aktif.

Perempuan secara umum telah diupayakan untuk hadir dalam kepengurusan partai politik. Kepemimpinan perempuan dalam partai politik pun juga dapat kita amati di beberapa partai politik misalnya: PDIP dan PSI. Di luar partai politik konstitusi juga telah mengupayakan peran aktif perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. Keterlibatan perempuan sebesar 30% juga diupayakan dalam berbagai posisi strategis, misalnya tim seleksi KPU dan Bawaslu dari pusat hingga kabupaten, PPK bahkan hingga KPPS.

¹¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal 121.



Khusus untuk di KPPS, keterwakilan kaum perempuan sangat mudah ditemukan.

Jika keterwakilan kaum perempuan secara umum telah diupayakan secara konstitusional, bagaimana dengan perempuan yang memiliki disabilitas?. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu pasal yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kata disabilitas disebut pada pasal-pasal berikut ini: pasal 5, pasal 350 (2), pasal 356(1), dan pasal 364 (1).¹² Pada pasal 5 di sebutkan ketentuan tentang penyandang disabilitas sebagai berikut:

"Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon presiden/wakil presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu." ¹³

Undang-undang pemilihan umum memang memberi peluang bagi penyandang disabilitas baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh hak politiknya. Namun, hal ini seakan setengah hati. Mengapa demikian?. Jika kaum perempuan secara umum dijamin keterwakilannya dalam berbagai aspek kegiatan politik, hal ini tidak terjadi pada penyandang disabilitas. Tidak ada peraturan yang mewajibkan partai politik untuk melibatkan penyandang disabilitas. Padahal penyandang disabilitas adalah warga negara yang seharusnya memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. Hal yang

¹² Ibid, hal 8, 217, 221 dan 225.

¹³ Ibid, hal 8.

demikian ini dapat dinyatakan sebagai tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Jika penyandang disabilitas tidak diberikan kesempatan untuk menikmati akses politik, bagaimana mereka dapat memajukan diri mereka sendiri. sementara orang-orang yang merumuskan tentang disabilitas adalah orang-orang yang tidak tahu pasti bagaimana rumitnya menjadi seorang disabilitas. Jika proses demokrasi hanya dinilai sebagai proses untung rugi pada partai politik, lalu kapanakah keadilan terhadap penyandang disabilitas dapat diupayakan?.

Pandangan Perempuan Disabilitas Terhadap Pemilu

Perempuan dengan disabilitas menempati posisi rentan dalam berbagai kondisi dan situasi. Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 di Kabupaten Jember. Dalam berbagai kesempatan tahapan pemilihan umum, perempuan dengan disabilitas memiliki peranan yang sangat pasif.

Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 terdapat 1.863.478 pemilih, dengan rincian pemilih laki laki sebanyak 919.712 dan pemilih perempuan sebanyak 943.766. Sedangkan pemilih disabilitas terdapat 3248 pemilih, dengan rincian 1556 pemilih laki-laki dan 1692 pemilih perempuan. Namun, data pemilih disabilitas ini saya nilai masih jauh dari akurat. Salah satu penyebabnya adalah di beberapa kecamatan tertera angka disabilitas 0 (nol). Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Sukorambi dan Kecamatan Sumberbaru. Sedangkan di Kecamatan Pakusari data pemilih disabilitas perempuan tercatat 0 (nol)¹⁴.

¹⁴ KPU Kabupaten Jember, *Data Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 Kabupaten Jember*.



Angka pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Jember mencapai 0,15 % dari total jumlah pemilih. Namun, dengan jumlah pemilih disabilitas 3248 pemilih didominasi oleh pemilih perempuan, padahal data tersebut tidak benar-benar valid. Tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas juga sangat kecil. Dari data yang dirilis oleh KPU Kabupaten Jember, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas laki-laki hanya mencapai 11% dan tingkat partisipasi penyandang disabilitas perempuan hanya 10%. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas perempuan lebih rendah daripada pemilih disabilitas laki-laki.

Angka partisipasi pemilih disabilitas perempuan di Kabupaten Jember yang rendah sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Apalagi jika ditelusuri sejak sebelum berlangsungnya pemungutan suara. Dalam berbagai sosialisasi yang diadakan oleh KPU Kabupaten Jember, tingkat kehadiran penyandang disabilitas perempuan sangat minim. Mereka yang hadir cenderung berdiam dan jarang menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai kendala, diantara kendala tersebut adalah: kendala bahasa, pemahaman, aksesibilitas dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat.

Kendala bahasa adalah kendala utama yang menghambat penyampaian informasi berkaitan pemilihan umum. Tidak jarang diantara penyandang disabilitas baik laki-laki maupun perempuan hanya mampu menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa dan bahasa Madura. Sedangkan dari pihak yang melaksanakan sosialisasi sering menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga terjadi kekakuan diantara penyandang disabilitas dan penyelenggara sosialisasi. Keterbatasan pemahaman bahasa Indonesia terjadi karena tingkat

pendidikan penyandang disabilitas yang rendah. Bahkan, di daerah pinggiran ada yang sama sekali tidak bersekolah. Kendala ini cukup merepotkan terutama ketika pembahasan mengenai teknis pemilihan umum.

Kesulitan bahasa yang dialami oleh kedua belah pihak menyebabkan susahnyanya memahami pemilih disabilitas. Dalam sebuah sosialisasi, di Kecamatan Kencong bahkan untuk memahami seorang penyandang disabilitas perempuan harus disertai penyebutan tokoh yang harus dipilih. Padahal pihak yang mensosialisasikan tentang pemilihan umum sangat dilarang melakukan hal tersebut. Namun, demi tercapainya pemahaman bagi pemilih terpaksa harus dilakukan. Untungnya, hal tersebut dilakukan setelah berakhirnya proses sosialisasi. Pihak pemilih kesulitan merangkai bahasa untuk ditanyakan dalam sosialisasi.

Hambatan aksesibilitas tidak hanya berlaku untuk fasilitas umum saja, melainkan juga berlaku untuk kesulitan gerak yang dialami oleh penyandang disabilitas itu sendiri. Sebenarnya untuk lokasi pemungutan suara telah aksesibel, namun terkadang jalan menuju tempat pemungutan suara yang masih belum ramah penyandang disabilitas. Misalnya, jalanan yang menanjak, tidak rata atau harus menyeberang jalanan yang relatif ramai. Bagi penyandang disabilitas dengan kursi roda, tentu melalui medan yang sedemikian sulit semakin menyulitkan mereka.

Bagi penyandang disabilitas dengan keterbatasan penglihatan baik laki-laki maupun perempuan memiliki pemenuhan aksesibilitas yang lebih rumit. Pada pemilihan umum tahun 2019, hanya surat suara untuk Capres-Cawapres yang timbul. Sementara untuk kertas suara yang lain tidak ada template khusus bagi penyandang disa-

bilitas dengan keterbatasan penglihatan. Meskipun pemilih dengan keterbatasan penglihatan boleh mendapatkan pendampingan, namun hal ini justru menghilangkan prinsip kerahasiaan pemilihan umum itu sendiri. Selain itu, surat suara legislatif yang tidak menyertakan gambar tokoh juga menyebabkan pemilih kesulitan mengenali calon legislator pilihannya.

Hidup sebagai penyandang disabilitas bukanlah pilihan yang mudah untuk dijalani. Mereka hidup di bawah konstruksi sosial masyarakat yang memposisikan penyandang disabilitas berbeda, semakin membuat pemilih dengan disabilitas ragu-ragu. Hal ini sebagai akibat dari berbagai pemilihan umum yang terus berlangsung namun tidak membuat nasib mereka berubah. Posisi perempuan dengan disabilitas memiliki kesulitan yang lebih tinggi. Stigma yang melekat pada perempuan misalnya saja perempuan itu lemah, perempuan itu tidak dapat berpikir jernih. Efeknya menjadi lebih besar ketika stigma itu melekat pada perempuan dengan disabilitas. Konstruksi bahwa disabilitas adalah keterbatasan dan perempuan adalah makhluk yang lemah mengakibatkan perempuan dengan disabilitas lebih sulit berpikir jernih dan bersikap serta mengambil keputusan.

Perempuan dengan disabilitas memiliki berbagai profesi, namun umumnya mereka berprofesi sebagai penjahit, usaha makanan, ibu rumah tangga dan pengangguran. Penghasilan mereka pun tidak dapat dinyatakan cukup dengan keluarga yang juga kurang terbuka. Dalam berbagai sosialisasi yang telah dilaksanakan, mereka memiliki pengetahuan yang minim tentang lembaga penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum (DKPP). Yang mereka tahu adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan tentang pejabat desa setempat.

Menurut penyandang disabilitas perempuan, pemilihan umum yang telah berjalan selama ini menyisakan banyak masalah bagi penyandang disabilitas. Apalagi partai politik hanya menggunakan penyandang disabilitas sebagai alat pencitraan semata. Penyandang disabilitas baik laki-laki maupun perempuan tidak dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan pemilihan umum. Sementara, partai politik seakan enggan mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam kegiatan politiknya. Tentu hal tersebut dapat juga dinilai wajar jika mengingat penyandang disabilitas yang minim jumlahnya. Namun, seharusnya jumlah tidak boleh menjadi alasan bagi partai politik untuk tidak melibatkan penyandang disabilitas.

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam rentetan pemilihan umum di Kabupaten Jember masih minim. Sebagai contoh, dari 5 (lima) relawan demokrasi segmen disabilitas kesemuanya adalah laki-laki, tidak ada keterwakilan perempuan di dalamnya. Sedangkan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), penyandang disabilitas yang terlibat adalah laki-laki. Penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Jember hingga saat ini masih belum ada yang mendaftar sebagai calon legislatif dan calon eksekutif.

Setelah berlangsung 4 (empat) kali pemilihan umum pasca reformasi, manfaat yang dirasakan bagi penyandang disabilitas perempuan belumlah cukup baik. Namun, pasca disahkannya undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, perbaikan di berbagai sektor kehidupan penyandang disabilitas mulai

terwujud. Berbagai layanan kesehatan, pendidikan dan layanan publik lainnya semakin aksesibel terhadap penyandang disabilitas.

Dalam berbagai kesempatan pemilihan umum, politik uang juga masih terus terjadi. Hal ini tidak hanya berlangsung di kalangan masyarakat umum namun juga dikalangan penyandang disabilitas. Mereka cenderung menerima dengan suka hati namun belum tentu memilih pemberinya. Adakalanya mereka juga menjadi pemilih cerdas yakni hanya memilih orang-orang yang memiliki gagasan maju terhadap penyandang disabilitas. Namun, angka partisipasi politik yang telah saya tampilkan sebelumnya telah memberi gambaran yang jelas dan terang tentang kondisi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas. 90% penyandang disabilitas perempuan di Kabupaten Jember tidak menggunakan hak pilihnya. Mereka cenderung apatis terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dan politik uang.



**POLITIK DAN KESEJAHTERAAN:
ANGAN SEDERHANA PEREMPUAN PENJAGA
KEAMANAN**
Afidatusholikha

Kamis pagi, minggu terakhir di bulan Januari, mendung yang menggelayut di langit Ngoro menambah suasana pagi menjadi lebih syahdu. Sesampai didepan rumah sederhana bercat hijau, saya disambut senyum manis seorang ibu muda yang sedang menggendong bayi sekira umur 3 bulanan. Sekilas terlintas pikiran ternyata jauh dari kata sangar, melihat sosok Yuli yang berprofesi sebagai *security* di Pabrik Woonam Music. Perusahaan yang memproduksi alat musik gitar tersebut berlokasi di Ngoro Mojokerto, hanya berjarak sekitar 550 meter dari rumah Yuli.

“*Ngapunten mbak, sambil momong nggih* (Maaf mbak, sambil momong ya)” Yuli membuka obrolan sambil mempersilahkan duduk.

Setelah basa-basi perkenalan, Yuli yang mempunyai nama lengkap Yuli Supraptiwi menceritakan asal mula bekerja sebagai Satpam di Woonam. Berangkat dari informasi lowongan pekerjaan yang membutuhkan satpam perempuan, dia ikut melamar dan akhirnya diterima. Tugasnya berada di Pos depan dekat gerbang PT. Woonam.

“*Alhamdulillah kalau perempuan cuma dapat shift pagi mbak, gak pakai shift malam. Tugas saya mempersilahkan kalau ada tamu, memeriksa kendaraan yang mengangkut barang masuk dan keluar. Juga cek bodi karyawan perempuan ketika sudah jam pulang.*” terang Yuli.



Saya beruntung bisa ngobrol dengan Yuli saat dia masih dalam masa cuti melahirkan, karena menurutnya pada saat jam kerja sangat ketat. Dia harus konsentrasi pada tugas dan dilarang menerima tamu yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya. Bahkan waktu istirahat hanya bisa digunakan untuk makan dan sholat, pun hanya pulang sebentar untuk menyusui anaknya dia tidak sempat. Konsekuensinya, sejak bulan pertama anaknya harus dilatih minum susu formula.

Saat disinggung apakah tugas satpam tidak berat bagi perempuan, Yuli tersenyum sambil mengatakan justru *enjoy* dan meni-mati. Toh di Perusahaan sebelumnya (PT. Villiger) dia juga ditempatkan pada bagian pemeriksaan barang yang akan diekspor ke luar negeri. Dia justru merasa bersyukur bisa bekerja di sebuah perusahaan yang telah menerapkan standar UMK dalam penggajiannya.

“Cukuplah mbak untuk kebutuhan sehari-hari, gaji Mojokerto kan empat juta seratus tujuh puluh ribuan, kebetulan suami di Pasuruan gajinya juga segituan”. imbuh Yuli. Ya, suami Yuli merupakan karyawan sebuah perusahaan di daerah Pasuruan. Yuli patut bersyukur, karena dia tidak masuk lewat *outsourcing* yang biasa suplai satpam ke beberapa CV yang ada di Ngoro. Dimana sekian persen gaji akan dipotong pihak *supplier*.

Perempuan kelahiran Mojokerto 38 tahun silam itu juga menceritakan bahwa suaminya tidak keberatan pilihannya mengambil peran di luar wilayah domestik. Apalagi selama 9 tahun pernikahan, baru pada tahun 2020 ini Yuli diberi amanah seorang puteri cantik yang sudah lama dinanti-nantikannya. Saya iseng bertanya apakah dengan hadirnya si buah hati yang tentunya membutuhkan perhatian lebih dari Yuli dan akan menambah peran



dia tidak hanya sebagai istri tapi juga seorang ibu, Yuli masih akan terus bekerja?.

“Enggih mbak, masih kok. Ini tanggal 3 (Februari) saya sudah mulai masuk lagi. Sudah habis masa cuti saya” Jawab Yuli.

Syukurlah, sekali lagi Yuli saya anggap beruntung, dia bukan bagian dari korban konflik perebutan pengaruh dan kekuasaan dalam keluarga kecilnya. Siapa yang memiliki dan menguasai sumber-sumber produksi dan distribusi merekalah yang memiliki peluang untuk memainkan peran utama di dalamnya. Yuli dan suami mampu bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan gaji yang setara. Meski tidak ada jaminan kondisi ini akan bisa bertahan selamanya. Biasanya gejala konflik mulai timbul saat tugas domestik semakin berat dengan bertambahnya anak, misalnya.

Tak Pernah Terlibat, Bukan Karena Tak Minat

Seorang perempuan setengah baya keluar dari ruang tengah, sambil membawa baki berisi segelas teh hangat. *“Monggo diunjuk”* perempuan yang ternyata Ibu kandung Yuli tersebut mempersilahkan, tepat saat saya mulai mengajak Yuli berbincang soal Pemilu. Yuli mengaku tidak terlalu paham, pemikirannya sederhana, nyoblos saat dapat pemberitahuan dari PPS setempat, prinsipnya dia tidak mau Golput.

“Kenapa mbak kok gak mau Golput?” saya bertanya sambil menyeruput teh yang dihidangkannya.

“Nggih mboten eco mbak wong diundang kengken teng TPS (Ya tidak enak mbak wong diundang disuruh datang ke TPS),” Ujar Yuli dengan logat Jawa yang kental. Saya tersenyum kembali mengingat pertama kali bertemu tadi, sungguh benar-benar jauh dari

bayangan awal, saya mengira dia perempuan sangar tinggi besar dengan cara bicara agak kasar, mengingat profesinya sebagai satpam.

Ia tidak bicara muluk tentang hak dan kewajiban masyarakat yang dilindungi Undang-undang. Ia juga kurang *ngeb* ketika saya singgung haknya dalam Pemilu maupun Pilkada dan sempat mengernyitkan dahi ketika saya sebut *one man one vote*. Yang ada dalam benaknya, menjadi warga yang baik, datang dan nyoblos ketika diundang KPU, selesai.

“Kebetulan perusahaan saya tidak pernah mempersulit ketika ada coblosan, hari itu semua pekerja diliburkan, termasuk saya”. Dia memastikan selama enam tahun bekerja di PT. Woonam, dia selalu bisa libur untuk kepentingan nyoblos di TPS dan masih dalam pengakuannya, dia tidak pernah Golput.

Dia juga menceritakan bahwa selama ini tidak pernah terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu, kecuali sebagai pemilih.

“Mungkin karena orang menganggap saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya, trus siapa sih saya cuma satpam, jadi tidak pernah tuh diminta jadi petugas coblosan” kata Yuli. Ketika saya tanya, apa tidak ada keinginan merasakan pengalaman menjadi Penyelenggara Pemilu? Yuli mengatakan bersedia, namun khawatir tidak maksimal saat bekerja. Dia merasa tidak punya kompetensi yang dibutuhkan disamping waktu yang dimiliki habis di perusahaan. Yuli setiap pagi sudah harus sampai di Woonam pada pukul 08.00 WIB dan pulang pada pukul 16.30 WIB. Bahkan seringkali dia terpaksa pulang menjelang maghrib, karena harus menunggu semua karyawan pulang.

Meski Yuli mengaku merasa tidak punya kompetensi dalam Penyelenggaraan Pemilu, saya justru menangkap kemampuan



cukup yang dibutuhkan oleh Penyelenggara Pemilu. Yuli terbiasa dengan tugas teliti, memeriksa dan memastikan semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Saya membayangkan seandainya Yuli menjadi bagian dari KPPS, dia bisa menjadi KPPS keempat yang bertugas memeriksa jari pemilih untuk memastikan belum ada tanda tinta di jarinya. Meminta pemilih menunjukkan identitas kependudukan serta form C.6 atau A.5 yang dibawa pemilih. Saya sangat meyakini Yuli bisa melakukan tugas-tugas tersebut. Sayangnya, kompetensi tersembunyi itu tidak ditangkap oleh masyarakat sekitar, sehingga warga seperti Yuli tidak diberi kesempatan untuk ikut ambil peran sebagai Penyelenggara Pemilu.

Stigma yang melekat pada masyarakat tentang perempuan, bahwa perempuan mempunyai keterbatasan baik dari sisi kondisi fisik, psikis maupun intelektual dibanding laki-laki, ditunjang profesi yang agak *nyeleneh* (baca satpam) dalam diri Yuli, mungkin menjadi salah satu faktor penyebab pengabaian akan kemampuan yang dimiliki Yuli. Satu sisi, Yuli butuh motivasi dari lingkungan sekitar untuk membangkitkan kepercayaan dirinya bahwa dia bisa mengambil peran lebih jauh dari hanya sekedar menjadi pemilih. Masyarakat di sekitarnya, masih harus mengasah kepekaan sosial atas kesetaraan *gender* yang membuka ruang pada perempuan seperti Yuli untuk mendapat akses terhadap proses-proses demokratis yang partisipatoris. Melibatkannya sebagai pengambil kebijakan, penentu keputusan serta pelaksanaannya untuk kepentingan publik, tidak hanya sekedar pemenuhan kebutuhan domestiknya.

Simpatisan Musiman

Sesaat pandangan saya mencoba menyapu ruangan yang bisa dijangkau penglihatan saya. Tidak nampak satupun tanda yang memberi petunjuk pada saya tentang pilihan politik Yuli. Biasanya kalender bergambar parpol, stiker peserta Pemilu masih tertempel di dinding maupun kaca Jendela. Bahkan saat pandangan saya perluas ke area teras, tetap saja tidak saya temukan gambar-gambar dimaksud. Karena penasaran, obrolan tentang penyelenggara saya alihkan pada peserta Pemilu.

Yuli mengaku tidak pernah terlibat langsung dalam politik praktis meskipun sekedar jadi saksi Peserta Pemilu di TPS. Ketika disinggung pilihan Partai Politik, dia terlihat bingung saat mau menjawab.

“Apa ya? Gak seberapa tahu saya, pokoknya pas mau coblosan, ada orang kampanye, ada yang mengarahkan milih si ini, ya saya coblos’. Ujar Yuli sambil tertawa kecil.

“*Pernah ikut kampanye?*” kejar saya. Yuli dengan yakin menggelengkan kepalanya disertai penegasan singkat

“*Tidak sempat mbak*”, tandasnya.

Rupanya Yuli benar-benar bukan simpatisan Parpol tertentu, yang dengan aktif ikut berkampanye meski sekedar lewat obrolan saat belanja pagi atau pas duduk-duduk bersama saudara dan tetangga.

“*Tidak sempat mikir yang begitu-begitu mbak, apalagi liat di TV, banyak orang Parpol katut ditangkap Polisi, KPK, pokoknya yang korupsi-korupsi itu*”. Dalam nada bicaranya, tertangkap nada antara pesimis dan miris.



“Berarti gak punya Parpol idola mbak?” ujarku sambil menyebut satu per satu nama Parpol peserta Pemilu 2019 kemarin. Berharap ada satu yang nyantol di hati Yuli, cuma dia lupa nama Parpolnya.

“Tidak mbak, saya lihat calonnya, meski kadang juga tidak terlalu kenal, intinya siapa yang paling saya tahu saat menjelang coblosan”, tutur Yuli. Sekilas saya terdiam mencoba menyambung kembali pernyataan awal dengan apa yang baru saja disampaikan Yuli. PR nih buat Parpol, gumam saya lirih.

PR yang saya maksud bahwa Parpol harus betul-betul mampu menawarkan dan menghadirkan figur calon yang mampu meraih perhatian publik. Selain mencoba menghadirkan calon yang berkualitas, berintegritas, sebagai representasi Parpol itu sendiri, ada sisi yang juga harus dipahami Partai Politik dalam menawarkan calon, yaitu bagi masyarakat seperti Yuli, ketimbang ideologi Parpol, mereka lebih tertarik isu pragmatis. Sejalan dengan pernyataan Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio yang menyatakan bahwa dunia perpolitikan di Indonesia kini sudah masuk ke dalam era pragmatis. Sehingga, hal-hal terkait ideologi Partai Politik (Parpol) dianggap kurang menarik bagi masyarakat.

"Saat ini politik di Indonesia, terutama marketing politik, masuk ke dalam era pragmatis. Sudah mulai tidak ideologis," ujar Hendri dalam satu kesempatan diskusi bertajuk Mengejar Ambang Batas Parlemen di Jakarta¹⁵.

Bahwa dalam kancah politik masyarakat sudah mulai membicarakan terkait permasalahan aktual, jangka pendek, dan yang ada kaitannya dengan masyarakat secara langsung. Masyarakat ingin tahu bagaimana cara parpol menghadapi kesulitan mereka. Con-

¹⁵ Sumber : Kompas.com

tohnya yaitu harga bahan-bahan pokok yang tinggi atau tarif listrik yang naik, gaji buruh yang tak kunjung naik dan dinilai belum memenuhi standar biaya kebutuhan hidup. Hal-hal seperti ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Parpol.

Setiap orang pasti punya kecenderungan dan pilihan, meskipun sifatnya musiman seperti yang digambarkan Yuli. Dalam konteks ini, Parpol juga harus berpikir strategi mengikat konstituen agar tetap loyal dari pemilihan ke pemilihan berikutnya. Direktur Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojuddin Abbas pernah menyampaikan, “*Pemilih Nasional kita memang mengambang. Party ID atau rasa kedekatan pemilih dengan Partai hanya 12 persen, atau 1 dari 10 pemilih yang merasa dekat dengan Partai Politik tertentu. Akibatnya Partai tidak memiliki basis yang besar dan solid,*” kata Sirojuddin¹⁶.

Kondisi ini dapat menjadi ancaman jika tidak direspon dengan baik oleh Partai Politik, dengan menyusun strategi jitu dalam merawat konstituen. Faktanya, terkadang partai yang tidak dominan saat pemilu legislatif, mampu mengantarkan kandidat yang diusungannya menjadi pemenang. Sebaliknya, partai yang tampak besar harus rela melepas konstituennya pada pemilihan lalu, berbelok arah memberikan suara pada Parpol lain.

Politik Uang dan Sejumpt Harapan

Yuli menyinggung pernah mendapatkan uang dari calon anggota DPR, begitu juga orang-orang di sekitarnya. Mereka bahkan berharap rizki dadakan yang munculnya saat menjelang pemilihan.

¹⁶ Beritagar.id



“Ya masyarakat seneng aja mbak, lagian kan kami itu sering tidak tahu siapa yang mau dicoblos, jadi yang ngasih uang yang kita coblos, mereka kan udah baik bersedekah”, katanya sambil tersenyum malu-malu.

Yuli seakan ingin menegaskan bahwa sikap permisif terhadap politik uang masih mengakar dalam budaya masyarakat sekitarnya. Alih-alih menilainya sebagai sebuah kecurangan, masyarakat menganggapnya sebagai rizki tambahan dan alasan dalam memilih calon wakil rakyat atau calon kepala daerah.

Yuli mengaku tidak kenal langsung dengan orang-orang yang hari ini duduk sebagai wakilnya di Badan di DPRD Kabupaten Mojokerto. Apalagi ketika diminta menilai kinerjanya pasca dilantik pada 24 Agustus 2019 silam, dia belum bisa komentar banyak, kecuali bersyukur bahwa UMK Mojokerto bisa masuk lima daerah tertinggi di Jawa Timur. Mungkin bagi Yuli, indikator keberhasilan kinerja para wakil rakyat atau kepala daerah sesederhana itu. Jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya kalangan akar rumput.

Tapi bukan berarti Yuli apatis dan tidak mengikuti kabar terkini gonjang-ganjing di Kabupaten Mojokerto.

“Sayang nggih mbak, Bupati nya kena KPK. Makanya saya tuh meskipun tidak kenal anggota DPR yang ada di Kabupaten Mojokerto, harapan saya mereka tidak korupsi itu saja.” Ucap Yuli lirih.

Merasa ada momen pas, saya langsung menimpali: *“Nah, mungkin salah satu penyebabnya, karena mereka merasa sudah mengeluarkan modal banyak saat pencalonan mbak, dengan bagi-bagi amplop tuh”* todong saya sambil sedikit menggoda Yuli yang tampak tersipu malu. Ternyata Yuli tak tinggal diam dengan pernyataan saya,

“Ngoten niku tergantung masyarakat juga kayaknya mbak. Maksud saya, masyarakat sih mau aja dikasih, malah kalau gak ada

yang bagi-bagi, mereka nyari-nyari. Kalau masyarakat gak mau kan nanti para calon DPR itu *kecelek* dan kemudian kapok”, timpal Yuli.

Saya senang umpan saya ditangkap Yuli dengan memberikan pendapatnya, sekaligus merasa tertampar. Selama ini sudah sering kita kampanyekan tolak *Money Politics* dengan menggunakan berbagai media. Mulai dari pemasangan banner dan baliho di pinggir jalan, iklan di media cetak dan elektronik, pertemuan formal dalam forum sosialisasi dan banyak lagi. Tapi faktanya, nilai yang berusaha kita infiltrasi belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat. Apalagi *tumbu ketemu tutup* peribahasa orang Jawa, peserta Pemilu hobby bagi-bagi uang, masyarakat mengharapkan.

Saya jadi teringat salah satu teori yang dikemukakan oleh George Simmel yang dikenal dengan *Philosophy of Money*. Simmel memandang uang berperan dalam menciptakan jarak dengan objek dan menawarkan diri menjadi sarana untuk mengatasi jarak tersebut. Nilai uang yang melekat pada objek dalam ekonomi modern menyebabkan kita berjarak darinya, kita tidak dapat memperolehnya tanpa uang kita. Kesulitan untuk mendapatkan uang dan objek-objek tersebut menjadikannya bernilai bagi kita. Pada saat yang sama, sekali kita mendapatkan cukup banyak uang, kita mampu mengatasi jarak antara diri kita dengan objek. Dengan demikian uang memiliki fungsi yang unik, menciptakan jarak antara orang dengan objek, kemudian menjadi sarana untuk mengatasi jarak tersebut¹⁷.

¹⁷ Makalah Teori Sosial Geoge Simmel “*The Philosophy of Money*” Andre Kurniawan Wiratama.



Rupanya, para kontestan dalam Pemilu maupun Pilkada masih menggunakan konsep ini dalam meraup dukungan dari masyarakat. Mereka memandang pemilih sebagai obyek dalam mendekatinya menggunakan uang sebagai sarana, alih-alih menawarkan program dan visi misi secara serius. Budaya ini yang kemudian dilakukan secara terus menerus memunculkan sikap permisif masyarakat terhadap politik uang. Sudah seyogyanya, ada upaya beriring dalam kampanye “*Stop Money Politics*”, tidak hanya kepada masyarakat sebagai pemilih, tapi pada mereka aktor dan *elite* politik, sehingga kalimat itu tidak menjadi jargon semata.

Pemilu dalam Angan Yuli Supraptiwi

Sambil mengusap kening bayinya yang sedang tertidur pulas, Yuli bergumam

“Pemilu kemarin kok gitu ya, surat suaranya banyak, sampai orang-orang yang mau nyoblos bingung. Ada yang bilang tidak bisa menemukan nama calon yang mau dicoblos, akhirnya ngawur *wis*,” senyumnya mengambang diantara pandangan matanya yang menyapu langit-langit ruang tamu.

Baginya bukan hal mudah harus mengingat nama dan nomerurut calon DPR mulai RI sampai Kabupaten, ditambah lagi calon DPD. Kecuali pemilihan Presiden, dengan cuma dua calon dan dilengkapi gambar, dia tidak kesulitan memberikan tanda lubang pada calon yang diinginkannya. Yuli juga merasa kasihan melihat orang tua yang kebingungan hingga beberapa diantaranya memutuskan hanya sekedar membuka surat suara di dalam bilik dan melipat kembali asal-asalan tanpa mencoblos.

Bagi saya, pernyataan Yuli mengandung kritik dan masukan terkait proses pemungutan suara. Apalagi dia membandingkan



dengan ingatan beberapa tahun silam, surat suara DPR pun dilengkapi gambar, baginya itu lebih memudahkan. Sekaligus sebagai sebuah pertimbangan bagi *elite* politik dalam memutuskan Pemilu Serentak pada 2024 yang telah dicanangkan. Menilik pernyataan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung: “Untuk Pemilu 2024 pemilihan tidak hanya dilakukan untuk Pemilu Presiden dan Pemilu legislatif saja namun juga Pemilihan Kepala Daerah. Nanti kita lihat perkembangannya karena target kami selesai pada awal tahun 2021(revisi Undang Undang kepemiluan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.),” ungkap Doli¹⁸.

Bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam keserentakan Pemilihan, tidak hanya dari sisi rumitnya persiapan teknis penyelenggaraan dan kemampuan Penyelenggara baik secara pemahaman kognitif tentang Ke-Pemiluan, maupun kekuatan fisik dan psikologis. Lebih dari itu, kemampuan pemilih dalam memahami rumitnya proses pemberian suara dengan banyaknya jumlah surat suara yang harus dicoblos, serta format surat suara yang dinilai kurang ramah pada masyarakat dengan pengetahuan rendah dan usia manula, tidak boleh diabaikan dalam diskursus desain Pemilu kedepan.

Banyak konsep keserentakan yang ditawarkan, untuk menjawab kekhawatiran dan keresahan seperti yang disampaikan Yuli. Ada beberapa usulan yang mengemuka terkait desain Pemilu 2024 seperti : *Pertama*, Pemisahan antara Pemilu serentak tingkat

¹⁸ Sumber : Antara News.



Nasional untuk memilih Presiden- Wakil Presiden, DPR dan DPD, dengan Pemilu serentak Daerah untuk memilih Kepala Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. *Kedua*, Pemisahan dari sisi kelembagaan maka Pemilu serentak yaitu Pemilu Legislatif (DPR, DPD, DPRD) dan Pemilu Eksekutif (Paket Presiden dan Paket Kepala Daerah). Semoga diputuskan konsep terbaik yang memudahkan baik bagi penyelenggara maupun pemilih, tanpa kehilangan substansi pemilihan itu sendiri.

“*Mbak’e*, abis ini saya tidak dipanggil atau disuruh kemana mana kan? Saya ini *kawatir* omongan saya ada yang keliru tadi” Yuli bertanya dengan nada menyelidik, saya tersenyum berusaha meyakinkan. Saya katakan bahwa saya hanya ingin tahu bagaimana persepsi Yuli tentang politik, pemilu, para wakil rakyat di DPR, para kepala daerah dan seterusnya. Obrolan yang tidak akan menjeratnya pada persoalan lebih jauh, apalagi masuk ranah hukum seperti kekhawatirannya dan keheranannya di saat awal pembicaraan, “Kenapa kok saya?” Apalagi ketika saya memperkenalkan diri sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Mojokerto, raut khawatir nampak dari keryitan di dahinya. Hal ini menegaskan bahwa orang seperti Yuli sangat jarang bahkan mungkin tidak pernah diajak berbicara mengenai politik dan pemilu, persepsinya, harapannya, persoalan yang melingkarinya.

Yuli tidak menyadari dari obrolan ini, ada kritik terhadap persoalan politik dan pemilihan. Ada masukan perbaikan kedepan agar demokrasi bisa diwujudkan dengan nyata dan bersih di Negara yang kita cintai ini. Suara-suara yang terabaikan karena dipinggirkan sebagai akibat profesi yang dianggap agak *nyeleneh* bagi seorang perempuan. Apalagi ketika dengan tegas dia menyatakan

“Pokoknya bagi masyarakat kecil seperti kami, yang penting Bapak Ibu yang sudah kami pilih tidak korupsi, *niku mawon* mbak”, pungkas Yuli.

Niku mawon (hanya itu), harapan sederhana Yuli hanya itu: Tidak Korupsi. Justru itulah yang akan menjadi sebuah diskusi panjang, yang akan memunculkan gagasan-gagasan besar, bagaimana agar negara ini benar-benar bersih dari korupsi. Ada yang mengaitkan dengan biaya politik tinggi, sampai merembet pada gagasan perubahan sistim pemilihan, dan sebagainya. Ide-ide cemerlang bagaimana mengikis budaya permisif terhadap politik uang di masyarakat. Bahwa masih dibutuhkan upaya-upaya keras dan kerja-kerja nyata untuk benar-benar menciptakan iklim Politik yang bersih, proses pemilihan yang berintegritas, agar menghasilkan pemimpin berkualitas.

Apa yang telah disampaikan Yuli pada obrolan kami sepanjang pagi ini, semakin membuka cakrawala berpikir saya dan merasa tertantang untuk menggali lebih jauh persepsi masyarakat pinggiran tentang demokrasi dan pemilu dari sudut pandang mereka. Boleh jadi, dengan profesi sama, ada pola pikir berbeda yang akan semakin menyadarkan kita, masih banyak suara-suara yang tidak terdengar dan dinafikan. Padahal mereka merupakan bagian dari masyarakat yang katanya keberadaan suatu negara, berdasarkan Teori Kesejahteraan yang dicetuskan oleh Kranenburg, secara umum bertujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi warganya.



PEMILU DALAM BINGKAI PANDANG SANTRI WATI

Lilik Mustafidah

Dalam laman daring kompas (25/7/2019), Komisioner KPU RI Pramono Ubeid Thantowi memprediksi bahwa jumlah keterwakilan perempuan dalam lembaga DPR RI periode 2019-2024 paling tinggi sepanjang sejarah pasca-reformasi. Berdasarkan hasil penelitian Pusat Kajian Riset dan Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), keterwakilan perempuan di parlemen pada pemilu 2019 diprediksi mencapai 20,5 persen atau 118 orang, dibandingkan dengan pemilu 2014 keterwakilan perempuan di DPR RI 14,3% atau 97 orang. Sementara pada pemilu 2009, keterwakilan perempuan 18% atau 101 orang dan pemilu 2004 keterwakilan perempuan 11% atau 61 orang. Peningkatan keterwakilan perempuan tersebut merupakan dampak dari regulasi yang mewajibkan kuota keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Artinya, bahwa selama rentang tahun 1999-2004 terdapat 45 perempuan dari 500 anggota DPR RI atau 9 persennya. Pada 2004-2009 meningkat menjadi 61 orang dari 550 orang, dan meningkat lagi sebanyak 101 perempuan pada 2009-2014 dari 560 anggota DPR RI.¹⁹

¹⁹<https://rumahpemilu.org/perempuan-caleg-terpilih-di-2019-capai-205-persen-puskapol-masih-pesimis-parlemen-membaik/> (diakses 21 januari 2020).

Keterwakilan perempuan merupakan bagian dari bentuk partisipasi politik. Menurut Neera Desai (1990), ada tiga hal pokok dalam melihat partisipasi politik yang dilakukan perempuan, yaitu, pertama, keterlibatan perempuan dalam aktivitas yang bersifat sukarela (*voluntary action*), baik sukses atau tidak, terorganisasi atau tidak, secara periodik atau tidak, dalam memperjuangkan kemaslahatan umum. Kedua, bagaimana perempuan dalam organisasi non formal terlibat dalam lobi untuk suatu perubahan kebijakan dari pemerintah. Ketiga, mengajak elemen lain (atau berjejaring) dalam rangka untuk meluaskan pengaruh kepada masyarakat lain didalam gerakan, supaya mempunyai legitimasi yang kuat.²⁰

Partisipasi politik perempuan telah dilakukan sejak pasca reformasi sebagai bentuk gerakan perempuan dan termasuk dalam hasil Deklarasi Beijing 1995 tentang Perempuan dalam Politik. Salah satu aktivitas gerakan perempuan yang muncul menjelang pemilihan umum 1999 adalah melalui pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di dalam aktivitas tersebut adalah pendidikan politik.²¹ Orit Ocholov menyatakan bahwa pendidikan politik secara umum, diartikan sebagai internalisasi nilai-nilai yang diserap oleh masyarakat dari lingkungan sekitarnya, dari suatu masa (rejim) tertentu.²²

²⁰ Neera Desai, "Issues in Women's Political Participation" dalam buku *Women in Politics, Form and Processes*, dalam Mohammad Firdaus, "Dampak Pendidikan Politik yang Dilakukan PPSW terhadap Partisipasi Politik Perempuan Lapis Bawah (Studi Kasus Anggota Kelompok Perempuan Melati di Pondok Rangon)", Tesis FISIP Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2003, 29.

²¹ Rini Pudyastuti, "Strategi Gerakan Perempuan Indonesia Menjelang Pemilihan Umum 1999: Studi tentang Pendidikan Pemilih Perempuan", Tesis FISIP Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2001, 103.

²² Orit Ocholov dalam Mohammad Firdaus, "Dampak Pendidikan Politik yang Dilakukan PPSW terhadap Partisipasi Politik Perempuan Lapis Bawah (Studi



Pendidikan politik penting diberikan bagi perempuan guna menunjang keterwakilan perempuan dalam partisipasi politik. Seiring dengan perjuangan perempuan untuk meningkatkan partisipasi politik, perempuan juga menghadapi tantangan berupa domestifikasi.

Di Indonesia, domestifikasi perempuan telah terjadi setelah merdeka. Para pemimpin Indonesia mengikuti kebiasaan umum yang menempatkan perempuan kembali ke dalam rumah sehingga mereka tidak dapat bersaing dengan laki-laki di ranah publik (Noerdin).²³ Sayangnya, domestifikasi perempuan dalam politik juga masih terjadi dengan fenomena melibatkan perempuan yang kurang kompeten dan kredibel menjadi calon anggota legislatif hanya untuk memenuhi kuota 30% perempuan agar lolos mengikuti pemilu. Sehingga, perempuan terlihat hanya sebagai simbol pelengkap sebuah aturan atau perempuan kurang dianggap layak dan mampu menempati posisi strategis sebagai pengambil kebijakan. Selain itu, paradigma bahwa laki-laki lebih layak dari pada perempuan masih banyak diyakini masyarakat, sehingga ruang-ruang strategis didominasi laki-laki dan keterwakilan perempuan masih minim.

Dengan fenomena seperti itu dalam masyarakat, maka mulai bermunculan organisasi-organisasi yang mewadahi perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya melalui politik formal dan infor-

Kasus Anggota Kelompok Perempuan Melati di Pondok Rangun)”, Tesis FISIP Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2003, 30-31.

²³ Noerdin dalam Tuti Alawiyah Surandi, “Politik Identitas Islam dan Hak-hak Perempuan (Studi Kasus Proses Penerapan Syariat Islam di Serang Banten)”, Tesis Program Kajian Wanita Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, 2003/2004, 42.

mal dalam rangka kesetaraan gender. Strategi gerakan perempuan untuk memenangkan politik formal melalui politik informal adalah dengan melibatkan diri dalam politik praktis seperti pemilu. Pemilih sebagai partisipan politik merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu pemilu. Sebagai partisipan politik artinya menjalankan sebuah peran dalam partisipasi politik. Menurut Arif dan Musrifah (2015) menyatakan bahwa dalam sistem pemilu, partisipasi politik merupakan suatu aktivitas warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, maupun kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.²⁴

Seiring dengan gerakan tersebut, partisipasi pemilih perempuan terbukti meningkat terutama di wilayah Jawa Timur. Dalam laman daring detiknews (14/5/2019), Komisioner KPU Jawa Timur Gogot Cahyo Baskoro menyampaikan partisipasi masyarakat pada pemilu 2019 meningkat yaitu mencapai 82,53% dibandingkan pada pilgub 2018 hanya 67,39%, dengan tingkat kehadiran pemilih mencapai 25.511.194 terdiri atas 12.305.066 pemilih laki-laki dan 13.206.128 pemilih perempuan.²⁵ Sedangkan di Bojonegoro sendiri, dalam laman daring kumparan (2/5/2019), Ketua KPU Bojonegoro Abdim Munib menyampaikan angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019 meningkat yaitu mencapai 82,40% atau

²⁴ Arif dan Musrifah dalam Aryos Nivada dan Ahmad Mirza Safwandy, *Fenomena Partisipasi Pemilih Pilpres 2014: Studi Kasus Kota Banda Aceh & Kabupaten Aceh Utara, Cetakan Pertama* (Banda Aceh: Dialeksis Publishing, 2016), 75.

²⁵ <https://new.detik.com/berita-jawa-timur/d-4549317/pemilih-jatim-di-pemilu-2019-naik-5-juta-jiwa-dari-pilgub-2018> (diakses 21 Januari 2020).



sebanyak 862.402 pemilih yang hadir dari seluruh jumlah pemilih 1.046.644 pemilih.²⁶

Adapun untuk meningkatkan partisipasi pemilih dari kalangan remaja, diperlukan pendidikan politik semisal dalam gerakan literasi. Gerakan literasi dengan menerbitkan buku pengetahuan politik dan pemilu bagi remaja seperti yang dicontohkan oleh Saidah Sakwan dalam bukunya *Politik dan Pemilu bagi Remaja* (2010), bahwa sebaiknya kita dan setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu, karena setiap suara pemilih sangat berarti dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan. Sikap untuk tidak ikut memilih menunjukkan ketidakpedulian kita akan nasib bangsa, walaupun ada pihak-pihak tertentu yang mengartikan lain.²⁷

Saidah Sakwan (2010) juga menjelaskan terkait pengawasan pemilu bagi remaja, bahwa pemilu itu perlu diawasi karena peranannya yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pemilu diawasi agar berjalan sesuai asasnya yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebenarnya, setiap orang diharapkan dapat menjadi pengawas pemilu agar dapat menghindari kesalahan ataupun kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.²⁸

²⁶ <https://kumparan.com/beritabojongoro/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu-2019-di-bojongoro-capai-82-40-persen-1r0B27QWv9p> (diakses 21 Januari 2020).

²⁷ Saidah Sakwan, “Politik dan Pemilu bagi Remaja” (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit Indonesia, 2010), 18.

²⁸ Saidah Sakwan, “Politik dan Pemilu bagi Remaja”, 19-20.

Selain gerakan literasi, sosialisasi pengawasan partisipatif dengan berbagai inovasi dan kreasi juga perlu dilakukan dalam rangka mengajak remaja menjadi pengawas partisipatif pemilu. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bojonegoro dan beberapa Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur yaitu melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu tidak hanya kepada perwakilan OKP, BEM di Perguruan Tinggi, namun juga santriwan/wati yang telah memiliki hak pilih di Pondok Pesantren se-Kabupaten/Kota.

Partisipasi Politik Santriwati dalam Pemilu

Perempuan menjalani berbagai peran termasuk menempati ruang-ruang politik dan latar belakang pendidikan baik pendidikan umum maupun agama. Semuanya memiliki andil berperan dalam dunia politik salah satunya santri, khususnya santri perempuan (santriwati). Dalam politik terdapat istilah politik santri yang artinya santri memiliki peran yang sama dalam partisipasi aktif dalam politik. Banyak tokoh berlatar belakang santri berhasil menjadi politisi dan turut mewarnai dinamika dan kontribusinya dalam perubahan masyarakat yang lebih baik.

Selain itu, politik telah masuk di dunia pesantren sejak jaman perebutan kemerdekaan hingga usaha mempertahankan kemerdekaan. Santri pun terlibat dalam dunia politik, termasuk santriwati. Seharusnya santri bukan hanya sosok murid yang belajar di pesantren akan tetapi kaum intelektual yang memiliki ilmu-ilmu pengetahuan terlebih-lebih ilmu pengetahuan keagamaan yang



mengatur hubungan yang baik yang selaras dengan ajaran agama yang haq (agama Islam).²⁹

Dalam kebudayaan aplikasi politik, santri mengaplikasikan politiknya untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan yang menyeluruh terhadap kehidupan masyarakat. Perpolitikan ala santri sebagai usaha konkret untuk mencapai suatu tatanan masyarakat yang lebih baik atau untuk mencapai suatu tatanan yang baik dan berkeadilan. Hal tersebut dapat terjadi, apabila mengaplikasikan politik *syar'iyah* yang orientasinya untuk kemaslahatan publik yang universal. Sehingga, dengan demikian politik santri tetap memperhatikan etika politik dan sesuai dengan nilai-nilai politik *syar'iyah* yang merujuk terhadap sakralitas aturan-aturan agama Islam³⁰

M. Hanif Thohari dan M. Jacy (2015) menyatakan bahwa perilaku politik santri pada pemilu legislatif 2019 masih beragam namun cenderung lebih rasional, tidak lagi terlalu menggunakan pendekatan fanatisme agama dalam menggaet massa. Beberapa perilaku politik atau strategi yang digunakan yaitu pertama, penggunaan baliho dan semacamnya. Kedua, kampanye blusukan, menghadiri forum-forum atau pengajian. Ketiga, pemanfaatan jaringan sosial dan pengorganisasian tim sukses. Perilaku politik atau strategi tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan tindakan rasional instrumental dan tradisional.³¹

²⁹ Mawardi MS, *Santri: Sosok dan Kiprahnya dalam Berpolitik, Berbangsa dan Bernegara* (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018), 3.

³⁰ Mawardi MS, *Santri*, 34-35.

³¹ M. Hanif Thohari dan M. Jacy, "Perilaku Politik Santri pada Pemilu Legislatif 2014", *Jurnal Paradigma* Vol 3 No 01 Universitas Surabaya (2015), 8.

Sedangkan menurut Ana Shofiyah dan M. Turhan Yani (2014), orientasi politik santri sebagai pemilih dalam pilkada 2013 yaitu pertama, secara orientasi kognitif, santri mengetahui bahwa pemilihan penting untuk dilakukan dan sebagai pemilih pemula harus menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan tersebut. Kedua, secara orientasi afektif, santri mampu bersikap positif (mendukung dan berpartisipasi) dalam proses pemilihan dan belajar menjadi pemilih yang baik. Ketiga, secara orientasi evaluatif, santri memiliki keyakinan terhadap calon yang dipilihnya dalam pemilihan dan memiliki harapan terhadap calon yang sudah dipilih/terpilih.³²

Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi orientasi politik santri yaitu pertama, faktor demografis yaitu faktor yang berkaitan dengan keadaan atau kondisi umum santri (usia dan jenis kelamin). Faktor ini mempengaruhi kesadaran santri bahwa usianya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pemilih, sehingga harus menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan. Kedua, faktor identitas partai yaitu faktor yang berkaitan dengan sikap dan pola tingkah laku santri. Faktor ini mempengaruhi pola pikir dan pilihan politik santri terhadap proses politik atau kandidat politik tertentu. Ketiga faktor citra kandidat yaitu faktor yang berkaitan dengan penilaian atau pertimbangan santri dalam menentukan pilihan politik. Faktor ini menyebabkan santri dapat memberikan penilaian

³² Ana Shofiyah dan M. Turhan Yani, "Orientasi Politik Santri sebagai Pemilih Pemula dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 (Studi pada Santri di Pondok Pesantren Roudlotun Nasy'in Desa BeratKulon Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto", *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol 2 No 2 Universitas Surabaya (2014), 622.



terhadap kandidat politik dalam pemilihan sehingga mempengaruhi pilihan politik santri.³³

Namun disisi lain, dalam memilih pemimpin, santri memiliki beberapa perilaku tertentu. Menurut Nico Purwanto (2018), bahwa perilaku memilih santri dalam pilkada 2017 yaitu pertama, menggunakan pendekatan sosiologis yaitu kesamaan agama. Kedua, pendekatan psikologis yaitu ikatan emosional terhadap bakal calon yang juga merupakan tokoh agama dan memiliki latar belakang pesantren. Ketiga pendekatan rasional yaitu dimana santri cenderung kurang mengetahui visi dan misi calon pemimpin. Dan keempat, derajat *paternalistik* yaitu antara santri dan kiyai di pesantren.³⁴

Santri juga mampu memberikan efek yang baik ketika terlibat dalam proses politik, sebagaimana pernyataan Fitriyani (2018), bahwa santri memiliki peran yang kuat dan strategis dalam melakukan pemberantasan politik uang. Karena santri dipandang sebagai orang yang dapat didengar perkataannya dan dijadikan contoh oleh masyarakat.³⁵

³³ Ana Shofiyah dan M. Turhan Yani, "Orientasi Politik Santri sebagai Pemilih Pemula, 622-623.

³⁴ Nico Purwanto, "Perilaku Memilih Santri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2017 (Studi pada Pondok Pesantren Riyadhlotut Thalibin, Pondok Pesantren Nurul Yaqin dan Pondok Pesantren Nurul Huda)", Skripsi FISIP Universitas Lampung, 2018, 20.

³⁵ Fitriyani, "Peran santri dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Kasus Praktek Politik Uang dalam Pilkadaes Kabupaten Demak)", dalam Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 No 3 (2018), 1027.

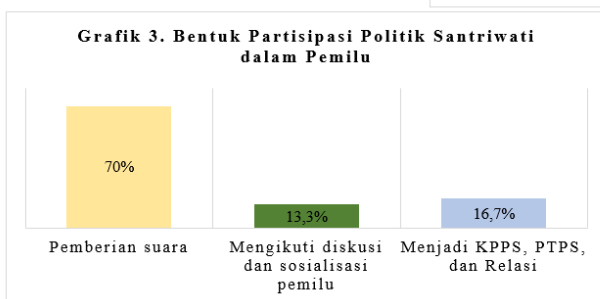
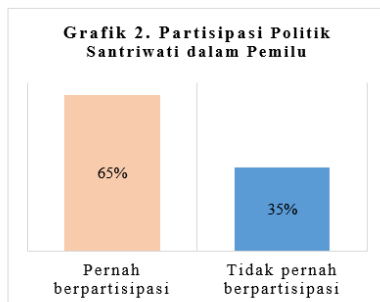
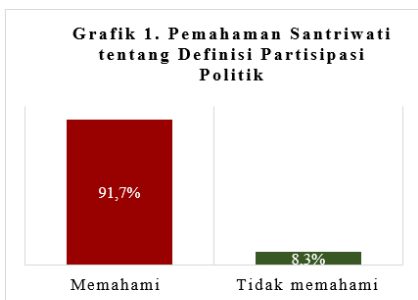
Metode dan Hasil Penelitian

Dalam tulisan ini, peneliti membahas tentang “pandangan santriwati terhadap partisipasi politik dalam pemilu”. Peneliti mengambil responden sebanyak 60 orang yang merupakan pemilih pemula dan *millenial*. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik random sampling, yang mana data diambil dari rentang usia 16-23 tahun, sebanyak 96,6% lahir di Bojonegoro sisanya dari luar Bojonegoro. Responden terdiri dari latar belakang pendidikan MA Islamiyah kelas XII IPA2 dan STAI At-Tanwir. Sedangkan latar belakang keluarga sebagian besar berprofesi sebagai petani dan wiraswasta, sisanya dosen dan guru. Dari penyebaran angket dan wawancara pada tanggal 14-16 Januari 2020 yang dilakukan telah dianalisa, hasilnya sebagai berikut:³⁶

1. Terkait pemahaman definisi partisipasi politik yaitu 91,7% santriwati memahami definisi partisipasi politik meskipun tidak sepenuhnya memahami dan 8,3% mengakui tidak tahu. Kemudian 65% santriwati pernah berpartisipasi politik dalam pemilu dan 35% tidak pernah berpartisipasi politik dalam pemilu karena belum memiliki hak pilih atau hak suara. Artinya, responden yang merupakan santriwati memiliki latar belakang pendidikan yang baik, sehingga cukup sadar dalam berpartisipasi dalam pemilu. Adapun santriwati yang mengikuti partisipasi politik dalam pemilu yaitu 70% dalam bentuk pemberian suara saat pemilu; 13,3% mengikuti diskusi dan sosialisasi pemilu serta 16,7% menjadi KPPS, PTPS, dan Relasi.

³⁶ Data Hasil Penyebaran Angket dan Wawancara tanggal 14-16 Januari 2020.



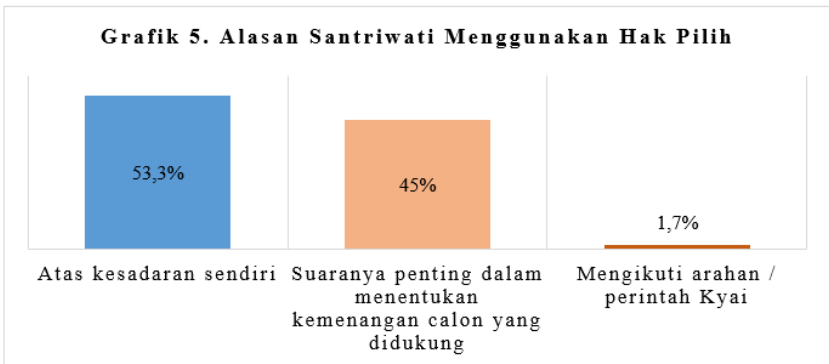
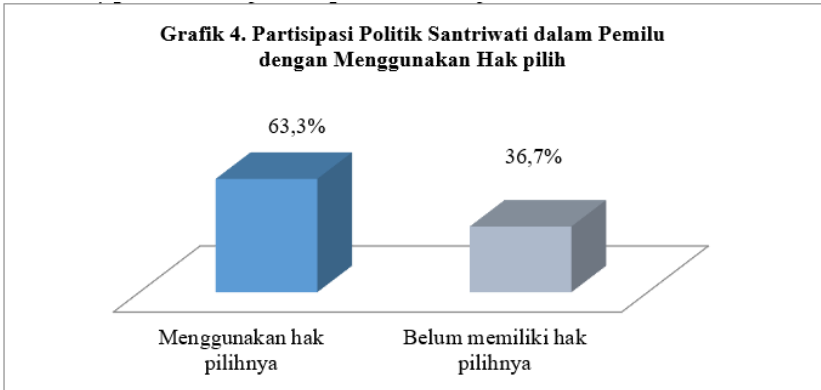


Data diatas didukung oleh wawancara beberapa informan santriwati bahwa sebagian besar santriwati memahami definisi partisipasi politik dalam pemilu meskipun tidak secara utuh. Informan AIM berpendapat bahwa partisipasi politik dalam pemilu adalah ikut berperan aktif dalam berlangsungnya pemilu di daerah tertentu. RNM berpendapat bahwa ikut menjadi panitia pelaksana serta segala kegiatan yang berhubungan dengan pemilu dan memberi hak suara. Menurut WS, partisipasi politik dalam pemilu adalah ikut serta dalam pelaksanaan pemilu, baik sebagai panitia pelaksana, pengawas maupun pemilih.

Menurut informan AIM bahwa Ia pernah berpartisipasi pemilu dengan mencoblos saat hari H. RNM pernah berpartisipasi dengan cara mencoblos, karena telah memiliki hak pilih.

WS pernah berpartisipasi dengan cara memilih/memberikan suara, menjadi relasi KPU, ikut diskusi, sosialisasi pemilu dan sosialisasi pengawasan partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu.

2. Partisipasi politik dalam pemilu dengan menggunakan hak pilih yaitu 63,3% santriwati menggunakan hak pilihnya dan 36,7% belum memilih karena belum memiliki hak pilih. Adapun alasan santriwati yang menggunakan hak pilih yaitu 53,3% menjawab atas kesadaran mereka sendiri saat menggunakan hak pilih; 45% suaranya penting dalam menentukan kemenangan calon yang didukung dan 1,7% mengikuti arahan/perintah kyai di pesantrennya.

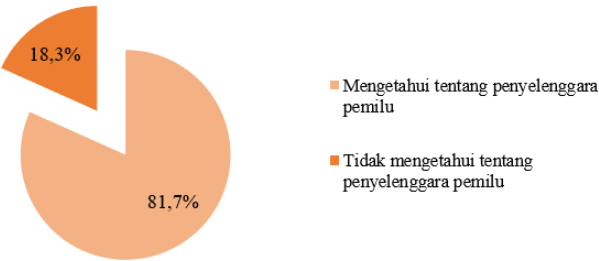


Informan AIM dan WS menggunakan hak pilihnya saat pemilu atas kesadaran sendiri. Sedangkan RNM menggunakan hak pilihnya karena baginya suaranya penting untuk calon yang dipilihnya.

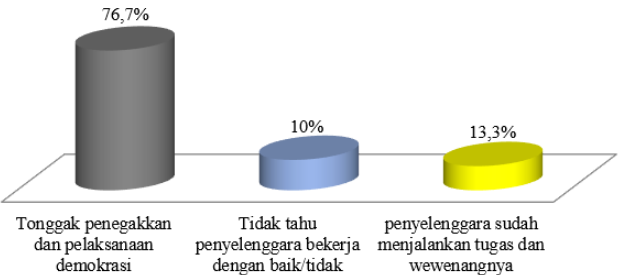
3. Pengetahuan tentang lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, DKPP yaitu 81,7% santriwati telah mengetahui lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, DKPP, hanya saja sebagian besar responden mengetahui KPU dan Bawaslu saja, sedangkan DKPP belum mengetahui dan 18,3% responden tidak tahu. Adapun pendapat terhadap lembaga-

lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu, KPU, DKPP yaitu 76,7% santriwati menjawab bahwa lembaga tersebut adalah tonggak penegakan dan pelaksanaan demokrasi serta kode etik dalam pemilu; 13,3% berpikir bahwa mereka sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan 10% mengakui bahwa tidak tahu mereka bekerja dengan baik atau tidak.

Tabel 1. Pengetahuan Santriwati tentang Penyelenggara Pemilu



Grafik 6. Pendapat Santriwati terhadap Lembaga Penyelenggara Pemilu

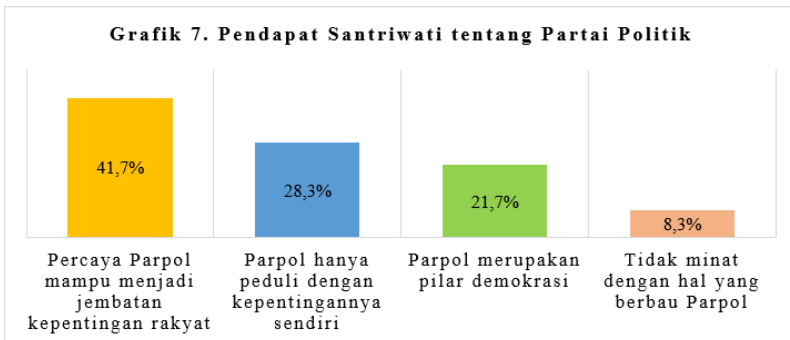


Informan AIM dan RNM berpendapat kurang sempurna dalam mengetahui KPU, Bawaslu, dan DKPP. Menurut AIM, bahwa lembaga tersebut sudah menjalankan tugas dan wewenangnya. Menurut RNM, bahwa lembaga yang melaksanakan



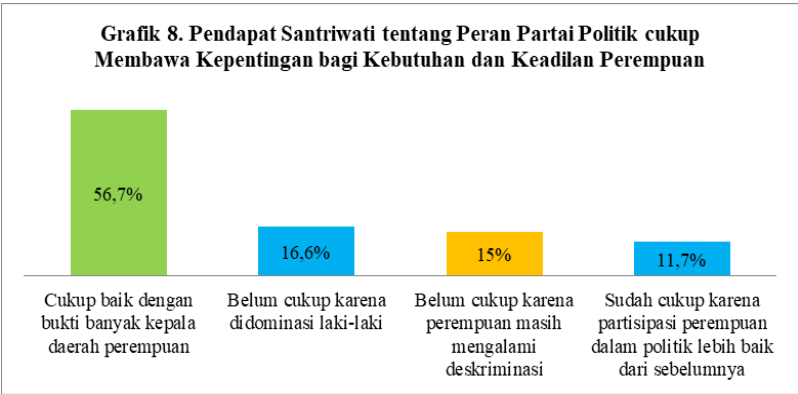
dan mengawasi demokrasi saat pemilu. WS tahu KPU, Bawaslu, DKPP, yaitu lembaga yang menegakkan dan melaksanakan demokrasi serta kode etik saat pemilu.

4. Pendapat tentang partai politik yaitu 41,7% santriwati menjawab percaya bahwa partai politik mampu menjadi jembatan kepentingan rakyat dengan memperjuangkan kepentingan rakyat dan membawa perubahan dan kemajuan bangsa ini melalui wakilnya di lembaga negara. Kemudian 28,3% partai politik hanya peduli dengan kepentingannya sendiri, banyak berjanji dan sering tidak menepati janjinya. 21,7% partai politik merupakan pilar demokrasi yang menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, pengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah dan 8,3% tidak minat dengan hal-hal yang berhubungan dengan partai politik.



Adapun terkait peran partai politik cukup membawa kepentingan bagi kebutuhan dan keadilan perempuan yaitu 56,7% santriwati menjawab bahwa cukup baik dengan bukti semakin banyak kepala daerah dan pemimpin perempuan; belum cukup karena 16,6% masih didominasi oleh laki-laki dan 15% perempuan masih mengalami banyak diskriminasi dan ketidakadilan

gender dalam politik seperti hanya menjadi calon atau kandidat pelengkap persyaratan saat jelang pelaksanaan pemilihan umum serta 11,7% merasa sudah cukup, karena partisipasi perempuan dalam politik jauh lebih baik dari sebelumnya.

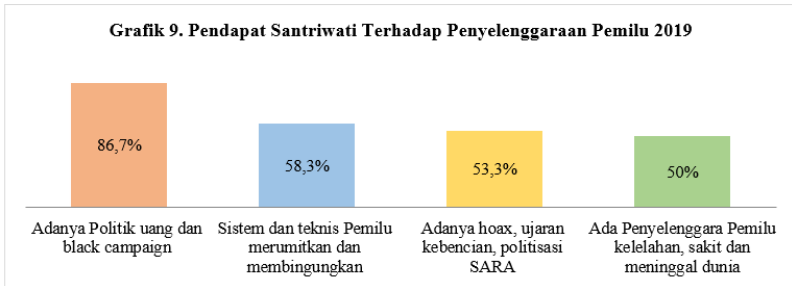


Bagi informan AIM, partai politik menjadi jalan bagi kepentingan masyarakat dan perannya cukup baik, dimana banyak perempuan terpilih menjadi bupati, gubernur, dan menteri melalui jalan partai politik. RNM berpendapat bahwa partai politik lebih memikirkan kepentingannya sendiri dan perannya belum cukup, karena lembaga-lembaga masih banyak diisi oleh laki-laki. Sedangkan menurut WS, partai politik sebagai tombaknya demokrasi serta mengontrol kebijakan pemerintah dan perannya belum cukup, karena perempuan masih mengalami diskriminasi dan ketidakadilan.

5. Penyelenggaraan pemilu 2019 (jawaban lebih dari satu) yaitu 86,7% santriwati menjawab adanya politik uang dan *black campaign*; 58,3% sistem dan teknis pemilu merumitkan dan membingungkan; 53,3% adanya hoax, ujaran kebencian dan

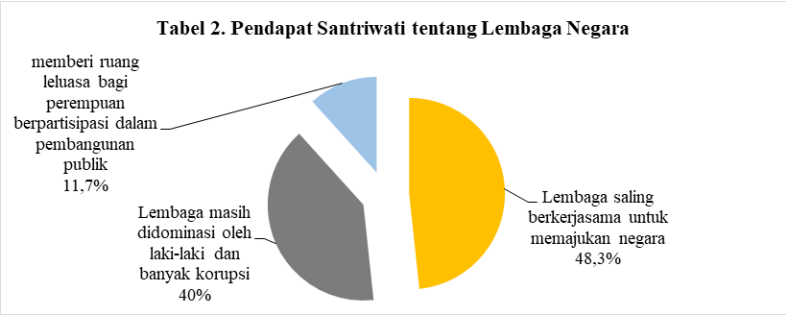


politisasi SARA dan 50% adanya penyelenggara pemilu yang mengalami kelelahan, sakit dan meninggal dunia.



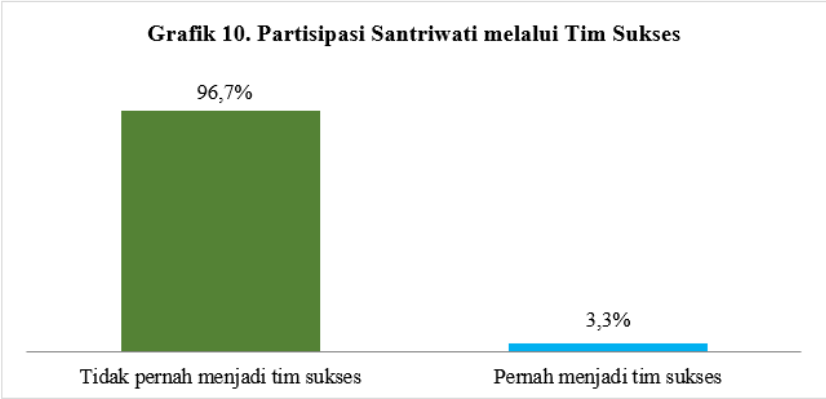
Informan AIM berpendapat bahwa pemilunya membingungkan terutama bagi orangtua seperti jumlah surat suara lima lembar dan lima kotak suara. Menurut RNM, pada persoalan teknis pemilu rumit dan selesainya lama sampai pagi. Menurut WS, pemilu 2019 rumit dan melelahkan, ada penyelenggara yang sakit dan meninggal dunia serta kampanye gelap masih ada. Ketiga informan juga mengatakan bahwa masih terjadi politik uang dan hoaks.

6. Pendapat tentang lembaga negara seperti DPR, MPR, DPD, Pemerintah, MK, MA, KY dll yaitu 48,3% santriwati menjawab lembaga yang saling bekerjasama untuk memajukan negara dan mensejahterakan rakyat; 40% lembaga yang masih didominasi oleh laki-laki dan banyak kasus korupsi terjadi dan 11,7% lembaga yang memberi ruang leluasa bagi perempuan berpartisipasi dalam pembangunan publik.

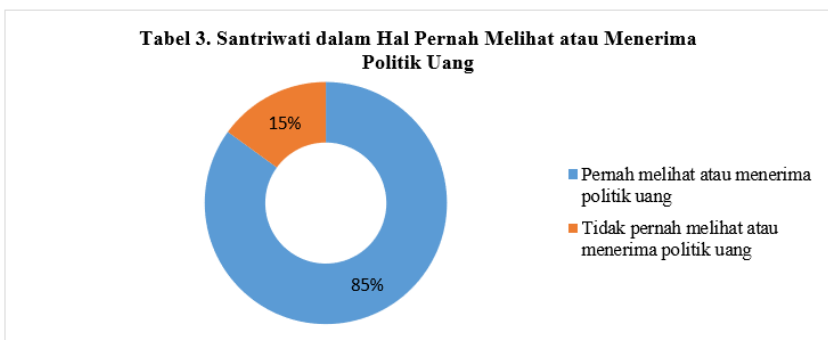
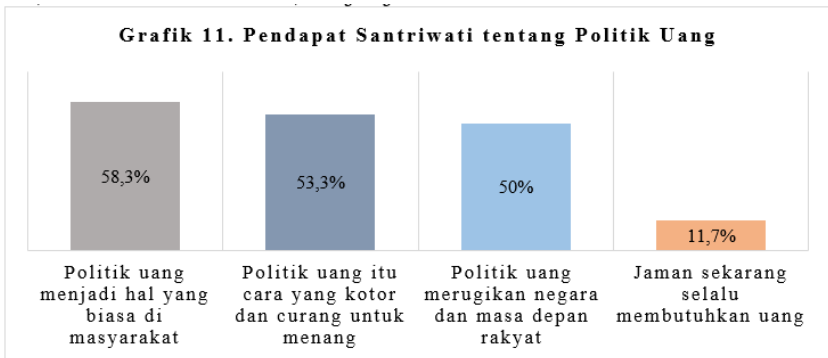


Menurut informan AIM, dalam lembaga-lembaga negara masih adanya korupsi. Menurut RNM, masih kebanyakan laki-laki yang menjabat di lembaga negara. Dan menurut WS, antar lembaga saling membangun dan bekerjasama untuk kepentingan masyarakat.

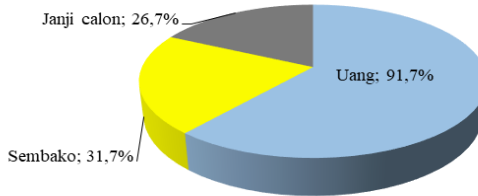
7. Partisipasi politik melalui tim sukses yaitu 96,7% santriwati menjawab tidak pernah dan 3,3% pernah menjadi tim sukses. Hal itu sesuai dengan pengakuan tiga informan yang tidak pernah terlibat menjadi tim sukses.



8. Pendapat tentang politik uang (jawaban lebih dari satu) yaitu 58,3% santriwati menjawab politik uang sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat; 53,3% politik uang cara yang kotor dan curang untuk menang; 50% politik uang merugikan negara dan masa depan rakyat dan 11,7% jaman sekarang selalu membutuhkan uang. Sedangkan terkait pernah melihat atau menerima politik uang yaitu 85% santriwati menjawab pernah melihat atau menerima politik uang dan 15% tidak pernah melihat atau menerima politik uang. Adapun politik uangnya berupa (jawaban lebih dari satu) yaitu 91,7% santriwati menjawab uang; 31,7% sembako dan 26,7% janji calon.

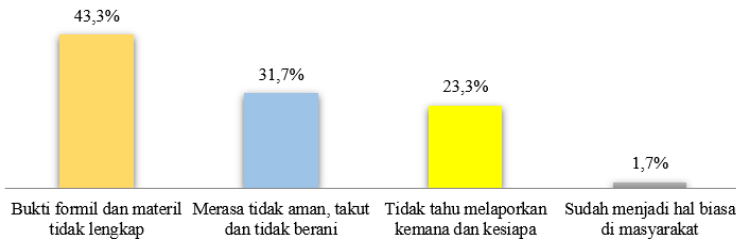


Tabel 4. Santriwati yang Pernah Melihat atau Menerima Politik Uang Berupa:



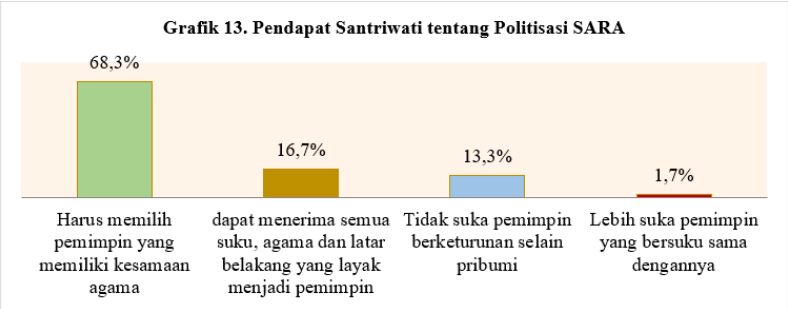
Menurut informan AIM, politik uang itu sudah biasa di masyarakat. Menurut RNM, politik uang itu curang jadi tidak boleh. Dan menurut WS, politik uang itu hal yang biasa terjadi di masyarakat karena sebagai ganti uang kerja. Ketiga informan sama-sama mengatakan bahwa pernah melihat politik uang berupa uang, sembako dan janji.

9. Terkait melaporkan politik uang yaitu 98,3% santriwati menjawab tidak pernah melaporkan politik uang; dan 1,7% pernah melaporkan politik uang. Adapun alasan santriwati tidak melaporkan politik uang yaitu 43,3% menjawab bukti formil dan materil tidak lengkap; 31,7% merasa tidak aman, takut dan tidak berani; 23,3% tidak tahu melaporkan kemana dan kesiapa serta 1,7% menganggap politik uang sudah menjadi hal yang biasa dalam masyarakat.

Tabel 5. Santriwati dalam Hal Melaporkan Politik Uang**Grafik 12. Alasan Santriwati tidak Melaporkan Politik Uang**

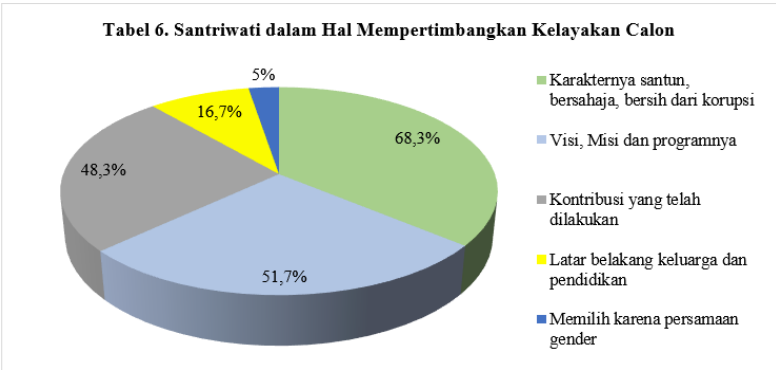
Sesuai dengan pernyataan informan AIM pernah melihat, tapi tidak melaporkan soalnya tidak tahu kemana harus melaporkannya. RNM pernah melihat tapi tidak berani melaporkan. WS pernah melihatnya tapi tidak melaporkan karena tidak punya bukti yang cukup/lengkap.

10. Pendapat tentang politisasi SARA yaitu 68,3% santriwati menjawab harus memilih pemimpin yang memiliki kesamaan agama dengannya; 16,7% dapat menerima semua suku, agama dan latar belakang yang layak menjadi pemimpin; 13,3% tidak suka jika pemimpin negeri ini dipimpin oleh warga berketurunan selain pribumi dan 1,7% lebih suka memilih pemimpin yang bersuku sama dengannya.



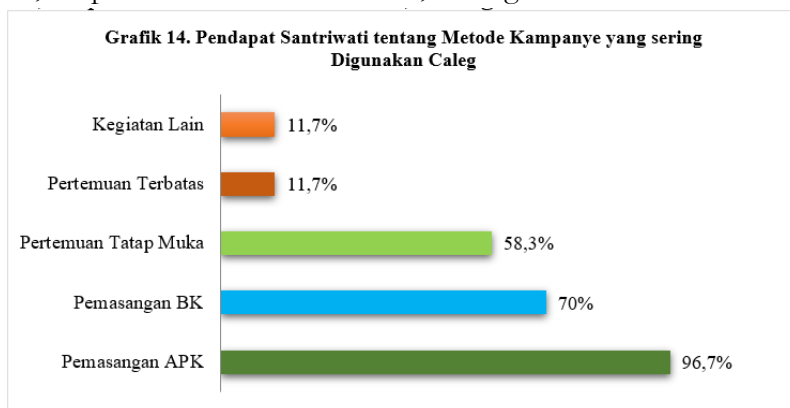
Menurut informan AIM dan RNM, lebih memilih pemimpin yang beragama sama dengan mereka. Sedangkan WS memilih dan menerima pemimpin dari semua suku, agama dan latar belakangnya.

11. Terkait memilih calon, santriwati mempertimbangkan kelayakan calon dilihat dari beberapa hal (jawaban lebih dari satu) yaitu 68,3% menjawab karakternya yang santun dan bersahaja serta bersih dari korupsi; 51,7% visi misi dan programnya; 48,3% kontribusi yang telah dilakukan bagi daerah; 16,7% latar belakang keluarga dan pendidikannya serta 5% memilih sesama perempuan, sebab perempuanlah yang dapat memahami kepentingan masa depan perempuan yang lebih baik.



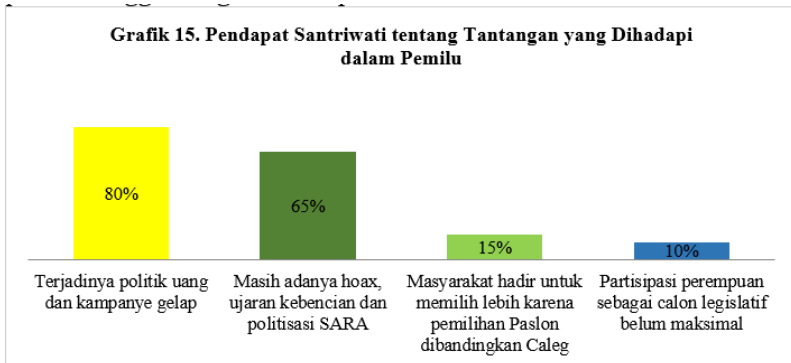
Menurut informan AIM, lebih melihat visi misi, latar belakang keluarga dan pendidikannya. RNM melihat visi misi, program dan kontribusinya untuk desa. Dan WS melihat perilakunya, visi misi dan program serta kontribusi untuk daerah.

12. Terkait metode kampanye yang sering digunakan caleg saat pemilu (jawaban lebih dari satu) yaitu 96,7% santriwati menjawab pemasangan APK seperti spanduk, baliho, bendera, umbul-umbul; 70% penyebaran BK seperti stiker, brosur, poster, pamflet, kalender, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kartu nama, pin dan/atau alat tulis; 58,3% pertemuan tatap muka seperti kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, pengajian/tahlil atau tempat umum lainnya; 11,7% pertemuan terbatas dan 11,7% kegiatan lain.



Informan AIM mengetahui APK yang sering dipasang dan lihat di jalan. RNM tahunya APK dan pertemuan tatap muka seperti di pengajian atau tahlil. Dan setahu WS melalui APK, BK dan pertemuan tatap muka seperti di pasar, dan kelompok masyarakat.

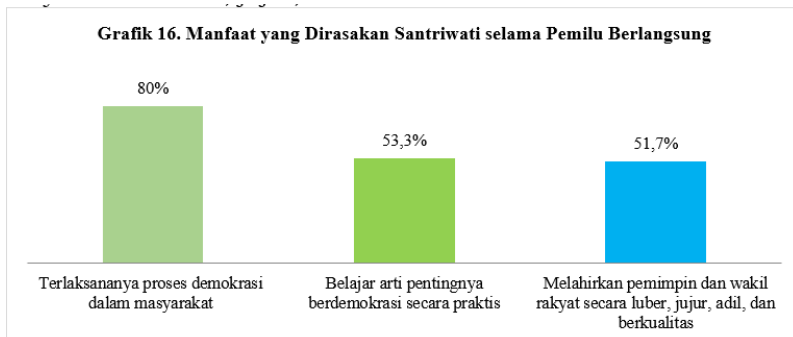
13. Terkait tantangan yang dihadapi dalam pemilu (jawaban lebih dari satu) yaitu 80% santriwati menjawab masih terjadinya politik uang dan kampanye gelap; 65% masih adanya hoax, ujaran kebencian dan politisasi SARA; 15% masyarakat hadir untuk memilih lebih karena pemilihan Paslon presiden-cawapres dibandingkan caleg dan 10% partisipasi perempuan sebagai caleg belum maksimal, seperti lemahnya dukungan pendanaan, proses pencalonan masih secara tertutup, perempuan lebih banyak tersebar di nomor urut 3,5,6 sedangkan 60 persen anggota legislatif terpilih di nomor urut 1.



Menurut informan AIM, partisipasi perempuan masih sedikit. RNM berpendapat bahwa masyarakat banyak datang di TPS karena pemilihan presiden dan wapres. Menurut WS, tantangannya adalah partisipasi perempuan sebagai caleg belum maksimal. Dan ketiga informan sama-sama berpendapat bahwa masih maraknya terjadi politik uang, hoaks, kampanye gelap dan politik SARA.

14. Terkait manfaat yang dirasakan selama pemilu berlangsung (jawaban lebih dari satu) yaitu 80% santriwati menjawab ter-

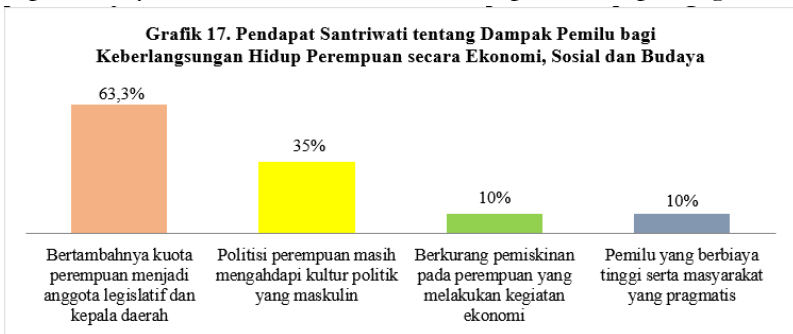
laksananya proses demokrasi dalam masyarakat; 53,3% belajar arti pentingnya berdemokrasi secara praktis dan 51,7% melahirkan pemimpin dan wakil rakyat secara luber, jujur, adil dan berkualitas.



Menurut informan AIM, manfaat yang didapat adanya demokrasi dalam masyarakat dan terpilihnya pemimpin di daerah. Menurut RNM, dapat belajar pentingnya demokrasi dan terlaksananya demokrasi pemilu. Dan, WS merasakan manfaat berupa demokrasi dapat terlaksana di masyarakat, pemimpin yang dipilih secara luber dan adil.

15. Terkait dampak pemilu bagi keberlangsungan hidup perempuan secara ekonomi, sosial dan budaya (jawaban lebih dari satu) yaitu 63,3% santriwati menjawab bertambahnya kuota perempuan menjadi anggota legislatif dan kepala-kepala daerah yang turut memegang peran strategis dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada hak-hak perempuan, 35% politisi perempuan masih menghadapi kultur politik yang maskulin, baik di partai maupun legislatif yang kurang peka dalam memperjuangkan dan memenangkan hak-hak kesejahteraan dan perlindungan perempuan. Sehingga, perempuan masih banyak menghadapi persoalan ke-

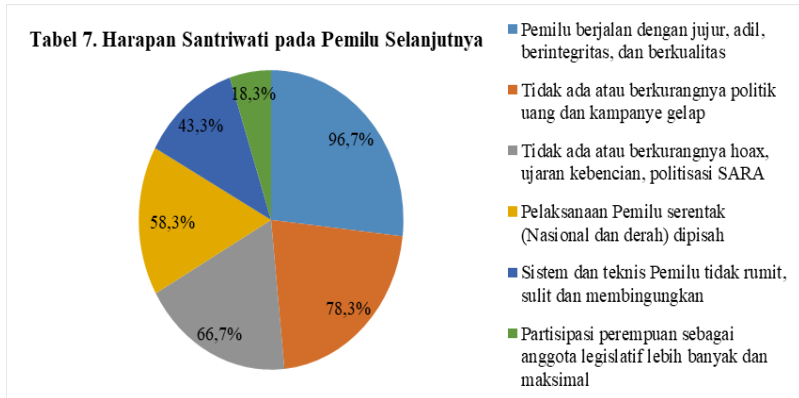
tidakadilan dan pengabaian haknya di bidang kesehatan, ekonomi, dan sektor kehidupan lainnya. Kemudian 10% berkurangnya pemiskinan pada perempuan yang melakukan kegiatan ekonomi baik di pasar atau usaha-usaha kecil menengah, dan mendukung kebangkitan kemajuan ekonomi perempuan untuk pembangunan bangsa dan negara. Dan, 10 % selanjutnya pemilu yang berbiaya tinggi serta masyarakat yang pragmatis masih suka memaklumi terjadinya politik uang menyebabkan agenda keadilan gender dalam sistem kepartaian terabaikan, selain hanya melengkapi keperluan syarat kuota administratif dalam partai maupun legislatif.



Menurut informan AIM, ekonomi perempuan tambah maju dan biaya pemilu mahal. Menurut RNM, dampaknya perempuan banyak yang jadi anggota DPR, gubernur dan bupati. Dan menurut WS, kuota perempuan sebagai anggota legislatif bertambah tapi budaya politik masih maskulin.

16. Harapan santriwati pada pemilu selanjutnya (jawaban lebih dari satu) yaitu 96,7% santriwati menjawab pemilu berjalan dengan jujur, adil, berintegritas dan berkualitas; 78,3% tidak adanya atau berkurangnya politik uang dan kampanye gelap; 66,7% tidak adanya atau berkurangnya hoax, ujaran kebencian dan politisasi

SARA; 58,3% pelaksanaan pemilu serentak (nasional dan daerah) dipisah; 43,3% sistem dan teknis pemilu tidak merumitkan, menyulitkan dan membingungkan serta 18,3% partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif lebih banyak dan maksimal.



Informan AIM berharap berkurangnya politik uang dan hoaks serta pemilu tidak rumit dan membingungkan masyarakat terutama bagi orang tua. RNM berharap pemilu nasional dan daerah dipisah, jadi tidak serentak seperti sekarang, berkurangnya politik uang dan hoaks. Dan, WS berharap pemilu kedepan berjalan dengan lancar, jujur, adil dan berkualitas, berkurangnya politik uang, hoaks dan kampanye gelap, pemilu presiden-wapres, DPR, DPD dipisah dengan DPRD dan pilkada, serta partisipasi perempuan jadi anggota legislatif lebih banyak.

Penutup

Partisipasi politik santri khususnya perempuan santri (santriwati) dalam pemilu merupakan wujud kesadaran pentingnya pengetahuan tentang proses politik (kepemiluan), untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dan *millenial* serta mengurangi angka golput. Par-

tisipasi politik santriwati dalam pemilu tidak hanya memberikan suaranya, namun ikut terlibat dalam kegiatan diskusi atau dialog serta sosialisasi pemilu. Santriwati juga dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, relawan demokrasi, pengawas partisipatif, pemantau pemilu maupun pegiat pemilu. Beberapa pandangan santriwati terkait kondisi, manfaat, tantangan, dampak serta harapan dalam penyelenggaraan pemilu dapat memberikan kontribusi dan masukan terhadap penyelenggaraan pemilu selanjutnya, sehingga menghasilkan pemilu yang jujur, adil, berintegritas dan berkualitas.

ELEGI BURUH: BILIK SUARA DI BALIK PABRIK

Indrias Kristiningrum

Tiap lima tahun sekali, kita menggelar dan melaksanakan pemilu. Sebagai sebuah rutinitas dalam demokrasi, pemilu tak sepenuhnya bisa dipahami dan dirasakan oleh seluruh warga negara. Secara sosiologi pengetahuan meminjam bahasa Karl Manheim memiliki maknanya tersendiri bagi setiap orang yang pernah mengalaminya.

Seorang pakar yang terbiasa dengan dunia akademik akan memiliki pandangannya sendiri. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar memiliki pandangan tersendiri, termasuk orang-orang pinggiran disekitar kita memiliki pandangannya tersendiri pula.

Seorang Pakar yang cukup terkenal, Ali Moertopo memberikan pandangan, bahwa pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan UUD 1945. Pemilu adalah sarana memilih wakil rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Dilihat dari sudut pandang mahasiswa sebagaimana yang saya kutip dari *"kompasiana.com"*, pemilu 2019 merupakan pemilihan legislative dengan pemilihan presiden diadakan secara serentak. Tentu saja berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU 11/2013 tentang pemilu serentak yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan

pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintah.³⁷

Pertanyaannya lalu, akankah pesta demokrasi ini juga dirasakan oleh orang-orang pinggiran. Oleh para perempuan yang bekerja menjadi buruh pabrik? Jangan-jangan tafsir terhadap pemilu hanya menjadi komoditas diskusi kaum elite, intelektual, kelompok mahasiswa saja? Kaya di tataran diskusi, miskin dalam implementasi. Esai ini akan memotret tentang 2 buruh pabrik dalam mengenal pemilu dengan segala pengalamannya di bilik suara.

Kisah Buruh dari Kota Onde-Onde

Saya mencoba menelusuri dengan lebih seksama untuk lebih mengenal pandangan buruh pabrik perempuan di Mojokerto. Sengaja saya menemui Yudhi Fajar Herdiastutik. Seorang perempuan yang lahir di Mojokerto pada 1965. Usianya memang cukup tua, namun semangatnya selalu muda. Di usianya yang telah menginjak 55 tahun ini, ia adalah janda sejak usia 35 tahun. Bayangkan saja, sudah 20 tahun menjanda dan harus menghidupi dua orang anak.

Getir hidup sebagai buruh pabrik puluhan tahun menjadi gambaran bagaimana orang-orang pinggiran menenun hidupnya untuk terus bisa survive menaklukan dunia dengan segala kemampuannya, dengan sehumat hormatnya.

Bu Yudhi harus kuat membiayai dua anaknya. Anak lanangnya, Bobby Oktavianus Nugraha, usia 15 tahun yang bersekolah di SMK Raden Patah Kota Mojokerto Kelas 1. Sementara anak wedoknya,

³⁷ Diakses dari

<https://www.kompasiana.com/dini78707/5c9c825f3ba7f70ff21382b2/pendapat-mengenai-pemilu-2019#> pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 11.20 WIB



Dyan Ayu Frebriyanti, 11 tahun yang bersekolah di SMP Negeri 2 Kota Mojokerto.

Sebelum menjadi buruh, Bu Yudhi adalah seorang penjahit. Menerima segala bentuk pesanan baju untuk semua kalangan. Ia lalu mencoba peruntungan dengan malamar di PT Inti Dragon Suryatama. Kala itu, perusahaan tersebut memang membutuhkan perempuan untuk bisa menjahit sepatu.

Akhirnya pada tahun 1999, Bu Yudhi diterima dan bekerja sebagai penjahit sepatu. Sebagai pekerja awal, Bu Yudhi atau yang biasa dipanggil juga dengan Bu Yayuk dipekerjakan sebagai tenaga borongan jahit sepatu. Lalu karena kerjanya cukup bagus, akhirnya diangkat sebagai kepala group dengan membawahi 50 pekerja.

“Jarak antara rumah dengan pabrik itu sekitar 5 km. Saya naik sepeda ontel ke pabrik. Saya harus semangat, demi anak anak,” tuturnya.

Menjadi janda memang tidak mudah. Harus membagi waktu untuk kerja dan keluarga. Hari demi hari beliau lalui dengan aktivitas rutin. Beliau berangkat kerja pukul 06.00.wib pulang kerja pukul 17.00. Terkadang hari minggu beliau harus lembur.

Belum lagi dengan usahanya sendiri sebagai penjahit, Bu Yudhi harus benar benar memanfaatkan waktu untuk melayani pelanggan pelanggannya demi penghasilan tambahan untuk merawat dan membesarkan anak anaknya. Kini setelah kurang lebih 21 tahun sebagai pekerja di perusahaan, Bu Yudhi lalu menjadi Kepala Seksi (Kasi) dengan 250 orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Di usianya yang sudah kepala lima, Bu Yudhi memiliki cerita panjang singgungannya dengan pemilu. Ia memiliki cinta yang sama terhadap Indonesia. Bu Yudhi selalu aktif dalam perhelatan pemilu.

seudah 9 kali ia mengikuti pemilu. Sejak tahun 1982 atau saat usia 17 tahun, Bu Yudhi telah ikut berpartisipasi dalam pemilu.

Masih terekam dalam ingatannya kala itu ia ikut memilih di bilik suara. Hingar bingar pemilu pernah ia ikuti. Bu Yudhi pernah terlibat kampanye di Alun Alun Kota Mojokerto. Kala itu tak ada visi misi calon. Yang ada hanya ajakan untuk memilih gambar. Hanya ada umbul umbul, setelah itu makan dan pulang.

Pengalaman lainnya saat Bu Yudhi mengikuti kampanye pemilu pada tahun 2019. Tidak sama dengan kampanye sebelumnya yang dilakukan di alun alum Kota dengan pengerahan massa yang besar, kampanye pada tahun 2019 dari peserta pemilu dilakukan langsung ke perusahaan tempatnya bekerja.

“Saat itu yang hadir hanya Tim Kampanye. Langsung melakukan pemeriksaan dan pengobatan secara gratis. Setelah diperiksa diberi bahan kampanye berupa kalender dan MUG yang bergambar. Padahal kami ingin bertemu dan berkomunikasi langsung dengan calon itu. Sehingga bisa menilai dan memilih yang terbaik untuk kami,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, hingga kini Bu Yudhi juga menyampaikan bahwa beliau masih belum mengetahui keberadaan Badan Pengawas Pemilu yang kini sudah permanen. Ia hanya memahami bahwa penyelenggara pemilu adalah KPU dan Bawaslu adalah bagian dari KPU.

Sebagai perempuan yang tiap harinya lebih akrab dengan sepatu, pabrik dan perjuangan untuk menghidupi keluarganya, Bu Yudhi sama sekali belum memahami perihal Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang tugas Bawaslu untuk pencegahan, pengawasan, penindakan dan sengketa proses. Sama sekali tak pernah mendengarnya.



Dari waktu ke waktu memberikan pilihan dalam Pemilu, Bu Yudhi menyadari bahwa dalam proses demokrasi untuk memilih anggota legislative dan eksekutif selalu ada potensi politik uang yang dilakukan. Baginya, politik uang adalah mempengaruhi seseorang pemilih dengan materi. Baik itu sembako maupun dengan uang tunai.

“Saya sangat tidak setuju dengan politik uang. Politik uang itu bikin pemilu tidak sehat. Akhirnya menjadi pemicu munculnya korupsi,” paparnya.

Bu Yudhi adalah segelintir perempuan pinggiran yang jarang tampil ke ruang public. Hanya saja sikapnya jelas perihal politik uang. Sehingga ia dengan tegas menolak praktek busuk yang merusak demokrasi tersebut. Suara suara di balik kerasnya pabrik seperti Bu Yudhi adalah suara suara yang berasal dari nurani perempuan pinggiran untuk melihat Indonesia bebas korupsi. Tak ada politik uang dalam pemilu dan bersih dari korupsi. Bu Yudhi ingin Indonesia maju.

“Banyak sekarang orang memilih bukan berdasarkan visi dan misi. Namun berdasarkan apa yang diberikan saat kampanye. Saya janda, tetapi saya tidak setuju dengan praktek money politik,” tuturnya lagi.

Maraknya politik uang yang berkembang dalam kontestasi pemilu menimbulkan kajian dari pengamat pemilu. Secara definitif, politik uang bermakna suap arti suap.³⁸ Suap itu diberikan dalam rangka mempengaruhi pilihan politik. Tentu saja, ada yang terpengaruh dan juga tidak.

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Kedua, 1994), 965.

Jurus politik uang dilakukan tampaknya karena beberapa hal penting. *Pertama*, dalam sistem demokrasi dan pemilihan legislative berdasarkan suara terbanyak antar calon dalam satu partai, politik uang adalah upaya untuk menang selisih suara dari rival satu calon dalam satu partai. Hal ini merupakan imbas daripada kebijakan bahwa suara terbanyak menjadi pemenang. Kebijakan ini merubah dari sistem suara urut dalam satu partai.

Kedua, sasaran dalam politik uang adalah pemilih mengambang. Yakni pemilih yang sebenarnya tidak memiliki jago dan juga belum tertarik dengan pemilu. akhirnya siapa yang memberikan uang, akan datang untuk memilih ke dalam bilik suara.

Ketiga, praktek politik uang banyak juga terjadi dalam lingkungan yang akses pengetahuan pemilu rendah. Hal ini dikarenakan tidak mengerti bahwa politik uang merupakan suatu pelanggaran yang cukup besar dan bertentangan dengan pemilu. karena tidak tahu bahwa politik uang melanggar, akhirnya dipersepsikan sebagai suatu yang benar.

Keempat, sasaran lainnya dari praktek politik uang adalah pemilih pemula yang baru mengenal demokrasi. Bibit idealism dari anak muda yang diharapkan bisa menjadi masa depan Indonesia maju harus dipaksa dan dirusak oleh praktek politik uang. Hal ini tentu saja akan melahirkan apatisme dan krisis kepercayaan anak anak muda sebagai pemilih pemula terhadap masa depan demokrasi di Indonesia.

Dalam prakteknya, senyampang kami sebagai penyelenggara pemilu, bahwa bentuk bentuk cara untuk mempengaruhi beragam. Sektor sektor yang dimasuki juga banyak. Dalam masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan.



Pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang. Berbentuk fasilitas umum politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat didaerah pemilihannya.

Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga sebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “*jariyah politis*” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. Instrument yang dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan semen, pasir, besi, batu dan sebagainya. Fasilitas dan sarana umum yang biasa dijadikan *Jariyah Politis*, yaitu: Pembangunan Masjid, Mushalla, Madrasah, jalan-jalan kecil (gang-gang), dan sebagainya.

Strategi *Money Politic*³⁹ yaitu Serangan fajar. Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

³⁹ Dedi Irawan, “Studi Tentang Politik Uang (*Money Politic*) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (Maret, 2015), 3-4.

Yang kedua yaitu mobilisasi massa mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak.

Dalam hal inilah biasanya terjadi fenomena pembelian pengaruh, dengan instrumen para tokoh masyarakat yang dijadikan *vote getter* untuk mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini mau mengikuti kampanye dengan cuma-cuma. Sebagian masyarakat meminta uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar dan sebagainya.

Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 politik uang merupakan sesuatu yang dilarang. Ada ancaman pidana yang jelas terhadap pelaku politik uang. Namun hingga kini kesadaran masyarakat yang masih lemah dan juga kerakusan para aktor kekuasaan untuk bisa menang dengan segala cara tetap menorobos undang undang yang ada. Hal ini tentu saja sangat memperhatikan dan menjadi catatan tersendiri untuk masa depan demokrasi di Indonesia.

Karena pada dasarnya, praktek politik uang untuk merebut posisi dengan mengatasnamakan demi rakyat sebenarnya hanya demi kekuasaan dan kepentingan diri dan kelompoknya (Didik Supriyanto). Yang mengerikan, bahwa intensitas politik uang bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara. (Tjahjo Kumolo; 2015)⁴⁰

⁴⁰ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2015), 155



Perempuan sebagaimana Bu Yudhi harus bersuara ke ruang public. Menyuarakan dan menularkan pengetahuan dan kesadarannya terhadap perempuan lainnya. Karena Bu Yudhi adalah perempuan yang mengerti dan menolak politik uang. Meski bekerja di pabrik, namun kepekaannya untuk tidak menerima uang dalam pemilu layak dijadikan teladan oleh perempuan yang lain.

“Saya tidak tahu bagaimana caranya melapor tentang politik uang ini,” ungkap Bu Yudhi.

Selepas cerita cukup lama tentang kisah hidupnya dan pandangan pandangnya, Bu Yudhi menyampaikan bahwa keberadaan Bawaslu cukup penting untuk mengawasi jalannya tahapan Pemilu. Sehingga Pemilu bisa terlaksana dengan bersih dan demokrasi bisa ditegakkan sesuai dengan peraturan yang ada.

“Bawaslu harus lebih inten menyosialisasikan undang undang yang ada agar masyarakat tahu dan padam. Sehingga sehingga masyarakat dapat lebih pandai dalam menentukan pilihannya,” pungkasnya.

Pertemuan kami dengan Bu Yudhi adalah sebagaimana musafir ditengah gurun tandus atas nama krisis kepercayaan terhadap pemilu dan masa depan, lalu ditengah gurun tersebut bertemu dengan oase sejuk berisi harapan, masa depan dan mimpi mimpi tentang demokrasi yang bebas korupsi dan politik uang. Oase itu kami teguk airnya dan kami jadikan sebagai oabt dari haus yang selama ini kami rasa.

Kami bertemu dengan saudara satu nurani. Kami sebagai penyelenggara pemilu di Bawaslu, sementara Bu Yudhi adalah bagian dari perempuan yang harus terus disiram oleh semangat dan perhatian agar terus tumbuh dan mekar dihatinya untuk sama sama melawan terhadap politik uang. Para perempuan pinggiran, sudah saatnya bergerak, bangun, menentukan suara dibalik suara walaupun berada di

balik pabrik. Satu perempuan harus menularkan kepada perempuan lainnya. Bahwa kita ada untuk Indonesia.

Cerita Buruh Ajinomoto

Sekali lagi, bahwa tafsir pemilu tak pernah tunggal. Bu Yudhi dan Desy sama sama bekerja di pabrik. Namun beda kepala, beda juga makna pemilu. Desy Rohmawati lahir tanggal 29 desember 1991. Menikah Dedy Eky Rismanandi pada tanggal 26 Mei 2012 dan dikaruniai dua anak perempuan. Pertama bernama Calyssta Desky Stevia, lahir pada tanggal 05 Desember 2012 dan anak kedua bernama Clarissa Desky Rahmahani yang lahir pada tanggal 08 juni 2017.

Desy Rohmawati adalah seorang karyawan Pabrik PT. Ajinomoto yang berada di jalan raya Mlirip No 19. Ia bekerja di perusahaan Ajinomoto sejak 15 april 2012. Sudah hampir 8 tahun dia mengabdikan diri menjadi seorang pekerja pabrik. Awal bekerja sebagai admin. Pada tahun 2015 dipindah di Kantor Utama sebagai *Procurement*.

Dalam seminggu Desy Rohmawati bekerja 5 hari sejak Senin-Jumat. Mulai jam 07.00- 16.00. Tetapi terkadang hari Sabtu lembur dengan besaran gaji sesuai UMK Kabupaten Mojokerto. Selain untuk memiliki penghasilan sendiri, tujuan dia bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga.

Dengan usianya yang masih muda yaitu 29 tahun, Desy Rohmawati mempunyai jiwa nasionalis yang tinggi. Dia menyampaikan bahwa dia sangat mendukung dengan adanya Pemilu secara langsung. Karena rakyat diberikan kesempatan untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya secara langsung sesuai dengan hatinuraninya.



Yang dia tahu bahwa di Indonesia sudah ada lembaga yang mengurus masalah pemilu yaitu Bawaslu. Tetapi dia masih belum mengerti tentang larangan-larangan pada saat proses pemilu itu berlangsung.

Desy rohmawati adalah seorang pekerja pabrik dan ibu ramah tangga yang mana dia tidak memahami sama sekali tentang dunia politik. Tetapi meskipun begitu dia mempunyai harapan yang besar terhadap para pemimpin yang terpilih agar para pemimpin lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

Desy rohmawati pun mempunyai pendapat yang sama dengan Bu Yudhi tentang politik uang.

“Menurut saya dengan adanya praktik money politik akan mengakibatkan pemimpin yang terpilih melakukan korupsi. Karena para calon tersebut telah banyak mengeluarkan biaya pada saat kampanye,” ungkapnya.

Biaya politik bisa bermakna ongkos politik dan politik uang. Ini tentu saja berbeda. ongkos politik merupakan suatu yang wajar dikeluarkan untuk kepentingan kampanye. Namun politik uang adalah cara mempengaruhi pemilih dengan cara memberikan sejumlah materi. Beda halnya dengan ongkos politik sebagai biaya yang melekat. Termasuk dalam ongkos politik adalah pengadaan baner, umbul umbul, stiker dan sejenisnya untuk kepentingan sosialisasi dan kampanye.

Ongkos politik sudah cukup besar. Belum lagi bilamana ada yang berani menggunakan politik uang, tentu saja biayanya akan lebih mahal. Untuk balik modal, muncul dugaan bahwa pelaku praktek politik uang akan korupsi saat memiliki jabatan.

Akhirnya...

Cerita di atas adalah sepenggal cerita dari perempuan yang merupakan bagian dari rakyat pinggiran yang telah berani mengungkapkan pendapatnya tentang Pemilu. Banyak Perempuan yang mempunyai profesi sebagai seorang pekerja pabrik, tetapi tidak semua berani dan mau mengungkapkan pendapatnya tentang Pemilu, UUD 1945 merupakan landasan Konstitusional dan merupakan norma hukum tertinggi di Indonesia.

Padahal dalam UUD 1945 pasal 28 E ayat 3 yang berisi bahwa;
Setiap orang yang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Suara perempuan pinggiran adalah suara rakyat yang harus didengar dan dipahami. Suara perempuan tersebut asli berasal dari nurani yang terdalam, sehingga perlu untuk dicermati dengan seksama dan diwujudkan dengan sebaik baiknya.

Politik dalam Benak Dua Perempuan Pengemudi Ojek *Online*

Dian Pratmawati

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, tidak hanya Pemilu terbesar di republik ini, namun juga Pemilu terbesar di dunia. Sebab, pelaksanaannya sangat rumit sepanjang sejarah Pemilu baik di Indonesia maupun dunia. Bagaimana tidak, pemilih harus mencoblos 5 (lima) surat suara sekaligus di bilik suara (kecuali Pemilu di DKI Jakarta, hanya mencoblos 4 (empat) surat suara yaitu DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Calon Presiden – Wakil Presiden).

Untuk pemilih, total berjumlah sekitar 192 juta (dalam negeri dan luar negeri). Dari jumlah tersebut, 51% adalah pemilih perempuan. Hal ini menunjukkan perempuan memiliki peranan besar dalam partisipasinya menjadi pemilih cerdas pada pesta demokrasi terbesar dan terlama pelaksanaannya kemarin. Bagaimana tidak lama, karena para pejuang demokrasi di bawah, sebagai ujung tombak pelaksanaan, yaitu KPPS dan Pengawas TPS harus bekerja sekitar 24 jam, bahkan lebih, tanpa jeda alias *nonstop*. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang gugur karena kelelahan.

Diantara para pejuang demokrasi itu, beberapa diantaranya adalah kaum perempuan. Salah satunya adalah anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 06 RT 04 RW 04 Dusun Slempit Desa Mojokusumo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto bernama Fitri (40 Tahun). Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai *driver ojek online (ojol)* ini, masih mau berperan aktif sebagai penyelenggara Pemilu demi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Hasil Pemilu lima tahunan ini berpengaruh positif bagi para rakyat



kecil dan kaum perempuan, khususnya perempuan yang senasib dengannya. Dimana Fitri sejak beberapa tahun terakhir menjadi tulang punggung keluarganya.⁴¹

Lain lagi dengan Ita (46 Tahun), perempuan sebagai pengurus Partai Politik (Parpol), yang juga berprofesi sebagai *driver ojol*. Semangat dia masuk sebagai pengurus Parpol, sama, ingin memperjuangkan hak-hak kaum perempuan dan rakyat kecil lainnya. Berharap, setelah aktif di partai, dirinya lebih mudah memperjuangkannya⁴².

Dua perempuan di atas, adalah sedikit dari sekian banyak perempuan di Indonesia yang berpartisipasi aktif dalam politik. Satu berperan sebagai penyelenggara Pemilu, satu lagi berperan sebagai peserta Pemilu yaitu sebagai pengurus Parpol. Dalam bahasa sederhana, mereka sudah melek politik, dibandingkan perempuan lainnya yang terkadang acuh terhadap perpolitikan tanah air. Hal ini positif, mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang berpartisipasi dalam Pemilu, khususnya pemilih, adalah kaum perempuan. Karena itu, perempuan harus memberi warna tersendiri dalam perpolitikan Indonesia masa depan.

Partisipasi merupakan komponen utama dalam sebuah negara demokrasi, hal ini dibuktikan dengan adanya ketertarikan masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses demokrasi di Indonesia. Partisipasi perempuan dalam sektor politik, dengan melibatkan diri pada proses-proses Pemilu ada di dalamnya. Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu

⁴¹ Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020

⁴² Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020



dengan jalan memilih pemimpin Negara. Hasil dari partisipasi tersebut, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan politik berikutnya. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam Pemilu, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen, dan sebagainya (Budiardjo: 2008)⁴³. Hemat penulis, untuk melengkapi pernyataan Budiardjo tersebut, termasuk juga menjadi penyelenggara Pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi nyata dalam politik, yaitu sebagai pejuang demokrasi. Karena, politik di Negara ini harus berjalan dalam rel demokrasi. Kaum perempuan, yang menjadi kaum mayoritas di bangsa ini, merupakan aset utama duta-duta demokrasi masa depan. Sehingga untuk mewujudkan demokrasi yang bermartabat, salah satunya ada di pundak kaum perempuan.

Fitri, Sambil Ngojek Ya KPPS Juga

Fitri (39 Tahun) begitulah orang memanggilnya, satu dari ribuan bahkan jutaan wanita tangguh Indonesia. Bagaimana tidak, sejak berpisah dengan suaminya, ia harus menjadi ibu sekaligus kepala keluarga. Hidup di wilayah pinggiran Kabupaten Mojokerto, bersama satu orang putri yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) dan seorang ibu yang harus ia rawat karena sudah tua dan sakit-sakitan.

Menjadi *driver ojol* bukanlah tujuan hidupnya. Sejak anak semata wayangnya mulai menginjak bangku SD, ia terpaksa rela meninggalkan pekerjaan lamanya sebagai tenaga administrasi di salah satu Kantor di Surabaya, karena harus pulang ke kampung halamannya di

⁴³ Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (Revisi ed)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto untuk menemani sang anak yang mulai remaja. Semangat dan kebiasaan kerja yang ia bawa sejak muda menjadikannya perempuan tangguh yang tidak hanya memangku tangan dan menggantungkan diri pada pendapatan suami yang kala itu masih serumah.

Juli 2017, berawal dari informasi lowongan *driver ojol* yang ia dapat dari salah satu sosial media kala itu. Hanya bermodalkan tekad, tanpa membawa satupun berkas dan data diri, ia memberanikan diri mencoba mendaftarkan diri menjadi salah satu *driver ojek online* terbesar saat ini. Usahanya tidak sia-sia, ia mendapat nomor urut pendaftaran 79 dan menjadikannya *driver ojol* perempuan pertama di Kota Mojokerto.

Fitri menjadikan pekerjaannya menjadi *driver ojol* sebagai pekerjaan sampingannya, karena sesekali ia harus membuat dan berjualan kue jika memang ada pesanan.

“*Itung-itung* membantu suami dalam memenuhi kebutuhan hidup,” ucapnya dengan nada rendah.

Berangkat pagi pulang sore karena harus menjemput anaknya di sekolah. Dengan penghasilan Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 perhari, dirasa cukup baginya. Lagi pula saat itu masih ada suami yang mencukupi kebutuhan mereka. Namun, semenjak berpisah dengan suami, tidak ada pilihan lain kecuali menjadikan profesi *driver ojol* sebagai mata pencaharian utama. Sempat terfikir olehnya untuk kembali ke Surabaya dan bekerja menjadi tenaga administrasi atau pekerjaan lain seperti dulu, akan tetapi keadaan membuat ia harus mengurungkan niatnya tersebut. Disamping karena umur yang sudah tidak muda lagi, ia juga harus menemani dan merawat anak semata wayangnya di rumah, belum lagi harus menjaga ibunya yang sudah mulai menua dan sakit-sakitan.



Masih banyak masyarakat yang melihat sebelah mata tentang profesi *driver ojol*, apalagi jika profesi itu dilakukan oleh seorang perempuan. Terlepas dari penilaian orang tentang pekerjaannya, ia selalu mengajarkan kepada anaknya untuk tidak malu mempunyai ibu yang seorang *driver ojol*. Baginya *driver ojol* bukanlah pekerjaan yang memalukan, selagi pekerjaan itu baik maka tak perlu malu untuk mengakuinya.

Selama menjadi *driver ojol* ia mengaku tak pernah mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan, baik dari sesama rekan *ojol* maupun pelanggannya.

“Kekhawatiran sih ada, tapi mau bagaimana lagi, yang penting pintar-pintar jaga diri saja,” kata perempuan berkulit kuning langsung ini.

Untuk mengantisipasi, Fitri mengaku selektif dalam memilih pelanggan. Tidak jarang ia harus menolak calon penumpang laki-laki jika memang dirinya merasa tidak nyaman dengan calon penumpangnya.

“Main *feeling* saja, kalau saya dapat orderan penumpang laki-laki dan merasa *nggak* pas ya *nggak* saya terima,” akunya.

Jika mendapat pelanggan laki-laki, tak jarang ia bertanya terlebih dahulu akan kesediaan pelanggan untuk dibonceng. karena ia sadar tidak semua pelanggan (laki-laki, red.) rela dibonceng oleh perempuan.

Dibalik profesinya sebagai *driver ojol*, Fitri juga mengikuti perkembangan politik sejauh yang mampu ia tangkap. Hal itu ia buktikan dengan keterlibatannya sebagai anggota KPPS dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 dan pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pileg dan Pilpres) Tahun 2019 lalu. Fitri menepis anggapan bahwa bukan hanya para

intelektual dan akademisi saja yang bisa terlibat dalam pesta demokrasi, perempuan pinggiran dengan profesi *driver ojol*-pun bisa melakukannya, hal itu ia buktikan sendiri dengan menjadi penyelenggara Pemilu.

Berbicara tentang penyelenggara Pemilu, ia mengakui minimnya pengetahuan tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilu seringkali bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka tidak dengan DKPP. Sesuai fungsinya, DKPP dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, baik itu anggota KPU maupun anggota Bawaslu. Melihat dari fungsi DKPP tersebut, mungkin hanya para intelektual, penyelenggara Pemilu dan orang-orang yang berpolitik praktis yang terbiasa bersinggungan langsung dengan lembaga penyelenggara Pemilu satu ini.

Dari pengalamannya menjadi KPPS, ia mengaku bahwa Pemilu serentak 2019 merupakan yang terberat dan melelahkan baginya. Bagaimana tidak, karena Pemilu 2019 merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD) dilaksanakan bersama dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Hal itu ia rasakan ketika harus berangkat sangat pagi demi mempersiapkan pesta demokrasi pada 17 April 2019 lalu. Belum lagi rumitnya proses penghitungan yang disebabkan banyaknya jenis dan jumlah surat suara yang menjadikan ia harus bermalam di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan pulang di esok harinya, terhitung sekitar 24 jam lebih ia bertugas saat itu.



“*Saking* ruwetnya Pemilu 2019 kemarin, saya sampai pulang jam 08.00 keesokan harinya. Saya *kapok* mbak kalau harus bertugas lagi seperti Pemilu 2019 lalu, benar-benar melelahkan,” ungkapnya sambil menggelengkan kepala.

Dalam hal pilihan politik, perempuan asal Kemlagi ini tak pernah sekalipun memilih untuk menjadi Golongan Putih (Golput) baik dalam Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ia paham betul akan hak politiknya yakni hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Tidak peduli apa status dan pekerjaannya, kaya atau miskin, laki-laki ataupun perempuan, semua mempunyai hak suara yang sama dalam Pemilu dan dijamin oleh Undang-undang. *One man one vote* (satu orang satu suara). Bahkan seorang *driver ojol* seperti Fitri pun berhak menentukan pilihannya dalam Pemilu.

Isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yang berkebaruan di jagat dunia maya tak membuat pilihan politik Fitri berubah, karena ia tahu politisasi SARA hanyalah isu gorengan yang di buat oleh orang yang berkepentingan. Dari pada memikirkan urusan SARA yang dipolitisasi oleh segelintir orang yang tak bertanggung jawab, ia lebih tertarik untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

“Kalau di lingkungan saya sendiri selama Pemilu 2019 kemarin, *nggak* ada sih isu-isu SARA, cuman dengar-dengar kabar lewat *sosmed* aja, itupun tidak saya hiraukan, dari pada mikirin isu-isu seperti itu mending kerja buat menuhin kebutuhan,” katanya.

Dibalik pilihan politiknya, Fitri menaruh harap kepada pemimpin terpilih agar benar-benar memperhatikan nasib rakyat kecil seperti dirinya lewat kebijakan publik yang dibuat.

“Saya sih cuman berharap Caleg atau Presiden yang terpilih di Pemilu 2019 kemarin, dapat amanah, kerja sesuai janji kampanyenya, dan yang penting memperhatikan nasib rakyat-rakyat kecil seperti kita ini,” harapnya.

Ita, *Ojol* dan Partai Politik

Selain Fitri, ada juga perempuan tangguh lain yang seprofesi dengannya sebagai *driver ojol* di wilayah Kota Mojokerto. Ita (36 Tahun) begitulah teman-teman *ojol* memanggilnya. Perempuan kelahiran Aceh 1974 itu mengawali karirnya sebagai *driver ojol* sejak Oktober 2017. Ita merupakan istri dari pensiunan Marinir asal Kota Mojokerto dengan dua orang anak yang sudah tumbuh dewasa. Sebenarnya tiga, hanya saja Tuhan berkehendak lain. Tahun 2016, ia harus merelakan kepergian putra pertamanya yang saat itu berumur 22 tahun, disebabkan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Probolinggo sehingga menyebabkan putranya meninggal dunia.

Mungkin banyak orang-orang di sekitarnya beranggapan bahwa sebenarnya kehidupan Ita sudah lebih dari cukup bila dibandingkan dengan rekan-rekan sesamanya. Terbukti dengan status suaminya yang merupakan seorang pensiunan Marinir, belum lagi saat ini suaminya masih aktif sebagai supervisor di *Aviation Security* (Avsec) Angkasa Pura Surabaya.

“Ya kalau di bilang cukup ya cukup Alhamdulillah, tapi namanya kehidupan dan kebutuhan kan gak ada orang yang tahu, *sawang sinawang*,” ungkap Ita.

Ita merupakan sosok pekerja keras, sebagai seorang perempuan ia tergolong sosok yang tegas dan berani. Sebelum ia memutuskan terjun sebagai *driver ojol*, ia adalah seorang senior driver di salah satu perusahaan transportasi roda empat di Jakarta. Tidak tanggung-



tanggung, selama 20 tahun lamanya ia berprofesi menjadi driver di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Jauh dari anak-anak, berangkat subuh pulang malam, serta pengalaman manis dan pahit sudah biasa ia alami saat masih menjadi *driver* di kota metropolitan tersebut.

Setelah suami pensiun dari Marinir, ia pun mengikuti suami untuk kembali ke kampung halamannya di Kota Mojokerto. Hingga akhirnya kejadian *naas* yang di alami putra sulungya itu pun terjadi. Kesedihan yang amat dalam ia rasakan. Bagaimana tidak, anak yang dulu 9 bulan ia kandung dan besarkan kini telah pergi mendahuluinya, menghadap kepada-Nya. Hari berkabung itu pun berlalu, namun kejadian itu menyisakan rasa tersendiri bagi Ita. Saat suami dan anak-anak sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, dalam kesendirian ia masih seringkali memikirkan dan melamun akan putra sulung yang telah lama pergi. Hingga terfikirkan olehnya untuk mencari kesibukan agar kesedihan yang ia alami tak lagi memenuhi pikirannya.

Oktober 2017, Ita mulai aktif menjadi *driver ojol* di Kota Mojokerto. Ia jadikan profesi ojol sebagai pekerjaan sampingannya.

“Dari pada hanya berdiam diri di rumah dan *ngelamunin* anak yang sudah *nggak* ada, mending cari kesibukan,” ujarinya.

Mengawali karir sebagai *driver ojol* bukanlah hal sulit baginya. Tak heran, sebab ia sudah terbiasa hidup sebagai *driver* transportasi roda empat di jalanan Ibu Kota Jakarta.

“Kalau Kota kecil kayak Mojokerto sih kecil, gak ada apa-apanya sama Jakarta,” ucapnya disambut tawa teman-teman sesama *ojol*.

Sama halnya dengan Fitri, Ita pun mengajarkan kepada anak-anaknya untuk tidak malu mempunyai orang tua dengan profesi atau pekerjaan apapun selagi itu tidak merugikan orang lain (baik/ halal), tak terkecuali *ojek online*.



“*Nggak* perlu malu punya orang tua *ngojek*, ojek pekerjaan baik, pekerjaan halal,” ucap Ita seraya mengingat-ingat nasehat yang pernah ia ucapkan pada anak-anaknya.

Pernah suatu ketika anak perempuannya mendapatkan ejekan dari teman-teman sekolah perihal profesi ibunya sebagai *driver ojol*. Ia terpaksa harus mendatangi dan menjelaskan sendiri kepada teman-temannya untuk tidak lagi memandang sebelah mata akan profesinya itu. Ia tidak mau anak bungsunya menjadi korban *bullying* atau diskriminasi hingga mengganggu psikisnya. Tegas dan berani karena benar mungkin kata yang cocok untuknya.

Mencari nafkah dengan menjadi *driver ojol* tak selalu berjalan sesuai harapan, Ita paham betul akan resiko profesi yang ia jalani, apalagi untuk seorang perempuan. Pernah sesekali ia harus mendapati penumpang laki-laki yang usil. Namun ia akui selama ini keusilan penumpang-penumpangnya masih dalam batas wajar. Belum lagi pengalaman pahit ketika ia harus mengantarkan penumpang ke daerah pelosok saat malam hari dengan akses jalan tanpa penerangan.

“Pengalaman paling tidak menyenangkan selama saya *ngojek*, ketika malam hari saya harus mengantarkan penumpang ke daerah pelosok, dan akses jalan kesana sangat minim penerangan, sekitar jam 10 malam waktu itu, saya sampai kedinginan di jalan, dan esoknya saya baru tau kalau jalan akses ke sana itu kuburan, waduh merinding saya kalau ingat,” ceritanya.

Disamping pengalaman-pengalaman pahit yang ia rasakan selama menjadi *ojol*, siapa sangka, perempuan berdarah Aceh itu merupakan pengurus aktif di salah satu partai politik di Ranting Gedongan Kota Mojokerto, tercatat aktif sejak Tahun 2017 hingga sekarang. Tujuan Ita bergabung dengan partai politik tidak lain untuk membantu



memperjuangkan hak-hak rakyat miskin yang selama ini kurang mendapat perhatian.

“Saya gabung parpol tujuannya hanya ingin membantu warga-warga miskin yang selama ini kesulitan mendapatkan haknya, tidak ada tujuan lain,” paparnya semangat.

Salah satu upaya yang pernah ia lakukan yakni membantu beberapa warga Gedongan yang kala itu kesulitan untuk mendapatkan haknya.

“Pernah waktu itu saya membantu beberapa warga Gedongan yang dipersulit untuk mendapatkan raskin, bayangkan saja, orang yang sudah tidak mampu secara ekonomi, tidak punya kendaraan sendiri, disuruh bolak-balik sampai tiga kali dengan jarak yang cukup jauh,” tuturnya sedikit kesal.

Raskin (beras miskin) adalah sebuah program bantuan pangan bersyarat diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia berupa penjualan beras di bawah harga pasar kepada penerima tertentu. Entah karena masalah teknis atau birokrasi yang kaku menyebabkan beberapa warga Gedongan harus lebih sabar untuk mendapatkan haknya. Berbagai upaya Ita lakukan, hingga akhirnya ia harus menemui secara langsung pejabat yang berwenang terkait hal itu. Upayanya tidak sia-sia, hanya dalam selang waktu tiga hari, beberapa warga miskin tersebut akhirnya mendapatkan haknya.

Selain itu, sepak terjangnya dalam politik ia buktikan sendiri dengan ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan menjadi koordinator saksi partai politik di wilayah Kelurahan Gedongan pada gelaran Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 lalu.

Selama menjadi koordinator saksi partai politik, Ita mengaku, Pemilu serentak 2019 merupakan gelaran pesta demokrasi terberat yang pernah dialaminya. Sebab ia harus mengawal suara parpol dan

mengkoordinir saksi parpol di seluruh TPS yang tersebar di Kelurahan Gedongan. Belum lagi kompleksitas permasalahan yang muncul saat proses pungut-hitung berlangsung membuat ia harus bermalam dan pulang ke esok harinya.

“Kalau berbicara soal Pemilu, ya pasti Pemilu 2019 kemarin yang paling berat dan melelahkan, saya sampai harus pulang jam 4 sore esok harinya,” jelasnya.

Ita menilai, banyaknya jenis dan jumlah surat suara (legislatif dan eksekutif) yang harus dipungut dan dihitung menyebabkan permasalahan-permasalahan itu muncul. Tidak efektif dan optimal, kata itu yang ia ungkapkan untuk menilai pelaksanaan Pemilu serentak 2019 kemarin.

Dalam Pemilu hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara, tidak peduli suku, ras, kekayaan, agama dan profesi. Semua punya hak yang sama yang di atur dalam undang-undang, tidak terkecuali *ojol* seperti Ita. Setiap kali gelaran pesta demokrasi berlangsung Ita mengaku tidak pernah sekalipun golput, meskipun sebagian orang menganggap golput juga merupakan pilihan, tapi tidak baginya.

“Kalau berbicara tentang hak pilih, saya pribadi nggak pernah golput, nggak pernah saya kepikiran untuk golput, apalagi sekarang saya aktif di partai,” terangnya.

Menanggapi berbagai isu yang merebak di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya isu SARA yang saat Pemilu 2019 lalu, yang santer menjadi perbincangan dan perdebatan di media massa dan sosial media. Ia mengaku acuh akan hal tersebut, sebagai perempuan yang aktif di partai politik, ia paham bahwasanya isu SARA dikembangkan untuk kepentingan politik dan politik itu sendiri yang menjadi alasan utama mengapa isu SARA begitu menyeruak.



“Kalau isu SARA di lingkungan saya sih nggak ada, cuman dengar-dengar saja lewat sosial media dan media massa, itupun nggak merubah pilihan politik saya,” katanya.

Menilik dari proses Pemilu 2019 lalu, dua perempuan yang berprofesi sebagai *drive ojek online* itu berharap adanya evaluasi dari pemerintah, maupun pejabat dan lembaga yang berwenang terkait hal itu, agar dalam penyelenggaraan Pemilu kedepannya dapat berjalan lebih baik tanpa meninggalkan duka seperti halnya gelaran Pemilu serentak 2019 lalu.



MELAWAN TRADISI PATRIARKHI : PEREMPUAN SAMPANG JADI PENYELENGGARA PEMILU

Insiyatum

Salah satu fenomena yang masih terus hangat diperbincangkan dalam publik dan politik adalah permasalahan gender atau kesetaraan gender. Di Indonesia kesenjangan gender dalam kehidupan publik dan politik masih menjadi sebuah tantangan yang terus dihadapi hingga saat ini dikarenakan jumlah keterlibatan perempuan dalam setiap aktivitas publik maupun politik yang masih belum terpenuhi. Perempuan Indonesia tertinggal didalam kehidupan publik hingga politik, kesenjangan gender yang muncul dalam indikator sektor sosial menjadi sebuah tantangan berskala lokal dan nasional. Meskipun Indonesia telah berkomitmen menjalankan prinsip kesetaraan gender melalui konvensi nasional, serta internasional, bahkan pada Undang-undang Dasar 1945 negara menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta pengarusutamaan gender (PUG) yang telah diadopsi menjadi sebuah kebijakan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan minimal 30%.⁴⁴ Langkah ini dinilai tepat karena selama ini tingkat representasi perempuan di lembaga penyelenggara pemilu masih sangat rendah. Dimana selama ini penyelenggara pemilu masih di dominasi oleh kaum

⁴⁴ Lihat Pasal 92 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2019 tentang Pemilihan Umum

laki-laki baik dalam KPU, Bawaslu, dan DKPP. Pada kenyataannya memang tidak mudah menerapkan pemenuhan hak perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Maka wajar apabila sedikit perempuan yang dapat lolos dan terpilih. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara khusus memberikan jaminan harus terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam lembaga publik baik dalam sistem pemilihan umum, kepartaian, legislatif, eksekutif, dan yudikatif sepatutnya dipenuhi secara konsisten dalam tataran praksis.⁴⁵ Pemerintah sendiri telah meratifikasi instrumen penting dalam perjanjian internasional yakni konvensi Hak politik dan Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dua konvensi tersebut perlu menjadi rujukan utama dalam mengimplementasikan hak perempuan di sektor publik di berbagai aturan hukum yang ada.⁴⁶

Fakta bahwa perempuan merupakan pemilih dengan jumlah yang besar dan potensial, namun sangat disayangkan apabila keterlibatannya sebagai penyelenggara pemilu masih sangat minim. Keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara tidaklah untuk menggeser peran laki-laki, melainkan justru untuk memberikan warna yang berbeda dalam pengambilan keputusan, dan untuk mendorong perempuan agar mau menjadi pemimpin yang cerdas, tegas, dan kompeten. Upaya ini perlu didukung dengan memprioritaskan perempuan dalam proses rekrutmen penyelenggara pemilu mulai dari level bawah hingga paling atas.

⁴⁵ Lihat *Pasal 45 – 51 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Bagian Ke Sembilan.*

⁴⁶Sri wiyanto Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Convention on Eliminating Discrimination Against Women (CEDAW)*, (Jakarta: LDF, 2007), Bagian III, hlm. 6.



Pemenuhan hak asasi perempuan di wilayah publik dapat merupakan pemenuhan hak warga Negara yang dijabarkan dalam UUD 1945 yang menjadi norma dasar tertulis dalam sistem hukum Indonesia.⁴⁷ Taruhlah jika ada banyak calon dari unsur perempuan biasanya pemenuhan kuota 30% hanya diambil dalam jumlah minimal karena yang diambil adalah batas minimalnya.

Sah-sah saja jika ketentuan minimal itu diambil, namun alangkah lebih baik bahwa penempatan perempuan pada lembaga penyelenggara pemilu tidak sekedar dibatasi secara minimal namun harus dilihat bahwa keterlibatan perempuan adalah bagian dari pemenuhan hak perempuan di sektor publik, dan perlu ditekankan pada kompetensi personal. Jadi ketika ada banyak perempuan yang memiliki kelayakan dalam hal kompetensinya sudah semestinya diberi akses yang luas dan tidak serta merta hanya diambil jumlah minimalnya seolah-olahnya berperan sebagai pelengkap saja. Sehingga ini diperlukan keberpihakan dari pengambil dan pelaksana kebijakan untuk terus mendorong agar partisipasi perempuan untuk terlibat menjadi penyelenggara pemilu dapat terealisasi dan meningkat secara kuantitatif.

Keberadaan Perempuan dalam Pengawas Pemilu

Adanya anggapan yang sering muncul bahwa wilayah publik apalagi yang berkorelasi dengan politik masih terkesan "tabu", dan tak lazim bagi perempuan, karena wilayah itu lebih dekat dengan wilayah maskulin. Sehingga menjadi wajar jika perempuan memiliki posisi

⁴⁷Adhyepanritalopi, *Menakar RUU Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Kibar Press, 2013) hlm. 36.

tawar yang masih kurang. Dalam kajian sejarah, para feminis menyebut budaya patriarki sebagai salah satu akar permasalahan ketidakadilan pada perempuan yang kemudian memunculkan banyak persoalan diskriminasi (pembedaan perlakuan) terhadap perempuan di berbagai bidang. Seorang filsafat feminis, *Simone de Beauvoir* mengatakan perempuan sebagai makhluk jenis kelamin kedua (*the second sex*). Logisnya dapat diterjemahkan bahwa posisi perempuan sebagai subyek yang dinilai kurang penting. Karena dianggap manusia kelas dua, otomatis tidak menjadi yang utama.⁴⁸ Wilayah domestik seringkali disebut sebagai wilayah kodrati perempuan, Kodrat bersifat *given*, secara harfiah dimaknai sebagai pemberian dari Tuhan yang tidak dapat dipertukarkan. Realita yang terjadi konstruksi sosial dan budaya yang dibentuk memposisikan wilayah domestik adalah kodrat dari perempuan. Sehingga perempuan tidak memiliki ruang yang leluasa untuk memanfaatkan peluang dan kesempatan di domain publik. Inilah yang kemudian menjadikan perempuan selangkah tertinggal dibandingkan dengan laki-laki, namun anggapan ini tidak lantas menuding siapa yang salah dan siapa yang benar karena masyarakat tumbuh dalam sistem sosial dan budaya yang didasari oleh nilai-nilai yang tumbuh dan berproses di masyarakat yang kemudian terinternalisasi dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.⁴⁹

Sebelum adanya pengaturan kuota minimal bagi perempuan di sejumlah produk peraturan perundang-undangan termasuk di bidang politik seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun

⁴⁸ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya Di Indonesia*, (Jakarta :Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 1.

⁴⁹ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, (Pancuran Alam: Jakarta, 2009), hlm. 28-29.



2011 tentang Partai Politik, tingkat representasi perempuan untuk menduduki jabatan di lembaga politik pun jarang dijumpai tak terkecuali di dalam lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu. Selain karena belum adanya kebijakan khusus yang mendukung representasi perempuan di lembaga politik dan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, juga antusiasme perempuan untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemilu masih kurang. Sebab ini bukan tanpa alasan karena senyatanya dibutuhkan *performance* yang tangguh dari banyak aspek internal-eksternal dalam mengawal proses demokrasi, serta tak kalah penting konsisten dalam menegakkan aturan main. Jika dirunut lebih jauh bisa dipahami minimnya keterwakilan perempuan di lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu juga di lembaga politik tidak terlepas dari konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat yang kemudian turut mempengaruhi pola relasi kuasa dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam wilayah domestik dan publik.

Bagian penting untuk dikaji dari pendapat ini berkaitan dengan proses adanya norma tertulis tidak dapat lepas dari nilai-nilai sosial, budaya, dan filosofi yang melatarbelakangi hadirnya norma yang berlaku di masyarakat yang kemudian memengaruhi munculnya berbagai aturan hukum tak terkecuali bagi perempuan. Berbagai kebijakan hukum yang ada sudah cukup memberikan banyak peluang bagi perempuan untuk berperan dalam wilayah publik. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat harus mampu mengambil bagian untuk melakukan perubahan yang baik dan berkemajuan. Hal ini mestinya dapat dibidik oleh perempuan untuk mensejajarkan posisinya dengan laki-laki untuk turut andil di wilayah publik. Lantas tidak pula melupakan perannya di wilayah domestik bersama laki-laki sebagai mitra seajar. Berangkat dari kacamata agama bahwa manusia



sejatinya sama di hadapan Tuhan, yang membedakan adalah derajat ketakwaannya. Sehingga perempuan jangan merasa ragu untuk maju dan memberikan kontribusi yang baik untuk negeri.⁵⁰

Potret Perempuan di Kabupaten Sampang sebagai Pengawas Pemilu

Keberadaan perempuan di Kabupaten Sampang masih di anggap sebagai manusia nomor dua setelah laki-laki, anggapan perempuan sebagai kaum lemah masih sangat kental diyakini. Budaya patriarki yang mengatakan bahwa perempuan selayaknya hanya cukup di rumah sebatas bertugas menjadi ibu rumah tangga masih sangat kuat. Keberadaan perempuan yang memilih peran di publik seperti di lembaga partai politik dan lembaga swadaya seringkali memunculkan anggapan miring dari sebagian besar masyarakat terutama dilingkungan sekitar, sebab menurut mereka peran semacam itu hanya cocok di ambil oleh laki-laki, sedangkan perempuan tidak boleh menempati posisi tersebut apalagi sampai melebihi peran laki-laki.

Pada pemilu tahun 1999 hingga pemilu tahun 2009 di Kabupaten Sampang tidak ada perempuan yang menjadi pengawas pemilu, baik di tingkat desa, kecamatan lebih-lebih di tingkat Kabupaten. Baru pada pemilihan kepala daerah tahun 2012 dan Pemilu tahun 2014 keterlibatan perempuan sebagai pengawas pemilu mulai ada. 3 (tiga) anggota Panwaslu Kabupaten Sampang salah satunya adalah perempuan, 42 (empat puluh dua) anggota Panwascam di 14 (empat belas) Kecamatan terdapat 3 (tiga) orang di wakili oleh perempuan,

⁵⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia (2005), hlm. 24-27.



sedangkan 186 (seratus delapan puluh enam) PPL sebanyak 3 (tiga) orang di wakili oleh perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan serta minat perempuan untuk terlibat dalam mewujudkan cita-cita demokrasi dengan mengambil peran sebagai pengawas pemilu masih kategorikan sangat minim dan jauh dari cita-cita Undang-Undang untuk mengurangi dan menghapus diskriminasi terhadap perempuan.

Minimnya keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di Kabupaten Sampang salah satu faktor nya adalah minimnya perempuan yang mengikuti proses seleksi, dan yang lolos seleksi tidak lebih dari 10%. Faktor lain adalah potret pelaksanaan demokrasi (pemilu) yang sengaja dibuat ekstrim oleh pelaku politik, sehingga hal tersebut memunculkan isu yang cukup kuat bahwa dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sampang syarat akan sengketa dan konflik. Jika kita telusuri dan amati lebih detail, serius dan mendalam, pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Sampang tidak seperti yang di isukan di publik. Aggapan yang cukup kuat bahwa perempuan lemah dan kurang tegas maka di anggap tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam pemilu, tidak akan mampu melakukan pengawasan, pencegahan, serta penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu. Anggapan semacam itu cukup efektif dalam mempengaruhi para perempuan untuk terlibat sebagai pengawas pemilu, baik yang mempunyai kemampuan dalam bidang keilmuan dan keterampilan lebih-lebih perempuan yang minim pengetahuan dan keterampilan. Walaupun ada tidak lebih hanya sebatas pelengkap formasi dan pelengkap administrasi. Padahal pada kenyataannya perempuan di Kabupaten Sampang yang memilih terlibat dalam dalam pengawas pemilu cukup kompeten dan profesional dan keberadaannya jauh lebih maksimal khususnya dalam pemberian

pemahaman kepada masyarakat tentang pemilu, seperti apa yang dialami oleh sdri. Aminatur Rizkiyah salah satu anggota Panwas Kecamatan Camplong periode tahun 2014.⁵¹

“Tahun 2014 adalah tahun yang sangat bersejarah bagiku karena dapat menjadi bagian dari pelaksanaan pemilu serta dapat berperan dalam mensukseskan pemilu. Diman waktu itu saya selaku pengawas kecamatan diberi amanah untuk bertugas langsung dalam mensukseskan pemilu tahun 2014 dengan asas langsung, terbuka, jujur, dan adil. Sehingga saya sangat berhati-hati sekali dalam melangkah, bersikap, dan mengambil keputusan dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam peroses pelaksanaan pemilu, petunjuk teknis yang telah ditentukan menjadi dasar utama saya dalam bertugas. Saya selalu melakukan pengawasan, pengamatan, dan kajian yang ekstra detail sesuai dengan tahapan, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab seperti halnya; kampanye, hari tenang, pembetulan TPS, pendistribusian logistik, dan pelaksanaan pungut-pitung di TPS. Namun ada hal yang tidak bisa kami jangkau adalah fenomena transaksi politik uang, diyakini atau tidak itu ada namun susah untuk diketahui secara langsung, karena pada saat itu keterlibatan masyarakat untuk ikut serta mengawasi pemilu sangat minim, masyarakat hanya peserta pemberi suara, setelah itu menjadi penonton saja. Maka dari itu kami sarankan pada proses pelaksanaan pemilu masyarakat harus terus dilibatkan, seperti pada pemilu 2019 ini, dan kedepan perlu ditingkatkan.”

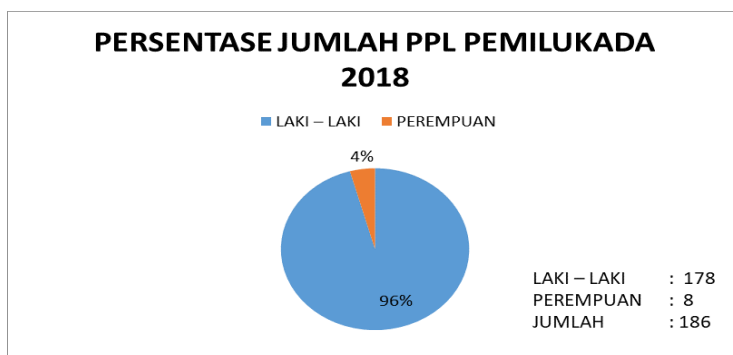
Menanggapi pengalaman tersebut di atas perempuan di Kabupaten Sampang mampu menjadi pengawas pemilu dan mampu mewujudkan demokrasi, hanya saja perlu dukungan dari masyarakat

⁵¹ Wawancara dengan Aminatur Rizkiyah, Selaku Anggota Panwascam Camplong, Pemilu 2014, Pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2019.



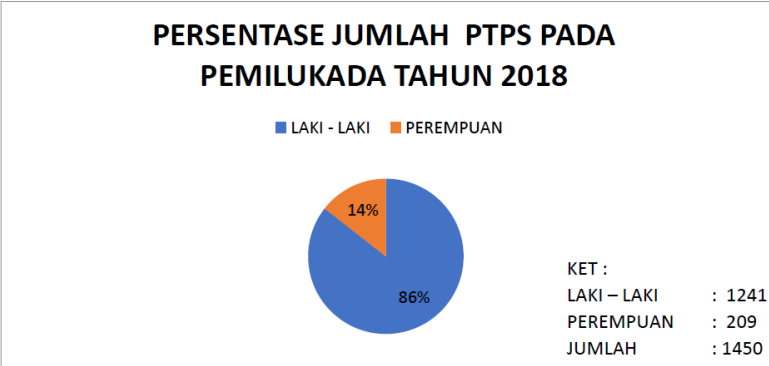
terutama lingkungan sekitarnya. Selain itu cukup membuka warna baru bagaimana perempuan di Kabupaten Sampang seharusnya berperan di dunia Publik, dan tidak perlu takut melangkah. Pada pilkada tahun 2018 keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di Kabupaten ada sedikit peningkatan, sebagaimana data Bawaslu Kabupaten Sampang menyebutkan, satu dari 3 (tiga) Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang adalah perempuan, 186 (seratus delapan puluh enam) orang PPL di 186 (seratus delapan puluh enam) desa se Kabupaten Sampang 8 (delapan) orang adalah perempuan, sedangkan 1450 (seribu empat ratus lima puluh) PTPS diwakili perempuan sebanyak 209 (dua ratus Sembilan) orang, hanya saja 42 (empat puluh dua) anggota Panwascam di 14 (empat belas) Kecamatan tidak satupun diwakili oleh perempuan.

DIAGRAM 1
DATA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMPANG
TAHUN 2018



Sumber : Bawaslu Kab. Sampang 2018

DIAGRAM 2
DATA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(PTPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SAMPANG
TAHUN 2018

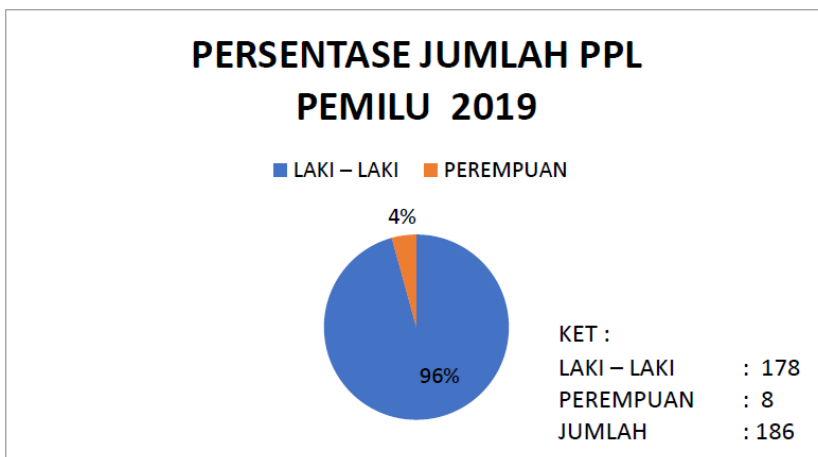


Sumber : Bawaslu Kab. Sampang 2018

Pada pemilihan umum tahun 2019 keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu di Kabupaten peningkatannya cukup signifikan, sebagaimana data Bawaslu Kabupaten Sampang menyebutkan satu dari 5 (lima) Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang adalah perempuan, 186 (seratus delapan puluh enam) orang PPL di 186 (seratus delapan puluh enam) desa se Kabupaten Sampang 8 (delapan) orang adalah perempuan, sedangkan 3691 (tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu) PTPS diwakili perempuan sebanyak 735 (tujuh ratus tiga puluh lima) orang, hanya saja 42 (empat puluh dua) anggota Panwascam di 14 (empat belas) Kecamatan tidak satupun diwakili oleh perempuan.

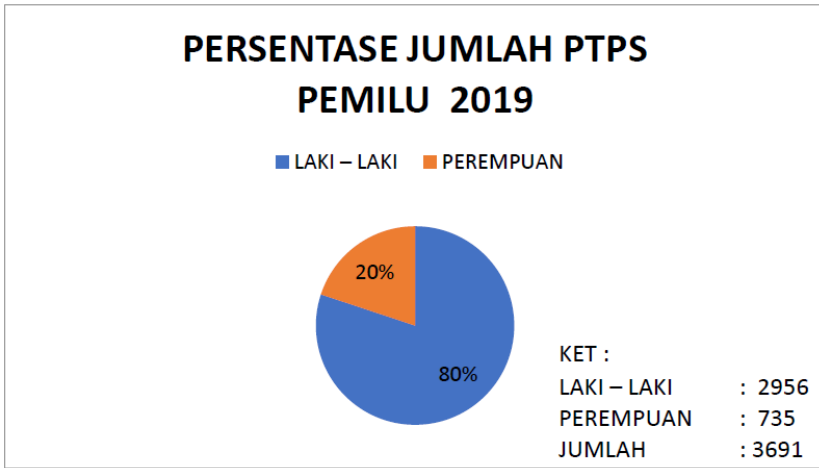


DIAGRAM 3
DATA PENGAWAS PEMILU LAPANGAN (PPL)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Sumber : Bawaslu Kab. Sampang 2019

DIAGRAM 4
DATA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(PTPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



Sumber : Bawaslu Kab. Sampang 2019

Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 kehadiran perempuan sangatlah berpengaruh dalam mensukseskan pemilu, mereka mampu melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Salah satu yang menjadi tolak ukur adalah mereka mampu menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu, mereka mampu membangun mitra dengan masyarakat utamanya kaum ibu-ibu untuk tidak golput, menggunakan hak suara sesuai hati nurani, dan mengawasi proses pemungutan dan peng-

hitungan suara. Seperti halnya yang dilakukan oleh Ulfatun Hasanah PPL Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.⁵²

“Pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 terdapat isu tentang adanya politik uang yang dilakukan oleh tokoh yang cukup berpengaruh. Saya sebagai PPL tetap bersemangat dan bertanggung jawab sebagai pengawas pemilu. Langkah yang kami ambil guna mengantisipasi hal tersebut adalah; Bersinergi dengan PTPS untuk mengakses informasi dan bukti, mengintruksikan kepada PTPS untuk selalu cermat dan tanggap, serta bekerjasama dengan masyarakat untuk sama-sama mengawasi dan memberikan informasi kepada kami jika ada hal-hal yang berpotensi mengarah kepada pelanggaran termasuk politik uang. Hal itu kami lakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, meminimalisir, dengan tujuan besar agar tidak terjadi pelanggaran, sengketa, dan konflik, sehingga pemilu terlaksana dengan baik.”

Bagi perempuan di Kabupaten Sampang memang bukan perkara yang mudah untuk berkiprah menjadi pengawas pemilu, baik PTPS, PPL, Panwascam lebih-lebih Bawaslu Kabupaten. Karena selain persoalan lingkungan baik sekitar dan keluarga uang masih menganggap hal yang tidak biasa seorang perempuan menjadi pengawas pemilu, juga karena adanya wacana yang cukup kuat bahwa pemilu di Sampang sering menimbulkan kisruh, juga di Sampang rawan akan kekerasan fisik terutama di daerah utara. Hal tersebut sebagaimana yang dialami oleh Indrawati PPL Desa Masaran Kecamatan Banyuwates Sampang.⁵³

⁵² Wawancara dengan, Ulfatun Hasanah selaku PPL Desa Karanggayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Pemilu tahun 2019, Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019.

⁵³ Wawancara dengan, Indrawati selaku PPL Desa Masaran Kecamatan Banyuwates Kabupaten Sampang, Pemilu tahun 2019, Pada tanggal 08 Januari 2019

“Tidak mudah bagi seorang perempuan untuk berkecimpung dalam kepengawasan pemilu, sebelum saya mendaftar PPL untuk desa saya, di keluarga intern saya terjadi pro kontra. Ada yang mendukung saya untuk mendaftar agar pengalaman kerja saya bertambah, tapi tidak sedikit juga yang melarang saya karena saya perempuan sangat riskan dan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apalagi di madura rawan "senggol bacok". Dengan adanya pro kontra tersebut membuat saya tambah semangat dan mantap untuk mendaftar PPL karena saya ingin membuktikan bahwa perempuan pun juga bisa berkecimpung di dalamnya. Selama saya menjadi PPL di Desa Masaran tidak ada kendala yang parah karena sesama rekan kerja termasuk PPS saling mendukung, kebetulan salah satu anggota PPS Desa saya perempuan. Saya tetap melaksanakan tugas-tugas saya meskipun awalnya juga bingung karena baru pertama berkecimpung dalam kepengawasan pemilu, namun dengan adanya kemauan yang keras kita bisa belajar dan menambah pengalaman.

Dengan semangat dan keyakinan serta kemauan yg kuat, perempuan juga bisa menunjukkan bahwa perempuan itu bisa dan tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja meskipun secara fisik memang lebih kuat laki-laki. Dan tidak dapat di pungkiri bahwa tetap akan ada pro kontra dalam masyarakat karena selama ini umunya hanya laki-laki yang berperan aktif dalam pengawasan pemilu dan/atau penyelenggaraan pemilu. Pesan saya, Ayo bagi kaum perempuan tunjukkan kemampuan kita dalam pemilu dan berorganisasi, jangan sia-siakan kesempatan yang ada, tentunya dengan tidak mengesampingkan kodrat kita sebagai perempuan. Perempuan makhluk multitalenta yang mampu mengerjakan beberapa hal dalam waktu yg bersamaan. Jangan sia-siakan perjuangan R.A.Kartini, marilah kita jadi kartini kartini berikutnya”.

Ketidakyakinan masyarakat yang utamanya kaum laki-laki yang tidak yakin akan kemampuan perempuan bawa iya bisa menjadi pengawas pemilu dan mampu menjalankan tugas sebagai pengawas



pemilu juga di alami oleh saudari Romlah PTPS 02 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kab. Sampang.⁵⁴

"Pengalaman Pilkada tahun 2018 dan Pemilu di tahun 2019, adalah pengalaman awal bagi saya menjadi anggota penyelenggara pemilu, awalnya saya kurang percayadiri, karena saat itu saya satu-satunya perempuan yang menjadi anggota PTPS, Sejak dulu di Desa kami jika ada pemilu pasti anggotanya dari kaum laki-laki, di desa kami perempuan selalu di anggap tidak mampu sehingga tidak pernah di beri kesempatan mengerjakan sesuatu, selain pekerjaan rumah, apalagi mau maju di dunia politik. Sempat ada salahsatu anggota PTPS yang dari kaum laki-laki, bertanya "kamu yakin mau jadi anggota PTPS? " saya jawab dengan penuh percaya diri, Yakin seyakini-yakini nya. Maksud jawabn saya cuma ingin menunjukkan perempuan juga bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan tanpa mengurangi qodrat wanita. Dan saya ingin menghilangkan minset masyarakat yang ada di Desa kami, tentang perempuan yang hanya di pandang sebelah mata. Alhamdulillah kemudian di lanjutkan ke PSU, sampai ke pilpres 2019 kemaren. Kendala Yang Saya Alami Disaat Proses Pengawasan di antaranya adalah; Ketidak sinkronan DPT, ada DPT ganda, ada data orng yang sudah meninggal masih terdaftar d DPT. Sehingga bisa disalahgunakan oleh oknum-oknom tertentu, seperti kejadian yang dialami oleh saya saat menjadi PTPS pilgup di TPS02, ada salah satu masyarakat yang mau melakukan pencoblasan dua kali dari TPS06 mau mencoblos lagi ke TPS saya (TPS02) yang membawa dua surat undangan, tapi Alhamdulillah berhasil kami cegah dan kami amankan.

Sebelum saya melakukan pengambilan surat undangan tersebut dari tanganya, saya kordinasi terlebih dahulu dengan teman saya yang ada di TPS

⁵⁴Wawancara dengan Romlah, selaku PTPS 02 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang Pilkada tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019, Pada tanggal 05 Januari 2019

06, untuk memastikan apakah orang tersebut yang ber inisial S. sudah menggunakan hak pilih nya? Karna situasi di luar sudah tidak kondusif. Tapi saya tetap berusaha bagai mana caranya saya bisa memantau kondisi didalam maupun di luar sekiranya pemilu bisa berjalan kondusif tanpa ada kecurangan. Permasalahan yang paling menegangkan lagi di saat hari tenang, kami mengalami kesulitan bagai mana caranya memberi tahu Masyarakat tanpa ada keributan supaya terhindar dari kampanye hitam, karena kadang-kadang di hari tenang itulah politik uang berjalan. Namun kami tetap melakukan pencegahan dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat, kepada tokoh, dan kepada calon dan tim pendukungnya. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan menjadi anggota PTPS, tidak semua orang mendapatkan kesempatan menjadi anggota penyelenggara pemilu, meski banyak orang berkata, gaji dengan kinerjanya tidak sesuai, tapi saya menikmati semua itu, karna sesuatu harus dimulai dari 0 siapa tau dari PTPS, naik menjadi PPL, ke PANWASCAM. Banyak pengalaman dan ilmu yang saya dapat dari PTPS. Salahsatunya bagaimana saya bisa mengambil hati dan kepercayaan masyarakat supaya bisa mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Dan bagaimana saya supaya menjadi orang yang benar-benar profesional, netral, dan dapat menjalankan tugas dengan baik dan jujur.”

Berangkat dari pengalaman dari Saudari Romlah tersebut diatas, maka sudah pasti dapat disimpulkan bahwa perempuan bisa menjadi pengawas pemilu dan dapat melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Bahkan perempuan yang paling kompeten, telaten, dan benar-benar jujur dalam melaksanakan tugas. Dengan pendirian yang teguh kami yakin perempuan sangat profesional dalam menjalankan tugas. Pengalaman lain yang dapat dijadikan bukti bahwa perempuan terkhusus perempuan di kabupaten Sampang dapat menjadi pengawas pemilu atau dapat ambil peran dalam pemilu serta mampu menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu adalah sebagai-



mana yang di alami oleh Sofatul Jannah staf Panwascam Robatal pada pemilu 2019 bagian Pengawasan dan Hubungan antar lembaga.⁵⁵

“Ada banyak pengalaman berharga selama berada di dikeluarga besar Bawaslu khususnya Panwascam Robatal, utamanya bisa mengetahui jalannya pemilihan umum yang sebelumnya dikatakan sangat rumit. Yang membuat menarik untuk dikaji adalah peran perempuan di ranah Publik sangat terbatas. Ruang gerak perempuan masih pasif padahal mereka sama-sama memiliki potensi yang tak kalah dari laki-laki. Penyelenggara pemilu tingkat kecamatan Robatal 2018-2019 semua dari kalangan maskulin. Bukan karena perempuan tak bisa tampil dipermukaan namun kadang perempuan seringkali termarginalkan oleh isu-isu klasik tentang perempuan adalah makhluk the second class yang kiprahnya hanya lintas Kasur – dapur - sumur. Sedikit demi sedikit saya menggeser dan membuktikan meski hanya sebatas jadi Staf bahwa perempuan juga bisa berkiprah dan terlibat diranah penyelenggara pemilihan umum yang dianggap “berbahaya”, pulang malam tak kenal waktu menjadi tantangan tersendiri. Apalagi ketika menjadi perwakilan rapat koordinasi dengan PPK di depan hanya saya Berada diantara laki-laki.

Kadang merasa takut karena hanya satu perempuan, tapi Alhamdulillah semua baik-baik saja tetap menjaga etika dan mengedepankan profesionalitas dalam bekerja. Dan semua itu pengalaman paling keren dan Amazing. Tabap pemilihan PTPS pendaftar perempuan lumayan banyak dan setelah pelaksanaan pada waktu monitoring saya melihat mereka sangat antusias mensterilkan tempat menjaga jalannya pemilu tetap kondusif. Dan pada saat pelaporan mereka mengisi dengan baik. Harapan kedepannya untuk penyelenggara tingkat kabupaten untuk lebih menyetarakan atau melibatkan lebih banyak perempuan

⁵⁵ Wawancara dengan, Sofatul Jannah selaku Staf Panwascam Robatal bidang Pengawasan dan Hubungan Antar lembaga Pemilu 2019, Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2019

kebususnnya yang muda yang memiliki intelektual tinggi. Dan pada waktu rekrutmen lebih selektif yang memiliki keahlian computer karena pekerjaan Panwascam tidak hanya dilapangan saja tapi juga hasil pengawasan disampaikan dan dilaporkan berbasis digital.”

Dari beberapa pernyataan diatas, perempuan pengawas pemilu sangat berpengaruh dalam pengawasan Pemilu di Kabupaten Sampang, perempuan mampu menjadi pengawas pemilu karena perempuan juga mempunyai potensi yang sama seperti laki-laki, mempunyai ketegasan, profesiolitas, dan integritas. Karena integritas pemilu dimulai dari integritas penyelenggara, untuk menghasilkan demokrasi yang berkualitas guna mewujudkan cita-cita demokrasi.

PEMILU DAN NYANYIAN SUNYI WARANGGANA

Fina Lutfiana Rahmawati

Penari sekaligus penari tayub atau dalam leksikon kesenian masyarakat Nganjuk sering disebut *waranggana* masih menjadi profesi yang sering diasosiasikan dengan cap negatif bagi sebagian orang. Pasalnya, praktik kesenian tersebut sering dibumbui dengan adegan minum-minuman keras, juga praktik seksisme para penayub ketika memberi saweran dengan menaruh uang sawer di sela-sela *buste boudernya* (kutang) si waranggana. Cap tersebut seperti melawan kehendak sejarah bagaimana seni tayub lahir sebagai perlambang keindahan dan puja-puji serta perayaan masyarakat kecil atas kesuburan alam yang diberikan Tuhan. Tayub dalam pengertian yang mudah diterima adalah "ditoto ben guyub" atau diatur supaya rukun⁵⁷.

Tayub biasanya diselenggarakan pada saat hajatan-hajatan di desa, seperti pernikahan, syukuran, bersih desa, ataupun khitanan. Pelaksanaan tayub biasanya di tempat terbuka seperti lapangan ataupun halaman yang luas. Pertunjukan tayub di Kabupaten Nganjuk biasanya menghadirkan *pramugari*, *pengrawit*, *waranggana*, *pengibing*. Setiap tokoh-tokoh tersebut mempunyai peran masing-masing dalam pertunjukan tayub. (1) *Pramugari* berperan sebagai pemimpin dan yang mengatur tata laku dalam pertunjukan tayub, (2) *Pengrawit* adalah

⁵⁷ Dalam keterangan yang diperoleh dari Mangkunegaraan, tayub terbentuk dari dua kata yaitu *mataya* yang berarti tari dan *guyub* yang berarti rukun bersama. Lib, Anis Sujana. 2002. *Tayuban Kalangenan Menak Priangan*. Bandung: STSI Press.



sekelompok orang yang memainkan gamelan Jawa, (3) Waranggana berperan sebagai penari dan menyanyi (*menyindhen*) dalam pertunjukan tayub, (4) Pengibing adalah penari pria yang menari berpasangan dengan waranggana⁵⁸.

Istilah gambyong mulai digunakan dalam serat Chentini yang ditulis pada abad XVIII. Tetapi dapat diperkirakan bahwa tari gambyong merupakan perkembangan dari tari *iledeg* atau tayub. Sedangkkn serat sastramiruda menyatakan bahwa tari tayub telah dikenal semenjak zaman kerajaan Jenggala yang diperkirakan pada abad XII⁵⁹.

Ritual Gembyangan tidak sekedar menjadi formalitas saja, namun ada filosofi yang dalam disetiap prosesi yang dilaksanakan. Misalnya ketika para gadis calon waranggana menenggak air di pincuk mempunyai makna untuk membersihkan diri. Prosesi menyobek daun waru menjadi simbol persaudaraan yang kokoh. Karena tiap waranggana harus menjaga kerukunan. Kemudian prosesi yang terakhir adalah pemberian sampur yang menunjukkan mereka sudah sah menyandang gelar waranggana.

Bagi masyarakat Ngrajek khususnya, kesenian Tayub menjadi tradisi yang turun temurun dan harus dilestarikan. Mereka meyakini bahwa kesenian tayub ini merupakan pembawa berkah bagi lingkungannya yang mayoritas bermata pencaharian bercocok tani. Ritual kesenian tayub biasa ditampilkan pada acara bersih desa di Desa Ngrajek sebagai pusat waranggana di Kabupaten Nganjuk.

⁵⁸ Cindy Trisnawati, 2013. *Kehidupan Waranggana Ditinjau dari Perspektif Sosial Ekonomi di Dusun Ngrajek, Desa Sambirejo, Tanjunganom, Nganjuk*. Skripsi Program Studi Pendidikan Seni Tari Fakultas Bahasa dan Seni UNY, hal. 25

⁵⁹ Widyastutieningrum, *Sejarah Tari Gambyong Seni Rakyat Menuju Istana*, Citra Atnika Surakarata, Surakarta, 2004, hlm. 3



Namun, hal yang memperhatikan popularitas waranggana saat ini sudah mulai menurun. Hal ini terlihat dari jumlah peminat untuk menjadi waranggana. Sehingga mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap kehidupan seniman pertunjukan tayub dalam kehidupan sehari-hari baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Pelaku seni waranggana adalah pelaku seni tradisional yang mengabdikan diri terhadap nilai-nilai budaya lokal secara utuh dan menghargai nilai estetika. Akan tetapi konsep budaya masyarakat pedesaan masih saja menjadi pembanding dengan konsep budaya masyarakat di perkotaan. Dualisme inilah yang kemudian menjadi warna tersendiri dalam ungkapan *desa mawa cara, negara mawa tata*. Desa dengan berbagai cara dan kota sarat dengan macam tatanan⁶⁰.

Kasmiatun, Suharti, Damiatun dan Desi Setianingrum adalah para *waranggana* dengan ragam usia dan latar belakang berbeda yang saya temui untuk membincang soal pengalaman *ber*-pemilu dalam sudut pandang seorang waranggana. Menjalani laku sebagai seorang waranggana bagi mereka tidaklah mudah. Masing-masing dari mereka harus memiliki *kekhayan* sebagai identitas diri. Selain piawai menari dan juga menyinden, sebagai waranggana dituntut untuk menjaga penampilan agar para penonton yang menyaksikan dapat menikmati kesenian tayub yang sedang dipentaskan. Secara umum, waranggana di dusun Ngrajek dan juga dusun Sambirejo mayoritas berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bermata pencaharian sebagai petani memang tidak dapat dipastikan penghasilan tiap bulannya. Sehingga Kebanyakan dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya setelah lulus Sekolah Dasar (SD). Faktor ekonomi yang mendorong mereka untuk memilih menjadi waranggana dengan harapan dapat

⁶⁰ Y. Sumandiyo Hadi, *Sosiologi Tari*, Pustaka, Yogyakarta, 2007, hlm 54

memperbaiki dan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan.

Kasmiatun, Waranggana yang *Ogah* disogok.

“Monggo pinarak mbak, waduh ngapunten taksih mantun masak”. Kasmiatun menyapa saya dengan bahasa Jawa halus. Ia baru selesai masak. Usianya sudah memasuki 55 tahun, namun tampak wajahnya yang kejawen dengan gelungan rambutnya yang khas menandakan sebagai wanita jawa yang memang mengabdikan diri untuk menggiatkan seni. Usia tidak menyurutkan Kasmiatun untuk terus melanjutkan langgam-langgam Jawa melalui kesenian tayub. Ia berkisah ihwal menjadi waranggana ia geluti sejak usia 13 tahun. Baginya, menjadi waranggana tidak sekedar menyalurkan bakat dan mengais rejeki saja, tetapi ia merasa terpanggil untuk ikut melestarikan budaya tayuban dengan terlibat aktif dalam mengkader waranggana-waranggana muda di Ngrajek, Tanggamanom.

Saya disuguhi kopi dan kami bercengkrama di kursi bamboo yang ada di rumah sederhana milik Kasmiatun. Ia melanjutkan cerita bagaimana perjalanannya menjadi waranggana yang sudah digelutinya selama 42 tahun. Pernah diupah manggung mulai Rp. 3000,- sampai saat ini berkisar Rp. 500.000,- di setiap sesi tanggapan. Kalau beruntung, ia bisa diupah Rp. 800.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,. Kasmiatun sangat menikmati menjadi Waranggana karena menjadi waranggana tidak hanya dibekali dengan ketrampilan menari dan menyanyi langgam jawa saja, namun wawasan keputrian seperti keterampilan menyulam, menjahit, memasak, dan juga merias di ajarkan kepada waranggana. *“Diskusi-diskusi kekinian juga sering kita lakukan, agar kita tidak gaptek pas ketemu dengan waranggana-waranggana di luar Nganjuk”.* Selorohnya sambil tersenyum simpul.



Bincang kami soal pemilu cukup nyambung. Kasmiatun tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan isu-isu terkait pemilu maupun politik lewat televisi maupun media sosial. Menurutnya penyelenggara pemilu baik Bawaslu maupun KPU memang sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan sebaik-baiknya. Tanpa adanya penyelenggara pemilu, tidaklah mungkin demokrasi dapat berjalan dengan baik. Baginya kehadiran penyelenggara pemilu juga menjadi penting sehingga proses pemilu yang berlangsung tidak mengalami kesulitan meskipun memang ada catatan dalam pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serempak dirasa ribet karena banyak sekali surat suara yang harus dicoblos, sehingga harapannya ke depan untuk pemilu ke depan ada pemisahan antara pileg dan pilpres⁶¹.

Ketika ditanya tentang pandangannya terhadap praktek politik uang dan politisasi SARA, waranggana senior ini dengan tegas menjawab bahwa lebih baik tidak menerima akan tetapi punya pilihan, karena setiap orang itu mempunyai prinsip dan kepercayaan dan harus menghormati satu sama lain. Ia berharap praktik politik saling menjatuhkan dengan menggunakan isu SARA tidak digunakan oleh para politisi maupun pendukungnya.

Waktu tidak terasa sudah hampir siang kami ngobrol tentang waranggana dan diselipi juga dengan ngobrol *ngalor ngidul* tentang pemilu, tampaknya ibu ini tambah antusias dengan keberlangsungan demokrasi ke depan. Baginya dampak pemilu sangat besar dapat dirasakan oleh pegiat seni tayub seperti dirinya. Baik wakil rakyat maupun pimpinan daerah sudah mulai memperhatikan keberlangsungan seni tayub yang memang menurutnya sudah tidak se jaya di

⁶¹ Transkrip wawancara dengan Kasmiatun waranggana dari dusun Ngrajek pada tanggal Jum'at, 10 Januari 2020, pukul 10.30 WIB

era tahun 1980-an. Ketika itu di kabupaten Nganjuk masih ada kurang lebih 150 waranggana aktif. Sedangkan sekarang berdasarkan pengakuannya, regenerasi untuk menjadi waranggana di lingkungan anak muda masih sangat minim. Karena generasi sekarang lebih tertarik menjadi penyanyi elekton.

“Alhamdulillah mbak, kemarin itu bapak bupati akhirnya mengundang kita untuk tampil di kabupaten untuk acara gebyar tayub yang dihadiri oleh kabupaten, kota sebelah juga”. Terangnya dengan girang

“Barusan bapak dan saya menjadi timses di Pilkades mbak, Alhamdulillah jadi, dan Alhamdulillah juga kades yang terpilih ini juga mau untuk memperhatikan tentang kelanjutan seni tayuban di desa ini” kelakarnya menutup perbincangan kita di siang hari menjelang jumat

Suharti: “*Kawulo Alit Manut dengan yang Memimpin*”.

Berkulit kuning langsung, rambut sebauh diikat belakang dengan logat bahasa khas Nganjuk Suharti yang sudah berusia 50 tahun masih Nampak kelihatan muda. Lulus Sekolah Dasar (SD) di usia 13 tahun, Suharti memilih waranggana karena kondisi orang tuanya yang sudah tidak dapat menyekolahkananya lagi.

“Owalah mbak, tiyang sepah sampun mboten saget biayani, pilihan kulo njeh namung dados tandhak mawon” (Oalah mbak, orangtua sudah tidak bisa membiayai lagi akhirnya pilihan saya cuma jadi waranggana) Kenangnya.

Suharti yang dikaruniai tiga putra putri dengan Eko sehari-harinya sebagai petani di dusun Ngrajek, masih sering mendapat tanggapan di acara-acara bersih desa, manten, dan juga syukuran di daerah Nganjuk sekitar bahkan sampai Saradan dengan tarif setiap tanggapan Rp.400.000,- sampai dengan Rp.500.000,-.



“Saya juga sering diundang untuk *kelonengan* mbak, tidak pakai *mbekso* (nari), cuma *nyinden* saja diiringi gamelan. Biasanya sindennya ada dua hanya duduk menyanyikan langgam-langgam Jawa” Imbuhnya.

Ketika ditanya tentang pilihannya saat pemilu, dengan malu-malu Suharti menjawab bahwa dirinya memang tidak golput tapi pilihannya manut dengan suami dan keluarga besarnya. Suharti berpendapat bahwa penyelenggara pemilu sudah bekerja sangat maksimal baik dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa maupun TPS. Mereka tidak mengenal lelah hingga pemilu berjalan tertib. Namun yang menjadi kesulitan dalam pemilu 2019 kemarin, baginya sangat membingungkan karena harus memilih sebanyak itu dan belum tentu mengenal masing-masing calon.

Di tengah-tengah perbincangan kami, Suharti menceritakan bahwa dirinya mengakui pernah mendapatkan amplop dari calon ketika pemilu.

“Bagi kami *wong alit* ya di buat beli jajan anak-anak saja mbak, anggap saja sebagai rejeki” terangnya

Suharti yang memang sehari-harinya menjadi *thandak* dan ibu rumah tangga mengakui tidak begitu memperhatikan terkait dengan politik. Menurutnya siapapun yang terpilih belum ada manfaat maupun dampak yang signifikan dalam kehidupannya secara ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan Suharti juga tidak merasakan pembangunan yang signifikan di desanya.

“Hidup kami juga gini-gini saja, bertani dan juga *nandak* untuk menghidupi anak-anak, *kawulo alit* manut saja dengan yang memimpin, *nerima ing pandum*” Jelasnya.

Meskipun demikian Suharti juga mempunyai harapan ke depan agar pemilu berjalan lebih baik dengan memisahkan antara pemilihan

legislatif dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak seperti kemarin, menurutnya sangat membingungkan pemilih terutama yang bagi pemilih berusia lanjut. Dengan calon yang sebegitu banyak memungkinkan bahwa pemilih tidak mengenal calon yang dipilih⁶².

Akhir perbincangan, Suharti juga menyampaikan keresahannya tentang pemilu yang berkampanye dengan saling menjatuhkan satu sama lain.

“*Mbokyao* pemilu itu damai, kami yang *kawulo alit* saja manut”. Ia memungkasi dengan penuh harap.

Damiatun: “*Ojok disuap Suaraku*”.

Kali ini bergeser ke dusun Sambirejo, ceritanya masih banyak tandak-tandak muda di dusun tersebut. Saya menyusuri jalananan menuju perkampungan waranggana di Nganjuk. Untuk selanjutnya berhenti di rumah yang khas Jawa dengan pohon darsono di depan rumahnya. Saya mengucapkan salam.

Tak selang berapa lama, keluarlah wanita muda, dengan rambut sebahu terurai, hidungnya yang mancung, dan kulit kuning langsung, tergopoh-gopoh menyambut dan menjawab salamku.

“*Monggo mbak, walah mbak saya belum mandi?*” sambut wanita muda itu.

Karena memang masih terbilang masih muda, Damiatun yang dilahirkan pada tahun 1980 memulai bergabung menjadi waranggana justru setelah dia menikah di usianya ke 15 setelah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Suami Damiatun yang sehari-hari men-

⁶² Transkrip wawancara dengan waranggana Suharti dari dusun Ngrajek, Tanjunganom pada tanggal Jumat, 10 Januari 2020, pukul 09.00 WIB.



jadi petani dan juga membuka usaha las sangat mendukung penuh Damiatun menjadi Waranggana.

“Jadi kalau manggung ya dianter suami mbak, biasanya upah setiap kali tanggapan bisa mencapai Rp. 500.000 an. Tapi lebih banyak sawerannya tergantung tamu-tamu undangan juga”. Selorohnya dengan senyum mengembang.

Damiatun menceritakan bahwa menjadi *waranggana* atau *tandhak* menjadi pilihan hidupnya. Ia mengaku memiliki bakat *nyinden* dan menari, dan tergerak untuk ikut melestarikan budaya tayuban di daerah Nganjuk.

Mengawali dengan sekolah atau kursus waranggana selama enam bulan di punden, sudah cukup bagi Damiatun untuk menjadi waranggana di tiap-tiap kegiatan tayub baik dalam kota maupun luar kota seperti daerah Madiun dan sekitarnya.

Damiatun mengakui bahwa dirinya memang tidak begitu *interest* tentang politik atau kepemiluan. Namun baginya penyelenggara pemilu sudah berperan dalam mensukseskan pemilu yang dipandangnya sangat rumit dan berat. Yang lebih memprihatinkan lagi proses pemilu tahun 2019 kemarin cukup meresahkan dan menyedihkan karena banyaknya penyelenggara pemilu yang sakit bahkan ada beberapa meninggal dunia. Bahkan surat suara yang begitu banyak juga sangat membingungkan pemilih untuk memilih⁶³.

“Akhire yo asal-asalan nyoblos mbak” tambahnya.

⁶³ Transkrip wawancara dengan Damiatun Waranggana dusun Sambirejo, Tanjunganom pada tanggal Sabtu, 11 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.

Damiatun menceritakan bahwa dirinya sebagai pegiat seni, hanya ingin meraskan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Damiatun, pemilu yang seharusnya tidak saling menjatuhkan atau menjelekkan satu sama lain. Politisasi SARA yang sering terjadi banyak meresahkan dan membingungkan masyarakat. Karena keinginan kami ini adalah pemilu yang damai dan tertib. Dirinya memang tidak golput, namun memilih calon berdasarkan umumnya orang memilih di lingkungannya.

“aku milih yang dipilih banyak orang mbak, toh saya juga tidak mengenalnya” celetuknya.

Namun ketika ditanya tentang praktek politik uang, Damiatun dengan tegas dan mantab berpendapat bahwa jika dirinya menerima uang tersebut sama saja suaranya dibeli.

“Yo emoh mbak, mosok saya harus memilih dengan disuap, menyalahi hati nurani mbak” tegasnya.

Damiatun meskipun tidak pernah menjadi tim sukses ataupun penyelenggara pemilu mengakui juga sudah merasakan manfaat pemilu dalam kehidupannya. Diantaranya adanya sekolah gratis sangat bisa dirasakannya, terlebih usaha las dan bertani juga sudah mulai mendapatkan perhatian dari pemangku kekuasaan.

“Dan yang pasti Alhamdulillah, jadwal manggung juga lancar” imbuhnya.

Desi Setianingrum: “Saya Anti Pemilu yang Ribet”.

Ia masih tercatat menjadi Mahasisiwi Manajemen di UNP Kediri. Dikalangan komunitas waranggana, ia terbilang waranggana yang masih berusia muda. Kakeknya dulu adalah penabuh gendang wayang, dan neneknya seorang sinden. Ia menjadi waranggana sejak di bangku SMA.



Darah seni yang mengalir secara turun temurun menjadi bekal buat Desi putri ke empat dari lima bersaudara pasangan suami istri Harsono yang masih aktif di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngajuk dan Sri Murtini yang juga masih aktif menjadi Waranggana. Tidak hanya Desi, kakaknya Wulan juga aktif menjadi waranggana. Cukup berlatih di Ibundanya Sri Murtini, Desi sempat mewakili Nganjuk untuk pentas di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Suasana warung pinggir jalan di desa Kwagean, ditemani krupuk pecel dan juga es rujak khas Kwagean, Desi menceritakan bahwa sebagai pegiat seni tayub selain sebagai warisan nenek moyang secara turun temurun, memang menjadi tekad Desi untuk terus mengenalkan budaya yang hampir punah di generasinya, para generasi *milenial*. Karena memang kebanyakan yang muda-muda lebih tertarik menjadi penyanyi orkes maupun penyanyi band.

Pandangan Desi tentang pemilu 2019, menurutnya sangat tidak efektif dengan diselenggarakan secara serentak membuat gaduh dan ricuh. Sosialisasi yang kurang akhirnya membingungkan bagi masyarakat untuk menyampaikan hak pilihnya. Terutama jika melihat banyaknya surat suara yang harus di coblos, sehingga banyak juga yang kurang memahami khususnya yang kelompok pemilih berusia lanjut. Ia juga meresahkan adanya politisasi SARA yang sangat marak. Sebagai generasi milenial yang notabnya generasi melek informasi, seringkali harus pintar-pintar memilah dan memilih berita yang benar atapun sekedar *hoax*⁶⁴.

Baginya yang perlu diapresiasi adalah penyelenggara pemilu yang sudah bekerja dengan baik sehingga di tengah carut marutnya

⁶⁴ Transkrip wawancara dengan Desi Setianingrum Waranggana dari Desa Kwagean, Loceret pada tanggal Sabtu, 11 Januari 2020, pukul 15.00 WIB

sistem pemilu 2019 pemilu tetap berjalan tertib dan lancar meskipun juga banyak penyelenggara yang menjadi korban. Di sela-sela nyruput es rujak, tiba-tiba Desi bergumam: “*Yang menyedihkan lagi banyaknya praktek politik uang, bagi saya itu pemaksaan dan tidak suportif*” tandasnya

Menurut Desi yang masih berusia 21 tahun, meskipun dirinya belum pernah terjun menjadi penyelenggara pemilu, tim sukses, ataupun peserta pemilu. Baginya pemilu tetaplah penting karena sebagai upaya penegakan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dengan pemilu suara rakyat dapat didengar dan dapat tersalurkan. Keinginan rakyat untuk sesuai dengan hati nurani. Golput itu bukan pilihan sebagai warga negara yang baik. Desi berharap bahwa pemilu ke depan biar efektif diatur jadwal yang sistematis dengan memisahkan antara pemilihan presiden dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif.



JERAT PEMILU ATAS PEKERJA SEKS

Nur Elya Anggraini

Gang Dolly: Dulu dan Kini

Sore itu, saya memang ingin melihat Gang Dolly dari dekat. Sejak pukul 16.00 WIB saya keluar dari kantor di Jalan Tanggulangin 03 Surabaya. Mendung langit Surabaya tak menyurutkan saya naik motor ke arah Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan Surabaya. Gang itu telah berubah, sudah mirip dengan gang-gang umumnya tempat orang-orang pinggiran menenun hidup: jualan bakso keliling, warung kopi pinggir jalan, tukang laundry.

Dulu, sepuluh tahun lalu, gang ini paling ramai dengan para penghibur malam. Pasar malam untuk yang ingin mendapatkan kenikmatan sesaat. Para makelar berjejer di luar, menawarkan dagangannya di balik akuarium. Tukang parkir juga untung. Satu sepeda bisa bertarif 5000 rupiah.

Dolly menjadi lokalisasi yang diklaim terbesar se-Asia Tenggara. Surga penikmat dunia. Banyak yang datang dan pergi untuk melihat dan atau ikut mencicipi berbagai sajian perempuan yang dipajang di balik akuarium. Dulu sekali, sebagaimana lagu yang dirilis ulang Aril Noah berjudul Kupu Kupu Malam: *Ada yang benci dirinya, Ada yang butuh dirinya, Ada yang berlutut mencintainya, Ada pula yang kejam menyiksa dirinya...*

Itu dulu, sebelum Risma membubarkannya pada Rabu 18 Juni 2014. Kini suasana telah berubah. Kaca itu memang tetap ada. Namun dibaliknya adalah seorang ibu-ibu tua yang menjadi penjahit, atau laundry yang berjejer, sementara tukang warung kopi terus



menuangkan kopinya kepada pelanggan yang tampak membaca koran.

Kini tak ada pekerja seks di Dolly. Namun bukan berarti praktek ini tak sepenuhnya habis di Surabaya. Mereka tetap bekerja, walau tak lagi terkonsentrasi di Dolly. Sayup sayup terdengar, mereka telah punya lokasi baru di Sememi dengan tarif 180.000 dalam setiap 60 menit. Atau di Banpur Wonokromo dengan harga sekitar 50 ribu sudah dapat mendapatkan pelayanan *short time*. Kemana menyebarnya para pekerja malam tersebut?

Evolusi Pekerja Seks 4.0: Pilihan Diri dan Politik

Lewat seorang teman, saya dapat bertemu dengan salah satu pekerja seks. Itupun dengan janji yang cukup lama dan berkali-kali batal. Alasan kerja dan lain-lainnya. Hingga di pertengahan Januari 2020, saya dapat bertemu di Warung Kopi Rolag.

Kami memesan minuman. Perempuan itu memakai masker. Di temani seorang teman, ia mulai mengungkapkan ceritanya tentang pemilu. Pandangan-pandangannya dan juga mimpi-mimpinya di masa depan.

Profesinya kini telah ditopang oleh teknologi yang banyak orang mengenal 4.0 (baca: *four poin zero*). Lewat aplikasi dan panggilan online. Bayarannya juga lebih besar. Kisaran antara 1 juta sampai 1,5 juta rupiah, walau urusan tarif juga adalah kesempatan dengan tawar-menawar antar dua belah pihak. Kalau deal, jadilah eksekusi.

Namanya N (26), masih keturunan Arab. Tempat tinggalnya di Ampel. Hanya saja nge-kost di Surabaya Barat. Ia adalah segelintir penghibur dari banyaknya penghibur dengan menggunakan kecanggihan teknologi.



Barangkali kita masih ingat, pada pertengahan 2019 lalu, Surabaya dihebohkan dengan ditangkapnya Vanessa Angle dengan tarif 80 juta rupiah di Sebuah hotel di Surabaya. Hampir bersamaan dengan itu juga ditangkap perempuan model yang tarifnya lebih murah di Surabaya.

Bisnis ini tambah menjanjikan saja. Semakin lama kian digemari. Mereka mengaku tak ada jaringan khusus. Walau tentu hingga kini belum ada penelitian yang cukup kompleks tentang peta jaringan prostitusi online. Sementara dalam kasus Vannesa Angel ternyata terdapat mucikari dibaliknya.

N memilih bekerja di dunia malam karena memang tak ada pilihan. Meski pilihan dirinya sulit, namun dalam urusan politik praktis, ia juga punya pilihan tersendiri. Pilpres tahun lalu ia memilih Partai Gerindra, dengan memilih Prabowo sebagai presiden.

“Saya sebenarnya tidak tertarik dengan dunia politik. Tapi semuanya ikut ebes (ayah) saya. Semuanya diarahkan ebes. Jadi saya milih,” paparnya.

“Dulu pernah diajak teman untuk melipat suara, tidak saya ambil,” tambahnya lagi.

Baginya pemilu hanya rutinitas semata. Ia menggeleng dengan bingung saat saya mencoba mendalami tentang kebijakan pemerintah yang dia rasakan.

“Sama sekali gak ada,” jawab dia sambil membenahi maskernya.

Ketika Pekerja Seks Mencoblos: Pasang Surut Pemilu

Setiap pemilihan, banyak di antara kita menyebut pemilu dengan pesta demokrasi. Suasana gemerlap yang menunjukkan suatu kegairahan yang luar biasa sebagai rakyat Indonesia. Hanya lewat pesta demokrasi tersebut, rakyat benar-benar menjadi raja. Memilih wakil-wakilnya di parlemen dan pemimpinnya di pemerintah.

Glorifikasi sebagai pesta, tak sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh pekerja seks. Tiap lima tahun pemilu, pekerja seks selalu memiliki ceritanya sendiri. Ada potret yang berbeda pemilu tahun 2004, 2014 dengan tahun 2019 saat pemilu berlangsung.

Pada tahun 2004, saat lokalisasi Dolly belum ditutup, banyak pekerja seks yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Hal ini karena banyak yang pulang kampung, tidak ada sosialisasi pemilu, dan tidak mengerti cara memilih.

Sementara pada saat menjelang coblosan pemilihan legislatif pada 9 April 2014, aktivitas lokalisasi diliburkan. Yang menarik adalah pernyataan dari Safik sebagai ketua Peguyuban Pekerja Lokalisasi, bahwa ia meliburkan aktivitas transaksi pekerja seks untuk menghormati terhadap pelaksanaan pemilu. Tidak hanya pekerja seks, mucikari yang berada dilokalisasi diharapkan juga memberikan hak suaranya dalam pemilu (Ardiansyah; Merdeka.com, 2014).

Ketika Dolly masih berjaya, berdasarkan salah satu data (merdeka.com: 2014), bahwa penghuni Dolly sekitar 1022 pekerja seks yang tersebar di 285 wisma. Para pekerja seks tidak semuanya berasal dari Surabaya. Banyak yang berasal dari daerah lain di seluruh Indonesia.

Pasca Pileg tahun 2014, suasana lokalisasi memanas. Puluhan pedagang di lokalisasi mengancam akan memboikot Pilpres (Agita: Tempo, 2014). Hal ini menyusul dari kebijakan Risma yang hendak



menutup lokalisasi di Surabaya karena dianggap melanggar terhadap Perda Nomor 7 tahun 1999. Akhirnya pada Rabu, 18 Juni 2014, Risma benar-benar menutup secara resmi lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu (Farid Assifa Kompas.com, 2014).

Kebijakan Risma ini berimbas terhadap partisipasi masyarakat di eks lokalisasi Dolly saat pelaksanaan pemilu. Setahun setelah penutupan, Surabaya menggelar pemilihan wali kota. Ketika Pilwali Surabaya kala itu, di atas kertas Risma menang telak dibandingkan dengan lawannya di eks lokalisasi Dolly meskipun masih kalah dengan angka golput yang tinggi. Dari 484 DPT, hanya 250 orang yang memilih (Artika: Tempo, 2015).

Pada pemilu tahun 2019, masyarakat di bekas lokalisasi Kampung Dolly juga menyalurkan pilihan. Pasangan presiden Jokowi-Ma'ruf menang di enam TPS yang berada di RW 12 Kelurahan Putat Jaya dan dua TPS gang 06 Kupang Gunung, Kota Surabaya.

Di TPS 95 Jokowi-Ma'ruf Amin meraup 140 Suara dan Prabowo-Sandi 65 suara. Sementara di TPS 96, Jokowi-Ma'ruf Amin menang 126 suara. Prabowo-Sandi mendapatkan 44 suara dari 180 suara dan 10 surat suara yang tidak sah. Pada TPS 99, Jokowi- Ma'ruf Amin mendapatkan 107 suara. Sementara Prabowo Sandi hanya memperoleh 39 Suara.

Masih di eks lokalisasi Dolly, di TPS 54 Kupang Gunung, Jokowi-Ma'ruf Amin meraup 161 dan Prabowo-Sandi 62 Suara. Sementara di TPS 55, Jokowi-Ma'ruf Amin meraih 148 Suara dan Prabowo Sandi mendapatkan 35 suara. Sedangkan surat suara tidak sah ada tiga suara.

Data dari tahun ke tahun ini menunjukkan suatu kegetiran bagi pekerja seks sebagai warga negara. Pada saat pemilu, mereka bangun pagi tanpa harapan yang pasti. Ikut juga masuk dalam bilik suara.



Memilih dengan rahasia. Walau tak punya alasan kuat untuk memilih berdasarkan rasionalitas. Yang penting coblos, selepas itu tak ada yang dilakukan.

Pekerja seks tak mengerti tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu. Mereka masih dalam anggapan; bahwa dirinya objek dan hanya dengan memoles kosmetik dan merawat kecantikan, ia bisa terus bisa bertahan hidup dengan pelanggan dan juga bayaran segepok uang.

Tampaknya hampir semua pekerja seks tak ingin selamanya berada dalam ruang gelap sebagai perempuan penghibur. Ia ingin keluar. Walau sebenarnya untuk bisa bebas keluar ia masih belum mampu melaluinya. Ada tangan-tangan gelap dalam diri dan sekitarnya yang tak mampu membuatnya keluar dari jebakan prostitusi.

Di pojok gelap dan bilik-bilik sempit tempat praktek itu, harapan pekerja seks juga gelap. Wisma itu tak mampu membuatnya aman. Karena sekali waktu, ketika pesona kecantikannya meredup dan saingan baru datang, maka pekerja seks harus merelakan diri untuk keluar dari ruang wisma.

Cara satu-satunya adalah dengan bekerja via online. Memasang gambar secantik mungkin dengan harapan dapat di order via online. Semuanya itu dilakukan dengan keinginan untuk terus menyambung kehidupannya. Lagu Aril Noah tetap seperti mengiang di telinga saya: *Ini hidup wanita si Kupu Kupu malam, bekerja bertaruh seluruh jiwa raga, bibir senyum, kata halus memanja, kepada setiap mereka yang datang...*

Pemilu Bagi Pekerja Seks: Sepi Sosialisasi dan Advokasi, Ramai Hujatan

Ada *nggak sih* isu pemilu yang membela kamu? Tanyaku sambil terus menghisap kopi. Saya ingin memastikan bahwa saya adalah



pendengar yang baik bagi B (26). Sosok lain yang saya temui selain N. Pertemuan itu dilakukan di Daerah Bratang, Surabaya, sekitar 2 kilometer dari kantor.

“*Gak ada*. Masyarakat juga banyak yang tidak taat terhadap kebijakan,” ucapnya.

B merasa tidak pernah diikuti dalam sosialisasi memilih, dan juga mengapa harus memilih. B hanya ikut-ikutan memilih. Ia hanya datang ke TPS dan mencoblos. Selebihnya ia tidak mengerti apa dampak yang dirasakan dari kegiatan pemilu yang dilakukannya.

Bila B dan N adalah pekerja seks online, maka di ujung timur Pulau Madura, di Sumenep, terdapat lokasi namanya “Genteng Biru”. Lokasi tua yang sebenarnya tidak begitu aktif. Para pekerja seksnya juga dari pendatang. Bukan penduduk asli.

Para pekerja seks, baik yang online maupun yang konvensional ternyata memiliki keserupaan perlakuan. Para pekerja seks hanya ramai saat ada pelanggan, tetapi sepi dari sosialisasi dan advokasi kepemiluan. Pekerja seks belum diperhatikan oleh pegiat pemilu sebagai isu penting. Suaranya sebagai warga negara nyaris tidak muncul ke permukaan. Di luar bilik-bilik mereka, malah yang ramai adalah hujatan dan juga cacian sebagai perempuan rendah.

Padahal dipilih dan memilih adalah hak. Tak peduli jenis pekerjaannya. Dalam dunia demokrasi dengan kemenangan ditentukan oleh rekapitulasi, tak ada beda pekerja seks dengan kiai. Sama saja. Berhak memilih dan dipilih. *One man one vote one value*. Satu orang satu suara satu nilai. Menyelamatkan suara yang dimiliki oleh pekerja seks adalah bagian dari menyelamatkan demokrasi yang ada di Indonesia.

Barangkali memang terdapat beberapa kemungkinan kendala mengapa pekerja seks masih sepi dari sosialisasi dan advokasi. *Pertama*, pekerja seks online yang tidak terkonsentrasi dalam tempat tertentu membuat deteksi data secara kongkret masih susah ditemukan. Walaupun misalnya dilakukan pendataan dengan berdasarkan KTP, maka asalnya juga menyebar dan status pekerjaannya di KTP adalah mahasiswa.

Kedua, pekerja seks masih belum dianggap sebagai kelompok yang perlu dibela. Pekerja seks nyaris dianggap sebagai tersangka. Baik dalam konteks agama maupun negara. Paradigmanya bukan merangkul tapi memukul, karena bertentangan dengan apa yang disebut sebagai syariat dalam agama.

Dramaturgi Kampanye Atas Nama Agama

Pada tahun 2019, hampir tidak ditemukan kampanye atas nama pekerja seks. Yang ada adalah kontestasi dan kampanye untuk meningkatkan citra sebagai pribadi yang beragama, dan setidaknya sebagai sosok yang peduli terhadap agama.

Alih-alih membela kepentingan pekerja seks, yang ada adalah pendulum intoleransi semakin naik dan meningkat. Ada yang menganggap wajar politik identitas, namun yang susah adalah bila kampanye politik identitas tersebut malah sering menyerang kelompok yang berbeda aliran pandangan.

Pekerja seks adalah bagian dari kelompok masyarakat pinggiran yang tidak laku dalam kampanye. Karena saat membela pekerja seks maka dianggap jauh dari kepentingan beragama. Banyak peserta pemilu, sibuk mencitrakan diri sebagai orang yang memiliki kualitas keagamaan yang kuat. Mulai dari pernah haji, pernah membantu



tempat tempat peribadatan, hingga bahkan ada yang ingin memperjuangkan syariat.

Gemerlap agama yang ditabuh dan diramaikan di media sosial pada sisi lain menghantam secara keras terhadap pekerja malam. Bukannya dibela, malah keberadaannya sebagai lembah maksiat akan dihilangkan. Membela pekerja seks sebagai isu dalam pemilu ditengah isu agama yang menguat, ibaratnya sama saja dengan melumuri lumpur diri, di tengah ingin terlihat bersih dan suci.

Kalau mau jujur, jauh-jauh hari telah lama dilakukan penelitian tentang pekerja seks saat gang Dolly masih beroperasi. Adalah Prof Nur Syam (2010) yang meneliti tentang pekerja seks dengan teori dramaturgi. Yakni melihat sisi depan dan sisi belakang dari pekerja seks di Surabaya. Dalam penelitian itu, Nur Syam menemukan bahwa meski pada sisi depan mereka memuaskan laki laki dengan kategori sebagai pekerjaan yang maksiat, namun di panggung belakang mereka adalah perempuan yang juga melafalkan agama, berteriak pada Tuhannya.

Para pekerja malam di Surabaya tidak semuanya berasal dari kota pahlawan. Banyak pendatang yang mencari peruntungan di kota besar. Mereka juga perempuan baik-baik di desa atau kampungnya. Alasan ekonomi dan perbaikan nasib serta kesejahteraan menjadi salah satu alasan ketergantungan mereka terhadap dunia malam. Mereka ada yang mengaji di bilik-bilik, shalat dan saat ramadhan juga berpuasa.

Sementara malam mulai terasa di Surabaya, Lagu Ariel terus mengiang: *Dosakah yang dia kerjakan?, Sucikah mereka yang datang?, Kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis dalam senyuman.*

Pilihan Rasional Pekerja Seks

B memang memilih. Di KTPnya ia berstatus sebagai mahasiswa. Sebagai warga Surabaya ia mudah mendapatkan akses pilihan. “Mudah *sib* sebenarnya. Bisa milih juga. Karena *kan* sudah ada petunjuknya. Sehingga bisa milih,” ungkapnya. Kopi yang dia pesan masih sisa setengah.

Ia memilih Jokowi dan memilih PDIP, “Ikut ramainya aja *sib*.”

Baginya pemilu yang penuh pelanggaran juga harus segera dapat diselesaikan. “Keinginannya *sib* lebih diperketat saja pemilu itu,” tambahnya lagi.

Sebagaimana rakyat pada umumnya, B juga berharap bisa dapat manfaat dari setiap hasil pemilu. Pemimpin yang telah dipilih dapat membuat kebijakan yang bisa dirasakan manfaatnya. Namun selama terlibat memberikan suara dalam pemilu, ia merasa tidak mendapatkan apa-apa sejak pemilu hingga kini.

Bagi B, pemilu hanya untuk politisi dan orang-orang atas. Dirinya sebagai kelompok orang-orang bawah tidak banyak mengerti. Bahkan B belum memahami bahwa pemilu ada kaitannya dengan kesejahteraan dirinya. “Aku *tuh gak* pernah ngerti yang *kayak* gitu, *gak* pernah sama sekali.”

Karena manfaat yang dirasakan oleh pekerja seks masih cukup sedikit, maka keterlibatannya dalam mengawal demokrasi juga tak tampak dalam ruang publik. Tak bersuara dan belum ada yang menyuarakan. Inilah barangkali juga menjadi pertimbangan dan pilihan rasional dari pekerja seks untuk menyepi dari ruang politik.

Berkenaan dengan pilihan rasional, James S Coleman mengembangkannya sebagai teori. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa

setiap individu dalam menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan rasionalnya.

Rasionalitas yang dimaksud oleh Coleman kecenderungannya pada pertimbangan ekonomi, atau dengan kata lain untung rugi yang didapatkan. Takaran untung dan rugi inilah yang tampaknya dirasakan oleh pekerja seks. Dalam konteks jual beli dan transaksi untuk kepentingan uang dan pekerjaannya barangkali memang benar dilakukan oleh pekerja seks.

Namun dalam hal pemilu, pekerja seks yang tak mendapatkan keuntungan secara ekonomi, baik secara langsung atau tidak dengan menggunakan kerangka teoritik dari James S. Coleman akan menemukan jawabannya. Untuk apa milih, jika tidak untung. Kira-kira begitu kemungkinan yang terjadi pada diri pekerja seks dan kelompok masyarakat lain yang lebih memilih golput dalam pemilu.

Meski begitu, dunia pekerja seks adalah dunia malam yang tak semuanya bisa dibaca secara jelas. Bersamaan dengan nasibnya yang abu-abu dan masa depan yang tak menentu, ternyata para pekerja seks juga memiliki sisi penting untuk demokrasi. Terutama tentang pandangannya terhadap politik uang dan politisasi SARA.

Pekerja Seks Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA

Alasan klasik tentang ekonomi kerap menjadi jawaban sebagai pembenar para perempuan bekerja sebagai penghibur. Ukuran ekonomi jadi serba abu-abu. Menumpuk harta kekayaan atau karena terdesak lapar. N misalnya, mengaku karena kebutuhan ekonomi.

Namun setelah ngobrol dengan cukup lama, N sebenarnya bukan berasal dari keluarga tidak mampu. Hanya saja karena kecondongan untuk dugem, akhirnya N susah keluar dari dunia malam

tersebut. Dalam dugem, uang puluhan juta bisa dihabiskan dalam semalam.

Mirip dengan N, adalah B, perempuan yang mangkal di Bratang ini mengaku juga karena terdesak ekonomi. Ia mengaku melayani satu pelanggan dengan bayaran sekitar 800 ribu. Bisa main satu kali atau dua kali. Walau ia mengaku hanya mendapat kisaran 5 juta setiap bulannya, namun besaran penghasilan ini bukan berarti tetap. Jumlah pelanggan yang naik turun ikut membuat angka tiap bulan pasang surut.

Meski karena alasan ekonomi menjadi pekerja seks, namun B tetap menunjukkan ketidaksukaanya terhadap politik uang. Ia menganggap bahwa politik uang perlu dibinasakan. Ia menjawab pendek saat ditanya perihal pemilu berkenaan dengan politik uang.

Saya : “Pemilu *kan* masih banyak politik uang mbak, gimana *ja* menurut *sampean* orang dibayar untuk memilih itu?”

Bella: “Politik uang itu kotor. Harus dibinasakan.”

Entah ini hanya pemanis dimulut, namun jawaban ini seakan menandakan pesan: pelaku politik uang lebih busuk dari para wanita penghibur yang melayani hidung belang. Karena ternyata para pekerja seks juga menolak politik uang dan berharap dibinasakan.

B tak suka dengan politik uang. Pemilu baginya sarana mengganti pemimpin. Sebagai warga negara yang baik, ia turut memberikan pilihan. Tidak pernah golput. Walau uang menjadi kebutuhan, di balik rasa yang paling dalam B ingin berhenti jadi wanita penghibur.

“*Pengennya sih* kerja di kantoran saja mbak dan bisa nabung di hari tua.”



B juga memiliki harap yang sama agar tak ada politisasi SARA.

“Dicegah, biar tidak ada pilah-pilah karena SARA” ujarnya.

Sebagaimana kita tahu, isu agama dan suku selalu digunakan dalam setiap pemilu. Isu agama yang digunakan untuk menghantam musuh juga akan berdampak terhadap tenunan kebhinekaan. B berharap tak ada lagi kampanye SARA.

Diksi yang muncul ke ruang publik adalah tentang haram, kafir, murtad, dan bahkan tidak akan dishalati jenazahnya menjadi polusi dalam ruang demokrasi. Efek domino dari hal tersebut, isu-isu kaum mustadafin atau kelompok marginal, rentan dan kaum pinggiran luput dari kampanye pembelaan dalam setiap pemilu. Banyak yang lebih suka membakar api emosi massa daripada memberikan oase segar bagi kelompok masyarakat pinggiran yang telah lama lapar dan butuh pembelaan.

Alih-alih akan menganggotai isu tentang dunia malam yang kelam. Bukannya dijadikan sebagai isu pembelaan. Malah yang muncul adalah narasi tentang kemaksiatan dan kampanye dengan janji membela agama dengan cara menutup lokalisasi.

Agama, uang dan segala romantikanya membuat wanita penghibur semakin remang remang nasibnya. Dicela orang karena agama, dan juga tak pernah jadi perhatian pembuat kebijakan. *Apa yang terjadi terjadilah, yang dia Tabu Tuhan penyayang Umatnya, apa yang terjadi terjadilah, yang dia tahu hanyalah penyambung nyawa.*

Sejumlah Rekomendasi: Pekerja Seks Sebagai Kata Kerja

Nyaris tidak ada perempuan yang ingin bercita cita menjadi pekerja seks. Karena sebagai pekerja seks akan dipinggirkan oleh



agama, sosial masyarakat, dan bahkan oleh kebijakan publik. Heboh heboh tertangkapnya pekerja seks di Padang yang dijebak oleh Andre Rosadi pada tanggal 26 Januari 2020 barangkali sebagaimana fenomena gunung es, tentang bagaimana para perempuan pinggiriran diperlakukan dan dipermalukan.

Tanpa bisa membela diri, pekerja seks yang dijebak itu disematkan sebagai tersangka dan dituduh sebagai pelaku maksiat. Penyematan sebagai tersangka akan membuat pekerja seks terancam kehilangan hak-haknya. Narasi sumir yang dipaksakan dengan diksi yang peyoratif meletakkan pekerja seks semakin berada dalam pinggiriran. Terpinggirkan secara ekonomi dan sejarah. Tak merasakan pesta demokrasi, dan bahkan kue anggaran yang melimpah ruah.

Untuk itulah, dalam ruang pemilu ini, pekerja seks layak kembali dihadirkan sebagai kata kerja. Kelompok perempuan ini perlu dilihat sebagai bagian penting untuk kian menyedarkan kelompok masyarakat di sekelilignya ke dalam dunia malam yang selalu ada di setiap kota.

Pekerja seks harus bersuara, menyampaikan aspirasinya, ditampung ide-idenya, dan dapat diakomodasi segala kepentingannya. Kita yang mesti mulai memasang telinga, sedikit diam dan berhenti bicara dan mendengarkan dengan seksama semua mimpi dari pekerja seks.

Barangkali langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah, *pertama*, pendataan secara sistemik dan khusus untuk menginventarisasi pekerja seks di sejumlah Kabupaten/Kota yang ada. Pendataan ini dilakukan dengan sebenar-benarnya untuk kepentingan advokasi dan sosialisasi berkenaan dengan pemilu.

Kedua, pemetaan kerawanan masalah di lingkungan lokalisasi. Tidak ada cara yang bisa dilakukan untuk tahu dan mengerti tentang masalah masalah internal yang berkenaan dengan pekerja seks dan

pemilu tanpa masuk ke dalam lokalisasi. Pemaparan dalam esai ini hanya segelintir problem yang dirasakan oleh pekerja seks. Tidak menutup kemungkinan masalah di setiap lokalisasi yang ada di Kabupaten/Kota akan lebih banyak dirasakan oleh pekerja seks.

Ketiga, menjadikan salah satu di antara pekerja seks sebagai aktor dalam pemilu yang berkenaan dengan penyampaian pesan-pesan sosialisasi terhadap sesama pekerja seks.

Keempat, kampanye dan sosialisasi pemilu benar-benar penting untuk memperhatikan para perempuan pinggiran yang bekerja di dunia malam. Ketersediaan anggaran dan juga keberanian untuk masuk ke dalam ruang-ruang pinggiran penting dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pegiat pemilu.

Kelima, advokasi dari pegiat pemilu untuk mendampingi secara lebih dekat terhadap para pekerja seks juga penting untuk dilakukan. Mulai pendampingan sebagai pemilih, cara memilih, dan bagaimana memilih dengan pertimbangan pertimbangan yang lebih rasional dan berdasarkan kepentingan bersama.

Keenam, pendidikan politik juga perlu dilakukan oleh partai politik. Bahwa para peserta pemilu yang berkontestasi diharapkan juga untuk memberikan perhatian kepada lokalisasi dengan turut serta memberikan pendidikan politik. Karena diantara tugas partai politik adalah juga memberikan pendidikan politik.

Berkenaan dengan hal ini, penelitian yang dilakukan oleh Edward Aspinall & Ward Berenschot yang berjudul *Democracy for Sale: Pemilu, Klientelisme, dan Negara di Indonesia* (2019), menjadi gambaran sederhana bagaimana partai politik di Indonesia hanya hadir saat pemilu. Hal ini berbeda dengan penelitian di beberapa belahan negara lain, saat partai politik hadir dalam ruang ruang keseharian dari masyarakat. Karena di Indonesia partai politik hanya hadir saat pemilu dan manfaatnya tidak

dirasakan, tidak heran bilamana dalam banyak kasus terjadi suatu potret demokrasi yang dijual.

Disinilah para pekerja seks yang tersebar di setiap sisi kota adalah mereka yang berharap segera mendapatkan cahaya kepedulian, kebijakan, dan perhatian dari segenap pihak agar bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bilamana telah bangun pagi, para perempuan malam itu akan melihat matahari kepedulian yang membuatnya bangkit, bersuara dan berpesta dalam demokrasi.

TENTANG PENULIS

MARPUAH, srikandi bumi wali ini satu-satunya komisioner perempuan dalam jajaran keanggotaan Bawaslu Kabupaten Tuban. Perempuan kelahiran 16 April 1986 ini dipercaya melaksanakan tugas sebagai Koordinator Divisi Organisasi dan SDM. Baginya divisi ini mengambil peran penting dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang berintegritas. Penataan kelembagaan yang kuat akan menentukan kualitas hasil pengawasan. Menjadi pengawas pemilu tidak pernah masuk dalam deretan cita-cita marpuah kecil. Namun garis hidup mengantarkanya sebagai srikandi penegak demokrasi di bumi wali. Ibu dua anak ini mengawali karir sebagai penyelenggara pemilu sebagai KPPS Tahun 2008, PPS Tahun 2013-2014, anggota Panwascam tahun 2015 dan ketua Panwascam Tahun 2017. Sederet pengalaman itu membuatnya yakin mampu menjalankan tugas pengawasan dengan baik. Alumni Universitas PGRI Ronggolawe ini memegang prinsip bahwa menduduki kursi komisioner Bawaslu adalah amanah besar yang wajib dipertanggungjawabkan dengan mendedikasikan diri terhadap lembaga. Tuntutan bekerja penuh waktu bukan sesuatu yang baru bagi mantan aktivis PMII ini, karena sebelumnya ia banyak menggeluti program pendampingan masyarakat. Terus berkarya adalah cita citanya. Terlahir sebagai perempuan desa tidak membuatnya merasa rendah hati. Baginya kesuksesan itu berawal dari ketiadaan.

DEVI AULIA ROHIM; perempuan yang terus berusaha melawan kegoblokannya ini adalah ibu dari tiga anak yang masih kecil-kecil. Devi yang harus mencuri-curi waktu untuk ngAsi ini dilahirkan di kabupaten Ngawi dan tumbuh besar di Kabupaten Madiun. Keberangkatannya ke Kabupaten Jember pada tahun 2003 membuatnya menemukan rumah besar yang selalu menjadi tempat belajar, berproses dan selalu menanamkan dzikir, fikir dan amal sholih bernama PMII; menemukan jodoh dan menetap sampai sekarang di Kabupaten Jember. Alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember ini belum pernah merasakan pekerjaan yang linier dengan bangku pendidikan di kampus, karena Devi menganggap setiap orang yang ditemui adalah guru dan setiap tempat yang dituju adalah sekolah (tempat belajar). Dunia pemberdayaan yang lama Devi geluti mendorong dia mendirikan Rumah BBM (Rumah Bermain, Belajar dan Mengaji). Rumah ini mengajak anak-anak di lingkungan perumahan untuk mengenal teman dan tetangga, mengajak anak-anak bermain mengembangkan kompetensinya dengan tidak meninggalkan mengenal Tuhannya baik dalam bentuk mengaji, al-berzanji atau kajian keagamaan lainnya. Pada tahun 2017 Devi terpilih menjadi Panwas Kabupaten Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, dan terus berproses hingga sekarang di Bawaslu Kabupaten Jember. Layaknya manusia lainnya yang selalu mempunyai harapan, Devi juga mempunyai harapan. Harapan terbesar Devi adalah bisa selalu bermanfaat bagi sesama, agama dan nusa.



ROYIN FAUZIANA; Lahir di Jember, 04 April 1992. Mengenyam pendidikan di Jember, sejak taman kanak-kanak hingga pendidikan pascasarjana yang tak kunjung diwisuda. Belajar tentang mengawal demokrasi sejak tahun 2015 sebagai staf Pengawasan di Panwaslih Kabupaten Jember dan kini menjadi staf Humas dan Hubal tercantik (karena memang satu-satunya perempuan) di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Juga memiliki aktivitas sampingan, yakni jualan online tas, atasan, bawahan dan tentu juga krim pemutih dengan modal dan model diri sendiri. Istri dari orang Madura ini sedang mendalami tirakat dan mengamalkan mantra; *Nakal Boleh, Bodoh Jangan*.

AFIDATUSHOLIKHA; Lahir di Mojokerto pada 2 Desember 1977. Sempat mengenyam pendidikan di Pesantren Darut Tauhid Bangil selama 7 tahun. Aktif dalam organisasi intra maupun ekstra kampus sebagai salah satu Pengurus Senat Mahasiswa dan Pengurus PC PMII Pasuruan. Sepulang ke kampung halaman, Afidah menjadi Ketua Umum PC IPPNU hingga berlanjut di kepengurusan PC Fatayat NU Kabupaten Mojokerto sebagai Ketua II. Alumni Pascasarjana IAIN Sunan Ampel melalui jalur Beasiswa Kemenag ini juga pernah menggeluti dunia Pendidikan sebagai Guru dan Kepala MI Miftahul Ulum Kunjorowesi. Dalam kepemiluan, berpengalaman sebagai Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto selama 2 periode (2009–2018). Suka dengan tantangan dan keinginan untuk terus belajar, Afidah bertekad akan maksimal dalam menjalankan tugas sebagai Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mojokerto.

LILIK MUSTAFIDAH; Lahir di Bojonegoro, 01 Mei 1984. Perempuan yang mengenyam pendidikan di PP. At-Tanwir Bojonegoro dan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, pernah aktif berproses di Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sektor Mahasiswa Cabang Malang, KOHATI PB, Alumni Taplai Lemhannas Pemuda Angkatan VIII, DPP KNPI dan FORHATI Jawa Timur. Selama berproses di KOHATI PB, Lilik pernah menghasilkan karya ilmiah berjudul “Ekofeminisme dalam Perspektif Islam (Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan)” dimuat dalam Jurnal Melati terbitan KOHATI PB tahun 2013. Ia juga pernah mengabdikan sebagai Sekretaris Eksekutif Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) dan di Lembaga Survey Indonesia (LSI). Proses pengabdian Lilik dalam konteks demokrasi dimulai sejak terlibat menjadi Fasilitator *Mobile Voter Education Campaign* untuk pemilu pemuda dan perempuan wilayah Jawa Timur pada Pileg dan Pilpres 2009, Divisi SDM dan Parmas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baureno pada Pilkada 2018 dan sekarang sedang menjalani amanah sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bojonegoro periode 2018-2023. Baginya, motto hidup yang selalu dipegang *Nahnu Qosamna* dan jangan pernah lelah menebar kebaikan.

INDRIAS KRISTININGRUM; lahir di Kota Mojokerto pada 23 April 1980. Perempuan yang menjadi anak bontot di keluarganya ini pernah tinggal di pulau Bali selama 1 tahun. Ia mengawali karir publiknya dengan bergabung pada sebuah koperasi bentukan pemerintah. Koperasi penghasil pupuk organik itu bergerak untuk



membantu para petani yang seringkali terjerat dengan tingginya harga pupuk. Berikutnya, Indrias bergelut di sektor pemberdayaan melalui PNPM-Mandiri Perkotaan. Ia dipercaya menjadi fasilitator di bidang social yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan kaum miskin kota. Ia memulai karir menjadi penyelenggara pemilu sejak tahun 2017 saat menjadi pengawas pemilu kecamatan (panwascam) hingga tahun 2018 dipercaya mengampu Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran (HPP) pada Bawaslu Kota Mojokerto.

DIAN PRATMAWATI; lahir di Malang, 19 Nopember 1984 menyandang lulusan Sarjana Pendidikan Akuntansi di Universitas Negeri Malang. Saat di kampus, Ibu dari Raditya ini suka berorganisasi. Ia pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, aktif menjadi sekretaris regional Ikatan Mahasiswa Akuntansi se Jawa Timur, dan tak lupa aktif di organisasi HMI Cabang Malang. Pernah bekerja sebagai *teller* dan *CS* di PT. Bank CIMB Niaga Tahun 2010–2013 dan dipromosikan menjadi *operation officer* (supervisor) di bank tersebut dari Tahun 2013–2017. Berkomitmen memberikan sumbangsih dan ikut serta mengawal demokrasi, mengantarkannya menjadi anggota Bawaslu Kota Mojokerto sebagai Koordinator Divisi organisasi dan SDM yang siap untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

INSIYATUN; Lahir di Sumenep pada tanggal 02 Agustus 1981. Insy lulusan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (Sekarang UINSA) tahun 2004 dengan predikat Cum-laude, aktif di berbagai organisasi kampus, di dalam maupun di luar, termasuk PMII. Sebagai



pegiat sosial, sebelum berkarir di Bawaslu, Insy mengkhidmatkan diri di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan keagamaan yakni Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU, Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) Kabupaten Sampang dan LSM *East Java Development Studies*. Insy juga aktif melakukan pendampingan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan anak, pendidikan, kemandirian, hukum, dan peningkatan ekonomi. Insy yang punya motto “***Sekali hidup, Hiduplah yang berarti***” ini intens dengan aktivitas kepemiluan sejak menjadi anggota KPPS Desa Nepa Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang pada Pilkada tahun 2012, Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang tahun 2013-2014, kemudian Insy terpilih menjadi Anggota Panwaslu Kabupaten Sampang pada Pilkada tahun 2017-2018, dan ketika Panwaslu beralih dari *ad hoc* menjadi lembaga permanen pada tahun 2018, Insy terpilih kembali dan menjadi Ketua Bawaslu kabupaten Sampang periode 2018 – 2023. Insy telah menikah dengan R. Nurus Syamsi S.Pd.I.,M.M., dan dikaruniai dua anak laki laki, Ardisyam dan Arfa Muhammad Syam.

FINA LUTFIANA RAHMAWATI; Lahir di Nganjuk pada 18 Oktober 1982. Perempuan jebolan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya (UINSA) ini sarat aktivitas sejak di bangku mahasiswa, termasuk di PMII. Sebagai pecinta tetarer, pegiat sastra, menulis dan riset, karya-karyanya bisa dijumpai pada buku Antologi Puisi Jawa Timur 2004, dan buku Antologi Puisi Nusantara yang berisi sekumpulan puisi dari pegiat sastra dari Indonesia, Malaysia dan Brunai Darusslama. Bekerjasama dengan Smartlab Education Private School tahun 2010, ia menuliskan



riset berjudul *Developing a new teaching approach, Facilitating active Learning, and Reflecting on Practice*. Sedangkan tulisannya tentang *Penerapan Metode Bermain Peran Untuk Pengembangan Kreativitas Anak*, dan *Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Melalui Pembiasaan Diri* telah diterbitkan oleh International Proceeding of ICESS. Intim dengan dunia kepemiluan sejak bergabung dalam Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Fina pernah menjad pengawas TPS saat Pilkada 2018 lalu. Dengan modal semangat dan terus belajar, mengantarkan Fina terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Nganjuk Periode 2018-2023.

NUR ELYA ANGGRAINI; Lahir di Bangkalan, 13 Januari 1983. Fans fanatik Juventus yang akan senang bila tim rivalnya kalah ini penyuka novel dan kopi. Pernah menjadi jurnalis dan penyiar di Radio Prosalina FM Jember, Anggota Panwas Jember pada Pilkada Tahun 2015 dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim pada 2016-2018, dan kini Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bila membuka Facebooknya, Ely adalah seorang ibu dan pendidik dari Maheer, Kameel dan Kareem. Kini ia terus bekerja keras agar Bawaslu se-Jawa Timur terbuka dan informatif.



PEREMPUAN YANG

santri, penyelenggara pemilu, sopir ojek online,
difabel, waranggana, kuli panggul, nelayan, buruh pabrik,
penjual jamu keliling, satpam, dan pekerja seks.

Kisah sukses orang pinggiran adalah satu dua cerita di antara
masih banyak perempuan “pinggiran” belum sepenuhnya
mengerti dan memahami tentang pemilu dan demokrasi.
Mereka jauh dari hingar bingar pemilu dan pesta demokrasi.
Alih-alih berpartisipasi untuk mengawasi,
tidak golput saja sudah capaian yang besar.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari para perempuan
penyelenggara pemilu di Jawa Timur yang telah melakukan
wawancara, datang menemani dan mendengarkan segala
cerita perempuan “pinggiran” dalam menghadapi pemilu.
Mereka bercerita tentang pengalamannya mengikuti pemilu,
pengetahuan-pengetahuan yang terbatas, sikap dan
pandangan politik, serta mimpi-mimpinya tentang demokrasi
dan masa depan Indonesia.

Membaca kumpulan tulisan ini kita akan menyadari bahwa
tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu dan pemangku
kebijakan cukup besar serta perlu terus ditingkatkan.
Mungkin di antara kita banyak yang suka bicara di ruang seminar,
depan televisi dan berdebat sengit untuk urusan tertentu.
Namun barangkali kita perlu sejenak diam dan lebih banyak
memfungsikan telinga untuk memperjuangkan mereka
dalam kebijakan yang nyata.